

KATA PENGANTAR

Penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota merupakan tahapan ke-4 dari enam tahapan pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Tahapan ini pada dasarnya merupakan tindak lanjut dari Strategi Sanitasi Kab/Kota (SSK), yaitu penjabaran lebih lanjut dari visi dan misi sanitasi kab/kota, strategi dan kebijakan sanitasi kab/kota, serta arahan program/kegiatan selama 5 (lima) tahun mendatang.

Melalui penyusunan dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota diharapkan program dan kegiatan yang telah diidentifikasi pada tahapan SSK dapat diimplementasikan dengan tepat, sesuai dengan prioritas, dan dengan mempertimbangkan kendala dan kemampuan yang ada.

Memorandum Program merupakan kesepahaman dan kesepakatan bersama antara para pemangku kepentingan dalam rangka percepatan pembangunan sanitasi permukiman di daerah, yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dan sumber pendanaan lainnya.

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini berisikan mengenai tata cara penyusunan dokumen MPS, yang mencakup penetapan program prioritas pembangunan sanitasi, penyusunan rencana kegiatan sanitasi, rencana anggaran sanitasi, dan rencana implementasinya. Selain itu juga dijelaskan mengenai tata cara internalisasi dan penggalangan kesepakatan dari para pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah.

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota edisi 2014 ini merupakan penyempurnaan dari petunjuk sebelumnya. Adanya penyempurnaan ini diharapkan proses penyusunan dan produk MPS yang dihasilkan menjadi lebih efisien dan efektif.

Pedoman ini diharapkan dapat memberikan pedoman bagi anggota Program Manajemen Unit (PMU), Program Implementation Unit (PIU), Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Provinsi dan Kab/Kota, Satuan Kerja Kementerian/Lembaga (Satker K/L) terkait, para fasilitator, dan para penggiat sanitasi.

Dengan Pedoman yang menuntun penggunanya langkah demi langkah, diharapkan dapat dihasilkan sebuah Dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) yang lengkap, terpadu, bersepakat, dan dapat diimplementasikan secara tepat waktu dan tepat sasaran.

Jakarta, Maret 2014

Ir. Djoko Mursito, Dipl. SE, MM Direktur Pengembangan PLP Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum

I. UMUM

1.1 Sanitasi

Sanitasi secara umum mengacu pada penyediaan fasilitas dan layanan untuk pembuangan urin dan tinja yang aman. Sanitasi yang tidak memadai adalah penyebab utama penyakit di seluruh dunia dan sanitasi diketahui memiliki dampak positif bagi kesehatan baik di lingkungan rumah tangga dan di masyarakat pada umumnya. Kata 'Sanitasi' juga mengacu pada kemampuan menjaga kondisi higienis, melalui layanan pengumpulan sampah dan pembuangan air limbah (*WHO*, *http://www.who.int/topics/sanitation/en/. Diakses pada 30 November 2011*)

- 1.2 **Masterplan (Rencana Induk)** adalah Perencanaan dasar yang menyeluruh Kabupaten/Kota untuk jangka panjang
- 1.3 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan di Indonesia
- 1.4 Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)
- 1.5 **Feasibility Study (Studi Kelayakan)** adalah penelitian tentang dapat tidaknya suatu proyek (biasanya merupakan suatu proyek investasi) dilaksanakan dengan berhasil
- 1.6 **SIDLACOM** singkatan Survey, Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance
- 1.7 **Tahun (n)** adalah tahun Penyusunan Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Tahun Penyusunan Strategi Sanitasi Kota (SSK)
- 1.8 **Tahun (n+1)** adalah tahun Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS)
- 1.9 **Review** adalah Penelahaan kembali, melengkapi dan melakukan revisi seperlunya terhadap dokumen-dokumen sebelumnya dan dituangkan dalam dokumen.
- 1.10 **PPAS** singkatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
- 1.11 **RKA** singkatan Rencana Kerja dan Anggaran
- 1.12 **DPA** singkatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
- 1.13 **DIPA** singkatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- 1.14 RPJM singkatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- 1.15 **RPIJMD** singkatan Rencana Pembangunan Investasi Jangka Menengah Daerah
- 1.16 Renja SKPD singkatan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah
- 1.17 Funding Gap adalah Selisih antara kebutuhan dan kemampuan pendanaan
- 1.18 **Updating MPS-Tahunan** adalah Pemutahiran Memorandum Program Sanitasi yang dilakukan setiap tahun yang berfokus kepada hasil monev implementasi, program kegaiatan dan penyiapan *readiness criteria* untuk implementasi satu dan dua tahun kedepan.

II. AIR LIMBAH

- 2.1 **Air limbah domestik** adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama (*Lampiran 2 Permen PU No.* 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)
- 2.2 Badan air penerima adalah sungai, kali, danau, saluran, kolam, dan lain-lain yang menerima pembuangan limbah
- 2.3 Black water adalah Air limbah yang berasal dari jamban atau WC saja

- 2.4 **Cubluk** adalah sistem pembuangan tinja sederhana, terdiri atas lubang yang digali secara manual dilengkapi dengan dinding rembes air
- 2.5 Grey water adalah air limbah yang berasal dari mandi, cuci, dan dapur
- 2.6 **Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)** adalah instalasi pengolahan air limbah yang didisain hanya menerima lumpur tinja melalui mobil atau gerobak tinja (tanpa perpipaa) (*Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*)
- 2.7 **Jamban** adalah Fasilitas pembuangan tinja
- 2.8 Pencemaran adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam air oleh kegiatan manusia. Akibatnya kualitas air turun sampai ke tingkat yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai peruntukannya
- 2.9 **Pengolahan air limbah** adalah perlakuan terhadap air limbah, agar air dapat dibuang ke badan air sesuai baku mutu yang disyaratkan
- 2.10 SBS singkatan Stop Buang Air Besar Sembarangan
- 2.11 **Sewer** adalah pipa atau pembawa lainnya yang mengalirkan air limbah dari beberapa atau banyak properti (*Sanitation and Hygiene Promotion*)
- 2.12 **Sewerage** adalah sistem pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan akhir air limbah (*Water Environment Federation*)
- 2.13 Sistem sanitasi off site adalah sistem pembuangan air limbah dimana air limbah dibuang serta diolah secara terpusat di Instalasi Pengolahan Limbah Kota. Sebelumnya lebih dulu melalui penyaluran perpipaan air limbah kota (*sewer pipe*)
- 2.14 **Sistem sanitasi onsite** adalah sistem pembuangan air limbah secara individual yang diolah dan dibuang di tempat. Sistem ini meliputi cubluk, tangki septik dan resapan, unit pengolahan setempat lainnya, sarana pengangkutan, dan pengolahan akhir lumpur tinja (*Lampiran 2 Permen PU No. 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Biadng Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang*)
- 2.15 **Tangki septik (septic tank)** adalah ruang kedap air yang berfungsi menampung dan mengolah air limbah rumah tangga
- 2.16 **Wastewater** adalah zat cair atau air buangan tercemar dari kegiatan operasi rumah tangga atau komersial atau industri, yang tercampur dengan air hujan atau air tanah akibat infiltrasi (*Water Environment Federation*)

III. PERSAMPAHAN

- 3.1 **3R** adalah Reduce, Reuse, dan Recycle. Sebuah pendekatan untuk mengurangi timbulan sampah melalui: mengurangi, menggunakan kembali, serta mendaur ulang sampah
- 3.2 **Bangunan sarana pembuatan kompos** adalah prasarana pembuatan kompos yang terdiri dari kantor, gudang, pemilihan pengomposan (berfungsi sebagai tempat kegiatan pengomposan yang terlindung dari gangguan cuaca)
- 3.3 **Controlled Landfill (Lahan Urug Terkendali)** adalah metode pembuangan akhir sampah dengan cara penyebaran sampah secara terkendali dan dilakukan penimbunan dengan tanah secara berkala
- 3.4 Kompos adalah produk lumpur atau material lain yang teroksidasi secara thermophilic dan biologis
- Landfill adalah lahan pembuangan sampah yang menggunakan teknologi pembuangan sampah. Gunanya untuk meminimalkan dampak lingkungan dan melindungi kualitas air (baik air permukaan maupun bawah permukaan)
- 3.6 **Leachate (Lindi)** adalah bagian cairan yang terpisahkan dari zat padat dari campuran sampah yang mengalir secara gravitasi atau filtrasi
- 3.7 **Open dumping** adalah sampah ditimbun di areal tertentu tanpa membutuhkan tanah penutup

- 3.8 **Pengelolaan sampah** adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah
- 3.9 Pipa gas adalah sarana untuk mengalirkan gas hasil proses penguraian zat organik
- 3.10 **Sampah** adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (*UU No. 18 tahun 2008*)
- 3.11 **Sanitary Landfill** adalah metode pengurugan sampah ke dalam tanah, dengan menyebarkan sampah secara lapis per lapis pada sebuah site (lahan) yang telah disiapkan, kemudian dilakukan pemadatan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi, kemudian ditutup dengan tanah penutup dan dipadatkan diakukan setiap hari.
- 3.12 **Tempat Penampungan Sementara (TPS)** adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu (*UU No. 18 tahun 2008*)
- 3.13 **Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)** adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah (*UU No. 18 tahun 2008*)
- 3.14 **Tempat Pengolahan Sampah Reuse**, **Reduce**, **Recycle (TPS 3R)** adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, dan pengolahan.
- 3.15 **Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)** adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan (*UU No. 18 tahun 2008*)
- 3.16 TPA Regional adalah TPA yang digunakan oleh lebih dari satu Kabupaten/Kota. TPA regional menjadi salah satu pilihan untuk mengatasi masalah keterbatasan lahan yang dihadapi Kabupaten/Kota.
- 3.17 **Transfer Depo** adalah tempat memindahkan sampah dari alat pengumpul ke alat pengangkut

IV. DRAINASE

- 4.1 **Drainase** adalah prasarana yang berfungsi mengalirkan kelebihan air dari suatu kawasan ke bandan air penerima.
- 4.2 **Drainase perkotaan** adalah drainase di wilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/mengendalikan air permukaan sehingga tidak mengganggu masyarakat dan/atau dan tidak merugikan masyarakat.
- 4.3 **Drainase perkotaan berwawasan lingkungan** adalah prasarana drainase diwilayah perkotaan yang berfungsi mengelola/menegndalikan air permukaan (limpasan air hujan) sehingga tidak menimbulkan masalah genangan, banjir dan kekeringan bagi masyarakat serta bermanfaat bagi kelestarian lingkungan hidup.
- 4.4 **Sistem drainase perkotaan berwawasan lingkungan** adalah jaringan drainase perkotaan yang terdiri dari saluran induk/primer, saluran sekunder, saluran tersier, bangunan peresapan, bangunan tampungan, beserta sarana pelengkapnya yang berhubungan secara sistematis satu dengan lainnya.
- 4.5 **Badan penerima air** adalah wadah-wadah air alamiah atau buatan berupa laut, sungai, danau, kolam retensi, kolam detensi, kolam tandon, sumur resapan dan sarana resapan lainnya yang ramah lingkungan.
- 4.6 **Daerah genangan** adalah kawasan yang tergenang air akibat tidak berfungsinya sistem drainase yang mengganggu dan/atau merugikan aktifitas masyarakat.
- 4.7 **Kolam retensi** adalah prasarana drainase yang berfungsi menampung dan meresapkan air hujan disuatu wilayah.
- 4.8 **Kolam detensi** adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung sementara air hujan disuatu wilayah
- 4.9 **Kolam Tandon** adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk menampung air hujan agar dapat digunakan sebagi air baku.

- 4.10 **Sumur resapan** adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk meresapkan air hujan dari atap bangunan kedalam tanah melalui lubang resapan.
- 4.11 **Sistem Polder** adalah suatu sistem yang secara hidrolis terpisah dari sekelilngnya baik secara alamiah maupun buatan yang dilengkapi dengan tanggul dan sistem drainase internal, pompa dan/atau waduk serta pintu air.
- 4.12 **Saluran primer** adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran sekunder dan menyalurkannya ke badan penerima air
- 4.13 **Saluran sekunder** adalah saluran drainase yang menerima air dari saluran tersier dan menyalurkannya ke saluran primer
- 4.14 **Saluran tersier** adalah saluran yang menerima air dari sistem drainase lokal dan menyalurkannya ke saluran drainase sekunder

V. PERILAKU HIDUP BERSIH DAN SEHAT (PHBS) terkait sanitasi

- 5.1 **Cuci Tangan Pakai Sabun** adalah perilaku cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air bersih yang mengalir (*Pedoman STBM, 2008*)
- 5.2 PHBS singkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
- 5.3 Sanitasi total

Kondisi ketika suatu komunitas (Pedoman STBM, 2008):

- Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)
- Mencuci tangan pakai sabun
- Mengelola air minum dan makanan yang aman
- Mengelola sampah dengan benar
- Mengelola limbah cair rumah tangga dengan aman

Kata Pengantar

Glossary dan daftar singkatan sanitasi

Daftar isi

Pendahuluan

Bagian 1: Proses

- Proses-01: Persiapan
- Proses-02: Review SSK dan Penetapan Program Prioritas
- Proses-03: Konsolidasi Program
- Proses-04: Rencana Implementasi
- Proses-05: Finalisasi MPS
- Proses-06: Tindak Lanjut MPS

Bagian 2: Outline

- Outline Memorandum Program Sanitasi
- Template Dokumen Memorandum Program Sanitasi

Bagian 3: Petunjuk Teknis

- Petunjuk Teknis-01 : Review SSK dan Penetapan Prioritas
 Petunjuk Teknis-02 : Konsolidasi Program dan Anggaran
 Petunjuk Teknis-03 : Penyusunan Deskripsi Program
- Petunjuk Teknis-04 : Rencana Implementasi

Pendahuluan

Latar Belakang

Setelah menyelesaikan Buku Putih Sanitasi dan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota, selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi Kabupaten/Kota akan melanjutkan pada tahap untuk dapat melaksanakan seluruh strategi yang telah disepakati. Rangkaian proses dan tahapan yang diperlukan agar seluruh program dan kegiatan dapat direalisasikan dituangkan di dalam dokumen Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, baik terkait kepastian ketersediaan anggaran,



persiapan untuk tahap konstruksi ataupun repetisi tindak lanjut tahunan yang diperlukan.

Pedoman mengenai tata cara penyusunan MPS ini telah disusun sebelumnya oleh Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS) pada tahun 2010 di dalam sebuah dokumen yang disebut sebagai Manual Tahap D: Penyusunan Rencana Tindak Sanitasi dan dokumen Manual Memorandum Program Sanitasi Kabupaten / Kota (2011).

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota telah mengalami beberapa kali revisi, sesuai dengan dinamika perkembangan dan kebutuhan yang ada. Pedoman ini juga telah mengacu pada Surat Edaran Mendagri 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) didaerah dan Panduan Pelaksanaan Lokakarya Provinsi.

Penyempurnaan Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota ini juga berdasarkan umpan balik dari pelaksanaan PPSP sejak tahun 2010 yang mengindikasikan perlunya dokumen tambahan yang dapat digunakan oleh Pokja dan Fasilitator dalam rangka penyusunan MPS secara tuntas dan sederhana, disamping lebih memfokuskan pada "proses" supaya tercapainya kesepakatan program dan penganggaran, serta tindak lanjut yang perlu dilakukan apabila terjadi "funding qap".

Dokumen MPS merupakan saringan akhir agar semua Program dan Kegiatan yang akan diimplementasikan sudah dapat dipastikan ketersediaan pendanaannya serta memenuhi kaidah SMART (*Specific* – jelas, tidak mengundang interpretasi, *Measureable* – terukur, *Achieveable* – dapat dicapai, *Relevant* – informasi yang jelas bagi pengguna, *Timely* – tepat waktu).

2. Tujuan

Buku ini agar dijadikan pedoman bagi Kelompok Kerja (Pokja) Sanitasi di Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Tahap 4 Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) yaitu penyusunan Memorandum Program Sanitasi. Selain itu, Petunjuk ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman dan referensi bagi fasilitator dalam memfasilitasi Pokja dalam proses penyusunannya.

3. Kelengkapan Petunjuk Praktis

Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) ini disusun dengan struktur penulisan sebagai berikut:

Bagian 1: Proses

Berisi penjelasan <u>proses</u> dan <u>langkah-langkah penyusunan</u> MPS. Bagian ini dapat menjadi semacam "daftar centang" (*check-list*) bagi Pokja guna mengetahui kemajuan proses penyiapan MPS.

Bagian 2: Outline

Menjelaskan secara rinci <u>data dan informasi minimum</u> di dalam penyusunan MPS. Penjelasan rinci ini memberi acuan apa yang perlu dihasilkan/dituliskan berdasarkan proses yang telah dijalani untuk setiap Bab dan sub-bab di dalam dokumen MPS.

Bagian 3 : Petunjuk Teknis

Memberi penjelasan rinci mengenai tata cara pelaksanaan kegiatan atau analisis spesifik yang perlu dilakukan di dalam penyusunan MPS. Contoh: ceklist kriteria kesiapan, tatacara perhitungan volume dan biaya.

4. Pengguna

Pengguna Petunjuk Praktis ini di antaranya adalah

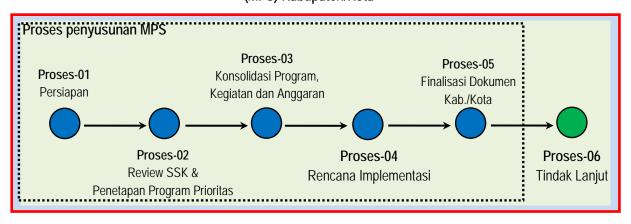
- Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota
- Pokja Sanitasi Provinsi
- PMU dan PIU PPSP
- Fasilitator, baik tingkat kabupaten/kota maupun provinsi
- Para penggiat sanitasi (lembaga donor, LSM, CSR Swasta, dll)

5. Ringkasan Proses Penyusunan MPS

Pedoman ini disusun dengan memadukan dua pendekatan yaitu pendekatan "proses" dan "produk". Oleh karena itu, di samping memberi pedoman tentang bagaimana mencapai hasil akhir dari proses, Pedoman ini juga mengindikasikan produk yang dihasilkan pada tiap-tiap proses.

Terdapat enam (6) proses di dalam penyusunan dokumen MPS yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1
Proses Penyusunan Memorandum Program Sanitasi
(MPS) Kabupaten/Kota

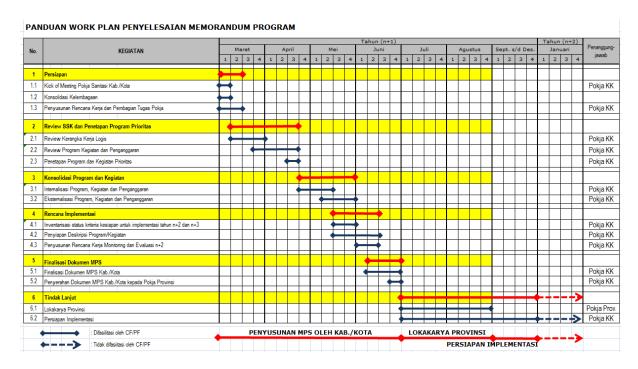


6. Jadwal Kegiatan

Penyusunan MPS dimulai pertengahan awal bulan Maret tahun n+1 dan direncanakan untuk dapat diselesaikan pada akhir bulan Juni Selesai di Kabupaten/Kota. Proses penyusunan MPS sepenuhnya berdasarkan pada data dan hasil analisis yang terdapat di dalam Buku Putih Sanitasi (BPS) dan Strategi Sanitasi Kota (SSK), dan oleh karenanya BPS dan SSK yang kualitas akan memudahkan proses penyusunan MPS.

Indikasi kebutuhan waktu dan jadwal penyelesaian penyusunan MPS ditampilkan dalam tabel berikut.

Gambar 2 Jadual Penyusunan Memorandum Program Sanitasi

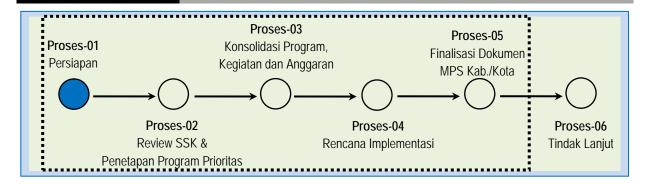


Pedoman Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) (MPS) Kabupaten/Kota

Bagian 1
Proses

Proses-01

Persiapan



Dokumen Referensi Terkait:

Pelaksana:

Lama Kegiatan:

- Surat Edaran Mendagri Po 660/4919/SJ

Pokja Kabupaten/Kota

2 minggu

Tujuan

- Mendapatkan kesepahaman dan kesamaan persepsi atas manfaat, proses dan produk MPS
- Menyusun Rencana Kerja, Pembagian Tugas dan tanggungjawab setiap anggota Pokja

Output

- Terselenggaranya Kick off Meeting
- Terbangunnya kesepahaman antar anggota Pokja tentang MPS
- Tersusunnya rencana kerja penyusunan MPS, pembagian tugas dan tanggungjawab setiap anggota Pokja Kab./Kota.

Penulisan dalam Dokumen MPS

Bab 1 : Pendahuluan

Deskripsi

Pertemuan perdana / kick off meeting merupakan titik awal dari proses penyusunan MPS oleh Pokja Kab./Kota

Penyamaan persepsi antar anggota Kelompok Kerja (Pokja) merupakan hal yang sangat penting agar masing-masing anggota Pokja yang berasal dari sejumlah dinas/instansi mempunyai kesamaan pemahaman atas proses penyusunan dan produk MPS, kontribusi dan tugas dari masing-masing anggota Pokja, serta jadual pelaksanaan pekerjaan.

Disamping itu Pokja harus menyepakati dan memahami bahwa MPS merupakan dokumen sumber dalam usulan pembangunan sanitasi dan harus dilakukan adopsi dan pengawalan kedalam mekanisme penganggaran reguler.

Langkah-Langkah Pelaksanaan

- 1. Sepakati dan Lakukan Pertemuan perdana (kick off meeting)
 - Pertemuan dihadiri oleh Ketua Pokja dan dihadiri oleh seluruh anggota Pokja Kab./Kota.
 - Undang perwakilan Pokja Provinsi untuk menghadiri pertemuan perdana ini.

- Perwakilan Pokja Provinsi menyampaikan arahan tentang program PPSP dan khususnya Penyusunan MPS.
- Ketua Pokja Kab./Kota diharapkan memberikan arahan kepada anggota Pokja Kab./Kota

2. Bangun kesepahaman tentang pentingnya dokumen MPS.

Untuk menumbuhkan kesepahaman dan kesamaan persepsi maka Ketua Pokja perlu mengadakan pertemuan yang melibatkan seluruh anggota Pokja Kab./Kota.

Agenda pertemuan membahas isu-isu sebagai berikut:

- a. Latar belakang, makna dan manfaat dari penyusunan dokumen MPS. Ketua Pokja atau anggota Pokja yang telah mengikuti pelatihan penyusunan MPS akan memaparkan tentang:
 - Makna dari dokumen MPS sebagai dasar dalam pengusulan kegiatan dalam mekanisme penganggaran.
 - Proses dan Produk dokumen MPS
 - Maksud dan Tujuan Penyusunan dokumen MPS.
- **b.** Pelajari dan diskusikan "Pedoman Penyusunan MPS" sebagai pedoman dalam penyusunan MPS. Didalam pedoman tersebut menjelaskan tentang:
 - Proses dan prosedur penyusunan MPS
 - Sistematika (outline) dokumen MPS
- c. Diskusikan dan Cermati mengenai Latar belakang, manfaat, maksud dan tujuan dari MPS sebagai masukan untuk penulisan Bab 1.

Penyusunan Strategi dan Rencana Kerja meliputi:

- a. Penyiapan strategi dan rencana kerja penyusunan MPS
- b. Penyepakatan Rencana Kerja Penyusunan MPS

3. Susun dan Sepakati Rencana Kerja Pokja

Pokja Kab./Kota harus menyusun dan menyepakati Rencana Kerja penyusunan dokumen MPS. Dalam menyusun rencana kerja ini Pokja Kab./Kota harus menyesuaikan dengan rencana kerja Pokja Provinsi dalam kaitannya dengan Lokakarya dan harus menyesuaikan dengan mekanisme penganggaran reguler agar hasil review program dan kegiatan dapat diusulkan melalui mekanisme penganggaran tahun (n+1).

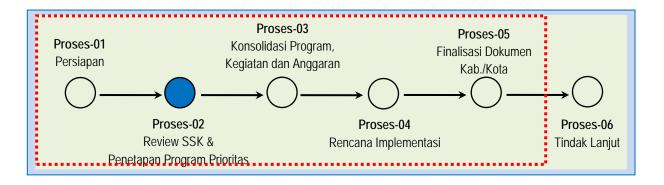
Rencana Kerja ini sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. Jadual kegiatan terperinci
- b. Pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing anggota Pokja (lihat SE Mendagri No. 660/4919/SJ. Tahun 2012).
- c. Alokasi Dana Operasional Penyusunan MPS.

Rencana Kerja ini harus ditandatangani oleh Ketua Pokja dan selanjutnya didistribusikan kepada seluruh anggota Pokja. Pasang atau tempelkan Rencana Kerja ini di ruang Sekretariat Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

Proses-02

Review SSK dan Penetapan Prioritas



Dokumen Referensi Terkait:

Pelaksana:

Lama Kegiatan:

- Pedoman Penyusunan SSK.

Pokja Kabupaten/Kota

6 minggu

- Dokumen BPS dan SSK
- Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi
- Petunjuk Teknis-01

Tujuan

- Review/Penelahan kembali BPS dan SSK yang meliputi:
 - a) Review Kerangka Kerja Logis
 - b) Review Program dan Kegiatan
 - c) Menetapkan Prioritas

Output

- Tersusunnya Bab 2
- Input untuk Bab 3 dan Bab 4
- Tersusunnya kembali Kerangka Kerja Logis yang merupakan alur pikir mulai dari Permasalahan Tujuan Sasaran – Strategi – Program – Kegiatan.
- Tersusunnya Program dan Kegiatan yang dapat menjawab permasalahan dan sasaran.
- Tersusunnya urutan prioritas pelaksanaan kegiatan

Penulisan dalam Dokumen MPS

Bab 2 : Prioritas Pembangunan Sanitasi Lampiran A : Kerangka Kerja Logis (KKL)

Lampiran B : Perhitungan Prioritas Pembangunan Sanitasi Lampiran C : Perhitungan Volume Kegiatan Infrastruktur

Deskripsi

Yang dimaksud dengan "Review" adalah melihat dan menelaah kembali dokumen Buku Putih dan SSK serta melakukan perbaikan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS).

Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS, bilamana dipandang perlu oleh Pokja Kab./Kota dapat melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam lagi maka Pokja harus membuat catatan-catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan-catatan tersebut harus dimasukkan kedalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya perubahan atau perbedaan yang ditulis didalam Buku Putih dan SSK dengan yang tertulis didalam MPS.

Langkah-Langkah Pelaksanaan

Review Kerangka Kerja Logis (KKL)

- 1. Telaah kembali dan sepakati Kerangka Kerja Logis (KKL) yang sudah disusun didalam SSK untuk dilakukan review.
- 2. Telaah Kembali dan Pahami Permasalahan Mendesak dan Area Beresiko Pahami kembali Buku Putih Sanitasi. Pemahaman ini terutama mengenai profil sanitasi (melalui peta sistem sanitasi/DSS), Permasalahan Mendesak di dalam Buku Putih Sanitasi, dan Area Berisiko Sanitasi yang terdapat di dalam Buku Putih Sanitasi.
 - Permasalahan mendesak harus dapat menggambarkan kondisi aktual permasalahan sanitasi saat ini.
- 3. Gunakan Tujuan dan Sasaran yang tercantum didalam SSK sebagai dasar untuk rencana pengembangan sanitasi

- <u>Tujuan</u>

Telaah kembali tujuan pengembangan sanitasi apakah tujuan sudah mempertimbangkan hasil Tahapan Pengembangan Sanitasi di dalam <u>Bab 2 SSK</u> (lihat milestone pertama proses penyusunan SSK). Bilamana belum mempertimbangkan tahapan pengembangan sanitasi maka lakukan review.

- Sasaran

Telaah kembali Sasaran yang sudah disusun didalam tabel kerangka kerja logis, apakah sasaran yang dituangkan sudah memperhatikan kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Realistic and Timebound) atau spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, realistis, dan berjangka waktu jelas. Bilamana belum memperhatikan kriteria SMART maka lakukan review.

Sasaran Pengembangan Sanitasi harus mengacu kepada Sasaran PPSP yang meliputi Penanganan Air Limbah Domestik, Persampahan Domestik dan Drainase Perkotaan.

- 4. Diskusikan dan review Strategi Pengembangan Sanitasi
 - Diskusikan dan review (bilamana dianggap perlu) Strategi untuk mencapai Tujuan dan Sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya. Gunakan hasil analisis SWOT sebagai dasar menyusun Strategi. Sebagai rujukan Lihat *Petunjuk Teknis-02*: Analisis SWOT di Bagian 3 Pedoman Proses dan Petunjuk Teknis Penyusunan SSK.
 - Satu strategi dapat dijabarkan menjadi beberapa Program dan setiap program dapat terdiri dari bberapa kegiatan.
- 5. Diskusikan dan Susun kembali program dan kegiatan Sanitasi
 Diskusikan dan review Program dan kegiatan yang disusun harus dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang ditetapkan. Sedangkan khusus untuk kegiatan maka tulis kegiatan yang utama saja.
- 6. Tuliskan kembali point 2 sampai point 5 diatas dalam tabel Kerangka Kerja Logis (KKL) dan masukkan dalam Lampiran.

Instrumen

Instrumen Kerangka Kerja Logis

Tabel Kerangka Logis

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
Praktek BABS saat ini 25 %	Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestik tahun 2018	Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 25 % menjadi 0% tahun 2018	limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Komunal	Pembangunan MCK++ Pembangunan Tangki septik Komunal Revitalisasi IPLT
			Meningkatkan Akses Sistem terpusat pada daerah CBD	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Kawasan
Dst					

Catatan:

Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Penetapan Program Prioritas

- 1. Telaah kembali prioritas program yang telah disusun didalam SSK
- 2. Diskusikan dan sepakati pembobotan untuk masing-masing indikator (tidak harus seperti contoh).
- 3. Masukkan kegiatan utama saja (pada kolom 1) untuk kegiatan infrastruktur (seperti: Pembangunan TPA, TPS 3R, IPLT dsb) dan non-infrastruktur yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan infrastruktur (seperti: penyusunan masterplan, penyusunan Perda, pengadaan alat angkut sampah, Program STBM dsb).
- 4. Hitung total skor dan urutkan program berdasarkan prioritas. Back up perhitungan harus dimasukkan dalam lampiran.
- Urutkan program/kegiatan yang mempunyai score tertinggi pada urutan teratas.
 Kegiatan pendukung dari kegiatan utama inftrastruktur secara otomatis memiliki prioritas yang sama dengan kegiatan utamanya.
- 6. Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan pendukungnya.
- 7. Lakukan prioritasi untuk Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
- 8. Lakukan pembahasan hasil prioritasi program ditingkat PokjaKab./Kota.
- 9. Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi dengan SKPD terkait)
- 10. Konsultasikan dan internalisasikan kepada Kepala SKPD terkait.

Instrumen

Instrumen Penetapan Prioritas Program

Dalam penetapan prioritas program, dapat digunakan tabel di bawah ini.

Contoh: Tabel Prioritas Program

		Score (dan bobot)					
	Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
		25%	25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan MCK++	2	4	4	3	3.30	1
2	Pembangunan MCK	1	4	4	4	3.15	1
3	Penyuluhan, Kampanye & Edukasi	2	2	3	3	3.10	1
4	Program Pembangunan IPAL Komunal	1	4	4	3	3.00	1
5	Pembangunan IPLT	2	3	3	1	2.95	2
6	Pembentukan Badan Pengelola IPLT	2	3	3	1	2.95	2
dst	dst						

Keterangan:

- (1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini.
- (2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:
 - Jumlah penerima manfaat (kolom 3)
 - Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 4)
 - Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 5)
 - Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin *pro-poor* (kolom 6)
- (3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut.
- (4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. Pembotan dapat ditentukan secara berbeda untuk masing-masing komponen.
- (5) Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas
- (6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 7).
- (7) Urutkan kegiatan yang memiliki score terbesar merupakan kegiatan yang paling prioritas (kolom 8)

Review Program, Kegiatan dan Penganggaran

Pahami dan Telaah kembali Strategi yang telah disusun sebelumnya

Sebelum memulai menyusun Program dan Kegiatan pengembangan sanitasi, Pokja perlu memahami kembali Strategi yang telah disusun.

Rumuskan kembali rangkaian tahapan Kegiatan untuk masing-masing Program pengembangan sanitasi

- Rumuskan rangkaian kegiatan untuk Program yang disusun. Perhatikan tahapan SIDLACOM untuk setiap rangkaian kegiatan (khususnya untuk kegiatan pengembangan infrastruktur). Susun juga indikator capaian (hasil atau outcome) untuk masing-masing kegiatan tersebut.
- Tetapkan urutan kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan tahapan SIDLACOM (Survey Investigation, Design, Land Acquisition, Construction, Operation and Maintenance).

- Pastikan bahwa kegiatan infrastruktur didukung oleh kegiatan non-fisik lainnya.
- Pastikan bahwa manfaat/outcome sudah realistis sesuai dengan kegiatan yang dilakukan.
- Pastikan satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan.
- Tentukan lokasi kegiatan pada area beresiko dan pilih teknologi yang sesuai.
- Review perhitungan volume kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan sasaran yang ditetapkan sampai dengan akhir perencanaan ini;
- Jabarkan hasil perhitungan volume kegiatan kedalam rencana implementasi;
- Urutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah urutan pelaksanaan kegiatan dan tidak saling mendahului; contoh: Studi dan desain dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi.
- Periksa ulang status usulan kegiatan yang telah disusun di atas apakah sudah dilakukan atau belum di tahun-tahun sebelumnya.
- Perbaharui daftar rangkaian kegiatan.
- Sinkronisasikan daftar kegiatan yang telah disusun dengan daftar kegiatan tahun n+1 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini (tahun n+1).

Diskusikan dan rumuskan kembali jadwal pelaksanaan, indikasi kebutuhan biaya, dan indikasi sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan

Selanjutnya, rumuskan jadwal pelaksanaan program dan kegiatan tersebut, hitung indikasi kebutuhan biaya, dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan.

- Estimasi biaya

- Pastikan bahwa Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini; bilamana ragu terhadap estimasi biaya maka lakukan konsultasi kepada pihak terkait seperti Kepala SKPD, Pokja Provinsi, Satker terkait atau gunakan "Buku Referensi Opsi Teknologi dan Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi" yang diterbitkan oleh TTPS atau sumber lain yang dapat dipercaya.
- Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai dengan "KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI" dari Kab./Kota;

- Sumber pendanaan dan/atau pembiayaan

Diskusikan dan tetapkan sumber pendanaan dan/atau pembiayaan untuk masing-masing kegiatan, apakah dapat didanai oleh APBD, APBD Provinsi, APBN, atau oleh sumber pendanaan lain.

Instrumen

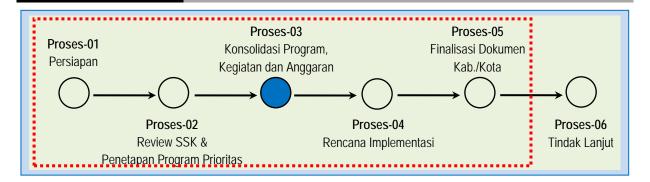
Instrumen SIDLACOM

Untuk mempermudah Pokja Kab./Kota dalam menyusun kegiatan "INFRASTRUKTUR" yang lengkap dan berurutan maka telah disiapkan "Daftar Indikasi Kegiatan Sanitasi Permukiman berdasarkan kaidah SIDLACOM". Kegiatan yang ada didalam daftar tersebut hanya merupakan kegiatan indikatif dan bersifat terbuka (dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah), sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi dari masing-masing Kab./Kota yang bersangkutan.

Hasil Review Program, Kegiatan dan Penganggaran sebagai input untuk Bab 3 dan Bab 4

Proses-03

Konsolidasi Program dan Kegiatan



Dokumen Referensi Terkait :Pelaksana :Lama Kegiatan :Petunjuk Teknis-02Pokja Kabupaten/Kota5 minggu

Petunjuk Teknis-03

Tujuan

- Perumusan Program, Kegiatan dan Penganggaran Sanitasi
- Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja Kab./Kota
- Kesepakatan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Kab./Kota
- Usulan program dan kegiatan sanitasi kepada sumber pendanaan lainnya.
- Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Output

- Tersedianya daftar program dan kegiatan final versi kab./kota yang berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, outcome, volume kegiatan beserta rencana implementasi (Bab 3)
- Terintenalisasinya Program, Kegiatan dan Penganggaran kepada SKPD terkait di Kab./Kota
- Disepakatinya program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Kab./Kota (Bab 4)
- Terpilahnya program dan kegiatan kepada sumber pendanaan lainnya.
- Teraksesnya Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

Penyajian dalam Dokumen MPS:

Bab 3 : Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi Bab 4 : Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi Lampiran D : Program dan Kegiatan Jangka Menengah

Lampiran E : Deskripsi Program

Deskripsi

Program, kegiatan dan Penganggaran telah disusun didalam dokumen SSK dan dilakukan review di MPS untuk memastikan bahwa progam dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume kegiatan dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang sudah ditetapkan didalam SSK.

Sesuai dengan undang-undang maka Sanitasi merupakan urusan wajib daerah sehingga prioritas utama pendanaan sanitasi adalah APBD Kabupaten/Kota, bila APBD Kab./Kota tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah APBD Provinsi sesuai dengan Tupoksinya, bila Kabupaten/Kota dan Provinsi tidak mampu maka prioritas berikutnya adalah bantuan dari Pusat. Namun demikian tidak menutup kemungkinan bantuan atau parisipasi dari pihak-pihak lain seperti dari CSR, Swasta, BUMN, LSM dsb. Untuk rencana implementasi dari program dan kegiatan dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan baik pemerintah (APBD Kab./Kota, APBD Prov. dan APBN (Murni dan PHLN) maupun non-pemerintah. Sedangkan untuk mendapatkan dukungan dari stakesholder terkait Program, kegiatan dan penganggaran dari pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan Internalisasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota. Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya "gap" pendanaan yang harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumber-sumber non-pemerintah untuk menutup "funding gap" tersebut agar target dan sasaran pengembangan/pelayanan sanitasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah.

Langkah-langkah pelaksanaan

1. Diskusikan dan sepakati program dan kegiatan sanitasi

Gunakan tabel program dan kegiatan dari hasil review program dan kegiatan sebagai dasar untuk didiskusikan.

Diskusikan dan sepakati rencana pendanaan sanitasi

- Diskusikan dan sepakati rencana pendanaan sanitasi
- Pisahkan kegiatan dan volume kegiatan yang akan didanai dari sumber-sumber pendanaan APBD Kab./Kota, APBD Prov., APBN, Swasta/CSR dan Masyarakat.
- Pisahkan program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan sumber pendanaan yang diharapkan yaitu APBD Kab./Kota, APBD Prov, APBN, Swasta/CSR dan Masyarakat.
- Gunakan Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Santasi sebagai referensi/rujukan dan untuk sumber pendanaan dari PPLP maka gunakan Lampiran-2: kriteria kegiatan yang dapat dianggarkan dari PPLP sebagai referensi.
- Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai dengan "KEMAMPUAN DAN RENCANA PENDANAAN SANITASI" dari Kab./Kota, bilamana kebutuhan pendanaan melebihi dari kemampuan pendanaan Kab./Kota maka masukkan kedalam "Daftar Tunggu"
- Lakukan konsultasi kepada kepala SKPD terkait Kab./Kota.
- Buat daftar hadir dan notulen hasil konsultasi.
- Akomodir seluruh hasil konsultasi tersebut kedalam tabel program, kegiatan dan pendanaan;
- Lakukan perbaikan dari hasil konsultasi dengan kepala SKPD terkait.

Konsultasikan dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait

- Inisiasi konsultasi kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait adalah inisiasi dari Pokja Kab./Kota sebelum Pelaksanaan Lokakarya.
- Selesaikan Bab 1 dan Bab 2. Lakukan "Self Assessment" Bab 1 dan Bab 2, pastikan nilai QA sudah mencapai nilai kelulusan.
- Konsultasikan hasil langkah 1 dan 2 diatas khusus untuk sumber pendanaan APBD Prov. dan APBN kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait.
- Buat absensi dan notulen hasil konsultasi.
- Lakukan perbaikan dari hasil konsultasi awal tersebut.
- Susun dan selesaikan Bab 3 dan Bab 4

Lakukan proses internalisasi kepada SKPD di kab./kota

Proses internalisasi bertujuan agar:

- (a) Tersosialisasinya program, kegiatan dan anggaran sasitasi kepada stakesholder terkait di tataran Kab./Kota
- (b) Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan.
- (c) Dukungan dari pemerintah Kab./Kota untuk meng-alokasikan anggarannya untuk program-program sanitasi.

Langkah-langkah Internalisasi:

- Diskusikan dan sepakati hasil konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait dengan seluruh Pokja Kab./Kota dan konsultasikan kepada Ketua Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.
- Lakukan konsultasi teknis tingkat Kab./Kota yang harus dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD terkait dan undang DPRD Kab./Kota.
- Finalkan hasil konsultasi teknis tersebut.
- Lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan ini sudah teradopsi dalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran.

2. Lakukan akses sumber pendanaan Hibah/Pinjaman

- Kumpulkan data dan informasi tentang Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi.
- Buatlah daftar sumber-sumber pendanaan potensial pada point (a) tersebut diatas termasuk potensi kegiatan yang akan didanai.
- Kumpulkan dan pelajari pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan, persyaratan dan criteria setiap sumber pendanaan dari Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi. Ada beberapa donor yang dapat diakses antara lain: IndII (AusAid), Word Bank, USAid, Islamic Development Bank dsb.
- Penuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dari sumber pendanaan tersebut
- Ikuti workshop atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan berkaiatn dengan akses sumber pendanaan tersebut.

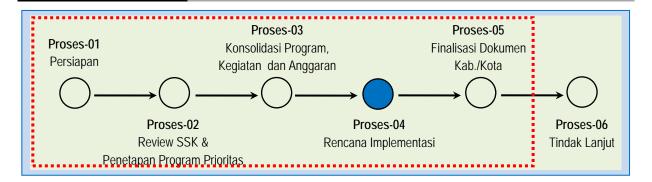
3. Lakukan akses sumber pendanaan non-pemerintah

- Kumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan swasta yang ada didaerah baik ditingkat Kab./Kota maupun ditingkat Provinsi dan Pusat;
- Buatlah daftar tentang perusahaan swasta, BUMN dan perusahaan lain yang memiliki potensi untuk memberikan bantuan/pendanaan (CSR) sektor sanitasi.
- Lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan dalam workshop berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana pengembangan dan pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung oleh peserta workshop.
- Buatlah proposal pendanaan sector sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor lainnya;
- Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang pengembangan sanitasi serta tawarkan beberapa proposal;
- Ikuti forum-forum CSR Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi pendanaan non-pemerintah dalam pengembangan sanitasi.

- Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi untuk pendanaan sanitasi;
- Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses pendanaan selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
- Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta Lembaga donor tersebut;
- Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan CSR dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola (KSM) dsb.

Proses-04

Rencana Implementasi



Dokumen Referensi Terkait :Pelaksana :Lama Kegiatan :Petunjuk Teknis-04Pokja Kabupaten/Kota4 minggu

Tujuan

- Pemeriksaan status kriteria kesiapan implementasi untuk masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3
- Inventarisasi langkah dan tindak-lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap
- Menyusun rencana kerja monitoring dan evaluasi tahunan.

Output

- Tersusunya Status kesiapan pelaksanaan masing-masing kegiatan tahun n+2 dan n+3
- Tersusunya Langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum siap
- Tersusunya rencana kerja monitoring dan Evaluasi tahunan

Penyajian dalam Dokumen MPS:

Bab 5 : Rencana Implementasi

Deskripsi

Setelah materi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sanitasi disepakati bersama, langkah selanjutnya adalah:

- a. Memeriksa Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran yaitu persyaratan-persyaratan atau langkahlangkah yang harus dilakukan dalam mekanisme Penganggaran.
- b. Memeriksa kesiapan pelaksanaan sesuai dengan kriteria (readiness criteria) yang telah ditetapkan.

Pemeriksaan "kesiapan" ini untuk memastikan rencana kegiatan dapat dilaksanakan tepat pada waktunya, di lokasi yang tepat, oleh dinas/instansi yang telah siap. Selain itu kepastian paska-konstruksi juga harus dipersiapkan seperti organisasi pengelola, serah-terima aset, dan biaya O&M.

Langkah-langkah Pelaksanaan

- 1. Lakukan identifikasi status kegiatan dalam mekanisme penganggaran untuk implementasi tahun (n+2) dan tahun (n+3)
 - Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan tahun (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN MEKANISME PENGANGGARAN.
 - Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut.

- Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran.
- Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran.
- 2. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi tahun (n+2) dan tahun (n+3)
 - Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan tahun (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR.
 - Lakukan Identifikasi lokasi dan pastikan bahwa lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan siap untuk diimplementasi pada tahun (n+2) dan tahun (n+3). Lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) untuk memastikan kesiapan terhadap lokasi.
 - Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait untuk mengetahui status dari kriteria kesiapan yang digunakan sebagai persyaratan untuk implementasi.
 - Kumpulkan data-data dan hasil studi yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk implementasi, seperti: Dokumen Masterplan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, Sertifikat Kepemilikan Lahan dsb.
 - Pastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan kesumber dana APBN khususnya Kementerian
 Pekerjaan Umum sudah masuk kedalam review RPIJM, sudah ada surat minat dan surat kesediaan menerima aset dan kesanggupan untuk melakukan Operasi dan Pemeliharaan.
 - Tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut dan tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan implementasi infrastruktur.
- 3. Lakukan identifikasi status kesiapan ToR untuk pekerjaan Studi dan Desain
 - Kumpulkan seluruh kegiatan studi dan desain yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN STUDI DAN DESAIN.
 - Isikan rencana tahun implementasi untuk masing-masing kegiatan studi dan desain (khusus untuk pelaksanaan/implementasi tahun (n+2) dan (n+3)
 - Isikan lokasi kegiatan dan tentukan rencana pelaksana dari studi dan desain tsb (Individual Konsultan, Konsultan, Swakelola dsb.)
 - Isikan status ToR/KAK yang diperlukan untuk proses tender, gunakan deskripsi program untuk menyusun ToR/KAK.
 - Tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan studi dan desain.
- 4. Lakukan identifikasi kesiapan lahan dan permasalahan
 - Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, dimana pembebasan lahan akan dilakukan pada tahun (n+2) dan (n+3) kedalam tabel PENYELESAIAN PEMBEBASAN LAHAN.
 - Sebutkan lokasi kegiatan, luas yang diperlukan/dibebaskan dan fungsi lahan yang akan dibebaskan dan lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan)
 - Sebutkan kendala dan permasalahan dari lahan yang akan dibebaskan sebagi dasar untuk mengambil langkah/kebijakan dalam menangani kendala dan permasalahannya.
 - Berikan rekomendasi penanganan terhadap kendala atau permasalahan tersebut sebagai tindak lanjut untuk penyelesaian dan tentukan SKPD penanggungjawab untuk menangani permasalah pembebasan lahan.
- 5. Lakukan Identifikasi Kesiapan Organisasi Pengelola
 - Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur pada tahun (n+2) dan (n+3) yang memerlukan lembaga pengelola dan masukkan kedalam tabel PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGUATAN ORGANISASI PENGELOLA.

- Sebutkan lokasi kegiatan dan instansi pengelola saat ini serta sebutkan kondisi atau kendala dari pengelolaannya.
- Berikan keterangan atau rekomendasi seperlunya tentang kondisi atau kendala dari pengelolaannya.

6. Susun Rencana Money

- Susun dan sepakati Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi tahun (n+2)
- Sepakati penanggungjawab dar masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring. Gunakan SE Mendagri No. 660/4919/SJ Tahun 2012 sebagai rujukan.
- Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi meliputi:
 - (a). Rapat Rutin Koordinasi membahas tentang:
 - progres masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring
 - permasalahan-permasalahan yang dihadapi
 - rekomendasi dan tindak lanjut
 - (b). Pengawalan Penganggaran yang meliputi:
 - Proses Musrembang dari Musrembang Desa sampai Musrembang Nasional.
 - Review RPIJM
 - Renja SKPD
 - RKA
 - DPA
 - dst.....
 - (c). Penyiapan Readiness Criteria
 - (d). Solusi Funding Gap
 - (e). Rencana Updating MPS-Tahunan
 - (f). Monitoring Pelaksanaan Implementasi Kegiatan tahun (n+2).
 - (g). Dst.....

7. Adopsi kedalam Perencanaan dan Penganggaran

- 7.1 Adopsi Program dan Kegiatan kepada dokumen perencanaan daerah
 - (1). Bagi Kabupaten/Kota dengan memiliki Kepala Pemerintahan yang baru Berikan advokasi kepada tim penyusun dokumen Rencana Jangka Menengah Kabupaten/Kota agar Dokumen PPSP (BPS, SSK dan MPS) dapat diadopsi kedalam Dokumen Kabupaten/Kota seperti Penyusunan RPJMD, RPIJMD, Renstra SKPD dsb.
 - (2). Bagi Kabupaten/Kota dengan Kepala Pemerintahan yang lama (sudah memiliki dokumen Rencana Strategi Jangka Menengah), sehingga adopsi yang memungkinkan adalah di dalam rencana tahunan.
 - Berikan advokasi kepada kepala SKPD terkait secara terus menerus agar program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS dapat adopsi kedalam Renja SKPD. Revisi RPIJMD Tahunan dan RKP Daerah.
 - (3). Perencanaan Umum Daerah
 - Jadikan Dokumen PPSP menjadi rujukan utama dalam penyususunan dokumen perencanaan umum daerah sector sanitasi. Perencanaan umum daerah dapat berupa: Masterplan, Outline Plan, RTRW, RDTRK dan Dokumen Manajemen Pengelolaan Sanitasi (Sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan dan sub-sektor drainase).

- Dari hasil perencanaan umum tersebut khususnya Manajemen Pengelolaan Sanitasi melalui studi yang mendalam akan memberikan gambaran secara mendetail hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam dokumen MPS.
- Apabila terjadi perbedaan –perbedaan antara dokumen MPS dengan dokumen perencanaan tersebut maka perlu dilakukan review terhadap dokumen MPS, menyesuaikan dengan dokumen perencanaandaerah tersebut.

8. Adopsi kedalam Mekanisme Penganggaran Reguler

Memorandum Program Sanitasi (MPS) tidak akan bermanfaat jika program dan kegiatan yang sudah disusun tidak teradopsi kedalam mekanisme Penganggaran.

Pokja Sanitasi harus mengetahui dan mengikuti proses penganggaran regular agar mengetahui waktu-waktu kritis yang dapat diintervensi sehingga program dan kegiatan didalam MPS dapat diadopsi kedalam mekanisme penganggaran reguler.

- Pelajari mekanisme penganggaran yang ada didaerah maupun dipusat baik dari segi proses maupun waktunya
- Gunakan dokumen PPSP sebagai bahan Advokasi kepada TAPD agar sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
- Advokasi atau dorong kepala SKPD untuk memasukkan usulan program dan kegiatan MPS kedalam Renja SKPD.
- Lakukan Advokasi dan komunikasi kepada TAPD agar usulan program dan kegiatan MPS masuk kedalam Renja Pemerintah Daerah dan selanjutnya menjadi Rancangan KUA & PPAS.
- Siapkan Rangkuman eksekutif (BPS, SSK, MPS)dan Profil Program Sanitasi sebagai bahan advokasi kepada DPRD agar Rancangan KUA & PPAS menjadi KUA & PPAS dan akhirnya menjadi RKA SKPD.
- Lakukan Pengawalan terus sehingga menjadi DPA SKPD.

Proses-05 Finalisasi Dokumen Proses-03 Proses-05 Proses-01 Konsolidasi Program, Finalisasi Dokumen Persiapan Kegiatan dan Anggaran Kab./Kota Proses-02 Proses-04 Review SSK & Rencana Implementasi Tindak Lanjut Penetapan Program Prioritas

Dokumen Referensi Terkait :Pelaksana :Lama Kegiatan :Petunjuk Teknis MPS-02Pokja Kabupaten/Kota3 minggu

Tujuan

- Finalisasi Dokumen Memorandum Program Sanitasi versi Kab./Kota
- Memastikan Dokumen MPS telah memenuhi persyaratan penjaminan kualitas (QA)

Output

- Tersusunnya final dokumen MPS versi Kab./Kota
- Hasil penilaian (QA), memenuhi passing grade atau batas kelulusan
- Penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi

Deskripsi

Finalisasi MPS merupakan proses terakhir dari seluruh rangkaian penyusunan Memorandum Program sebelum pelaksanaa. Hasil akhir dari proses ini adalah disahkannya MPS oleh Kepala Daerah. Penyempurnaan MPS terutama untuk menampung masukan, saran dan koreksi yang diperoleh dari rapat Konsultasi Teknis.

Bagian terpenting dari milestone ini adalah membangun pemahaman dan persepsi yang sama di lingkungan internal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tentang dokumen MPS yang telah disusun, terutama terkait dengan Prioritas Pembangunan Sanitasi, Rencana Kegiatan Sanitasi, Rencana Anggaran Sanitasi, dan Rencana Implementasinya. Hal ini untuk memastikan bahwa dokumen MPS yang telah disusun dan disepakati bersama ini dapat dimanfaatkan dan dilaksanakan sebaik mungkin dan memberikan hasil yang optimal.

Setelah dokumen MPS diselesaikan oleh Pokja Kabupaten/Kota dan diserahkan kepada Pokja Provinsi maka tugas Pokja Kabupaten/Kota bersama-sama SKPD terkait di Kab./Kota untuk memenuhi kriteria kesiapan implementasi.

Langkah-langkah Pelaksanaan

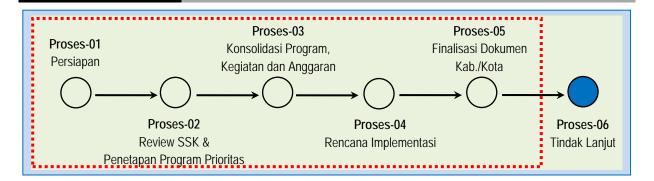
- 1. Cetak dan gandakan draft dokumen MPS serta bagikan kepada semua bidang untuk dipelajari dan diberikan masukan.
- 2. Periksa kembali draft dokumen MPS, bab per bab dan lampiran-lampirannya.
 - Pastikan bahwa isi dari dokumen MPS telah lengkap dan benar.
 - Pastikan bahwa semua anggota Pokja telah membaca dan memahami draft dokumen MPS.
- 3. Susun ringkasan (executive summary) MPS.

Pokja perlu menulis versi ringkas MPS untuk kepentingan advokasi dan komunikasi, khususnya bagi kelompok sasaran atau pemangku kepentingan eksternal. Karena itu, pastikan bahasa yang dipakai adalah bahasa yang populer agar lebih mudah dan cepat dipahami. Berikut adalah beberapa kegiatan yang disarankan:

- Sepakati informasi yang perlu dituangkan dalam ringkasan MPS. Informasi minimal yang harus tersedia adalah (i) kondisi existing (ii) sasaran pembangunan sanitasi Kabupaten/Kota (ii) ringkasan program dan kegiatan utama (iii) ringkasan program dan kegiatan utama, (iv) ringkasan kesepakatan pendanaan per sumber, funding gap dan total kebutuhan pendanaan sanitasi Kab./Kota.
- Tulis dengan bahasa populer yang mudah dipahami khalayak awam, rancang tata letak (*layout*), kurangi teks, perbanyak diagram, peta, dan tabel.
- 4. Konsultasikan draft dokumen MPS dengan Ketua Pokja.
 - Susun agenda pertemuan dan tentukan penanggung jawab (biasanya tim penulis) presentasi.
 - Siapkan dokumen yang diperlukan: (i) draft MPS (ii) Ringkasan MPS, dan (iii) slide presentasi. Pastikan seluruh Ketua dan Wakil Ketua Bidang menerima draf dan ringkasan MPS satu pekan sebelum pelaksanaan Rapat Konsultasi.
 - Paparkan bahan presentasi yang sudah disiapkan dalam Rapat Konsultasi. Pastikan bahan tersebut diungkapkan dengan jelas, ringkas, dan hanya menyangkut substansi yang penting saja. Catat masukan dengan seksama.
- 5. Finalisasi dokumen MPS versi Kabupaten Kota
 - Berdasarkan masukan dari hasil konsultasi tersebut maka perbaiki draf MPS. Perbaiki pula ringkasan MPS jika memang diperlukan. Sesudahnya, cetak dan perbanyak dokumen-dokumen tersebut dan bagikan kembali kepada seluruh Bidang Pokja.
 - Lakukan Penilaian Mandiri atau *"Self Assessment"* terhadap dokumen MPS versi Kab./Kota dan pastikan hasil penilaian telah melampui *"passing grade"* kelulusan.
 - Upload dokumen MPS kedalam Nawasis.
- 6. Penyerahan Dokumen MPS kepada Pokja Provinsi untuk keperluan Lokakarya
 - Buat surat pengantar penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Povinsi yang ditandatangai oleh Ketua Pokja Kabupaten/Kota.
 - Serahkan sebanyak 6 (enam) ganda kepada Pokia Provinsi bersamaan dengan surat pengantarnya.
 - "Panduan Lokakarya" disusun terpisah dari "Pedoman Proses dan Petunjuk Teknis Penyusunan MPS" ini
 - Pantau dan kawal proses Lokakarya, hadiri undangan Lokakarya yang diselenggarakan oleh Pokja Provinsi.

Proses-06

Tindak Lanjut



Dokumen Referensi Terkait : Pelaksana : Lama Kegiatan :

Panduan pelaksanaan Lokakarya Pokja Kabupaten/Kota 2 bulan

Tujuan

- Lokakarya Provinsi yang diselenggarakan oleh Pokja Provinsi
- Persiapan Implementasi

Output

- Ter-ikutinya Proses Lokakarya Provinsi yang diselenggarakan oleh Pokja Provinsi
- Teradopsinya program dan kegiatan tahun n+2 dan n+3 kedalam mekanisme penganggaran
- Terpenuhinya kriteria kesiapan untuk rencana implementasi tahun n+2
- Updating MPS-Tahunan mulai tahun n+2.

Deskripsi

Dokumen MPS yang diserahkan kepada Pokja Provinsi masih merupakan produk kabupaten/kota yang masih terfokus kepada sumber pendanaan dari kab./kota walaupun sudah dilakukan konsultasi teknik kepada Pokja Provinsi maupun Satker terkait. Untuk mendapatkan kesepakatan pendanaan dari semua pihak masih diperlukan proses Lokakarya.

Khusus untuk kegiatan yang bersumber dari pendanaan pemerintah harus melalui mekanisme penganggaran baik melalui mekanisme Musrembang maupun mekanisme Konreg. Sedangkan untuk sumber pendanaan lainya seperti dari donor, pinjaman atau yang lainnya harus mengikuti mekanisme yang ditetapkan dari Bappenas atau pemberi donor.

Setelah program, kegiatan dan penganggaran sudah tercatat didalam mekanisme penganggaran, khususnya untuk kegiatan infrastruktur masih diperlukan pemenuhan "krteria kesiapan" agar kegiatan tersebut dapat diimplementasikan.

Walaupun sudah dilakukan kesepakatan namun tidak menutup kemungkinan adanya perubahan atau penyesuaian. Beberapa perubahan atau penyesuaian dapat disebabkan karena:

- Tidak semua Program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun lalu dapat di-implementasikan karena keterbatasan anggaran, tidak ada kesiapan masyarakat, tidak ada kesiapan studi dan design dan tidak ada kesiapan lahan.
- Adanya beberapa perubahan kebijakan sehingga beberapa kegiatan harus tertunda.
- Perubahan indikasi biaya akibat dari hasil detail desain, inflasi, penyesuaian harga dsb.

- Adanya perubahan lokasi dan volume karena telah tersusunnya Masterplan, DED dan perencanaan yang lebih mendetail lainnya.
- Adanya sumber-sumber pendanaan alternatif yang bersepakat akan ber-kontribusi terhadap pembangunan sanitasi didaerah.
- Dsb.

Langkah-langkah Pelaksanaan

A. Lokakarya Provinsi

- Ikuti proses lokakarya (lihat Buku Panduan Lokakarya)
 Setelah penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi maka lakukan pemantauan dan komunikasi dengan Pokja Provinsi berkaitan dengan proses Lokakarya.
- 2. Susun kembali Final Dokumen MPS setelah melalui proses "Lokakarya"
 - Masukkan surat kesepakatan yang sudah ditandatangani oleh sumber-sumber pendanaan yang bersepakat untuk membantu pengembangan sanitasi di Kab./Kota.

B. Pemenuhan Readiness Criteria dan Pengawalan Penganggaran

Bersamaan dengan proses lokakarya maka Pokja Kabupaten/Kota mendorong Pemerintah Kabupaten/Kota untuk memenuhan Readiness Kriteria dan Pengawalan Penganggaran kedalam mekanisme penganggaran reguler.

Setelah penyerahan dokumen MPS kepada Pokja Provinsi maka Pokja Kab./Kota mempersiapkan pemenuhan kriteria kesiapan dan pengawalan penganggaran.

- Lihat dan telaah kembali kriteria kesiapan yang disusun dalam Bab 5 dokumen MPS, cermati kembali kegiatan-kegiatan yang perlu melengkapi kriteria kesiapan.
- Lakukan Rapat koordinasi untuk membahas strategi pengawalan penganggaran dan pemenuhan kriteria kesiapan implementasi tahun n+2 dan n+3.
- Implementasi kegiatan tahun n+2, harus sudah melengkapi kriteria kesiapan paling lambat pada bulan Agustus tahun n+1
- Implementasi kegiatan tahun n+3, harus sudah diusulkan awal tahun n+2 dan pemenuhan kriteria kesiapan paling lambat pada bulan Agustus tahun n+2.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam pemenuhan kriteria kesiapan implementasi tahun depan dan dua tahun yang akan datang adalah:

- Lihat kembali Bab V. khususnya pada tabel kriteria kesiapan, pelajari kegiatan yang perlu dilengkapi kriteria kesiapannya untuk dapat diimplementasikan tahun depan (tahun n+2).
- Lakukan Advokasi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota atau Kepala SKPD terkait untuk memenuhi kriteria kesiapan pada tahun ini agar dapat diimplementasikan tahun depan dan persiapkan usulan kegiatan tahun depan dalam rangka pemenuhan "readiness criteria" untuk implementasi dua tahun yang akan datang (n+3).
- Pastikan bahwa kriteria kesiapan infrastruktur telah terpenuhi sebelum akhir bulan September sebelum tahun pelaksanaan impementasi infrastruktur khususnya infrastruktur yang diharapkan dari sumber pendanaan dari APBN.

B. Adopsi Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses adopsi program dan kegiatan kedalam mekanisme penganggaran adalah:

- Kumpulkan program, kegiatan dan penganggaran yang akan diusulkan melalui mekanime penganggaran tahun depan dan untuk implementasi 2 tahun mendatang.
- Serahkan usulan program, kegiatan dan penganggaran tersebut diatas kepada Kepala SKPD terkait agar dapat dimasukkan kedalam Renja SKPD.
- Bersama-sama dengan SKPD terkait, lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan tersebut sudah teradopsi kedalam mekanisme penganggran. Pengawalan dilakukan mulai dari penyusunan Renja SKPD sampai menjadi DPA dan akhirnya menjadi APBD atau APBN.

C. Up-dating MPS-Tahunan

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam Up-dating tahunan yang akan dilakukan oleh Pokja Kabupaten/Kota yang dimulai tahun depan dan akan dilanjutkan setiap tahun adalah sebagai berikut:

Updating Program dan Kegiatan

- 1. Buatlah daftar kegiatan-kegiatan sanitasi yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota tahun lalu, baik yang bersumber dari APBD Kab./Kota, APBD Provinsi, APBN maupun dari sumber-sumber pendanaan lainnya. Bilamana perlu lakukan komunikasi dengan Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait untuk mengetahui secara pasti kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Provinsi dan Satker K/L terkait.
- 2. Berdasarkan point 1 diatas maka lakukan updating program dan kegiatan yang diperlukan dengan tetap mengacu kepada program kegiatan dan kerangka kerja logis (KKL) yang sudah disusun sebelumnya didalam MPS.

Tatacara melakukan updating program dan kegiatan adalah:

- (a). Lakukan penjadualan ulang terhadap kegiatan yang tidak dapat diimplementasikan tahun lalu.
- (b). Lakukan penjadualan ulang untuk kegiatan-kegiatan yang terpengaruh akibat point (a).
- (c). Lakukan penjadualan ulang untuk kegiatan-kegiatan yang dapat dimajukan karena kesiapan pendanaan, lahan, kebutuhan atau adanya kebijakan percepatan terhadap kegiatan tertentu.
- (d). Telaah kembali terhadap harga satuan kegiatan dan total biaya, apakah masih relevan. Bilamana sudah diperoleh perhitungan biaya yang lebih detail misalnya sudah ada DED maka masukkan biaya dari perhitungan DED.
- (e). Lakukan kajian dan evaluasi terhadap kegiatan yang muncul belakangan (emerging activities), apakah kegiatan tersebut relevan untuk dimasukkan updating MPS atau tidak relevan?.
- (f). Lakukan konsultasi kepada kepala SKPD Kab./Kota terkait terhadap program dan kegiatan yang akan didanai dari sumber APBD Kab./Kota.
- 3. Dengan berbekal hasil updating program dan kegiatan pada point (2), maka lakukan koordinasi/ konsultasi kepada Pokja Sanitasi Provinsi dan Satket K/L terkait.
- Sepakati hasil updating Program dan Kegiatan dengan menandatangani pada lembar updating program dan kegiatan tahunan dalam forum lokakarya atau forum lainnya yang disepakati.

Updating Rencana Implementasi

- 1. Indentifikasikan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun depan dan satu tahun yang akan datang. Misanya tahun (n+3) dan (n+4) atau tahun (n+4) dan (n+5).
- 2. Gunakan "Pedoman Penyusunan MPS" buku ini pada:
 - (a). Bagian 1: Proses, Proses-4: Rencana Implementasi;
 - (b). Bagian 2: Outline, Outline Bab-5: Rencana Implementasi;
 - (c). Bagian 3: Petunjuk Teknis, Petunjuk Teknis 03: Rencana Implementasi. sebagai dasar dalam menyusun updating rencana implementasi tahunan dan pengawalan program dan kegiatan dalam mekansme penganggaran.

Pedoman Proses dan Petunjuk Teknis Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota

Bagian 2 Outline

Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)

Tahun



MEMORANDUM PROGRAM SANITASI KABUPATEN / KOTA (MPS)

Kabupaten / Kota

(bagian ini dapat diisi foto atau gambar)

Kata Pengantar

 Kata Pengantar memberikan penjelasan ringkas atas isi, makna, dan manfaat MPS. Kata pengantar disusu setelah semua materi dan isi MPS diselesaikan. Bagian ini juga memuat harapan dan arahan Bupati/Walikota sebagai pemegang kebijakan tentang pembangunan sanitasi dalam jangka menengah. Perlu disebutkan juga komitmen Bupati/Walikota untuk mendukung implementasi dari kesepakatan yang telah disusun di dalam MPS dengan jalan memasukkan/mengintegrasikan hasil dari MPS dalam proses pemograman dan penganggaran reguler di Pemerintah Daerah. Kata Pengantar ditandatangani Bupati/Walikota. 	ın
 Hapus seluruh teks ini pada saat Kata Pengantar siap disusun 	
, (tanggal)	
Bupati / Walikota	

Surat Kesepakatan

	Ruatlah Kasanakan Drogram, kagistan dan panganggaran dari Sumbar ADDD Vah Wata, ADDD Pravinsi
-	Buatlah Kesepakan Program, kegiatan dan penganggaran dari Sumber APBD Kab./Kota, APBD Provinsi,
	APBN dan sumber-sumber lainnya.
•	Perhatikan SE Mendagri 660/4919/SJ, Tahun 2012 dan Panduan Tatacara Pelaksanaan Lokakarya sebagai
	rujukan.
	•
_	Hanva advente taka ini mada asat Dimeksasan Eksakustif avdah salassi disionkan
•	<u>Hapus</u> seluruh teks ini pada saat Ringkasan Eksekutif sudah selesai disiapkan

Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

- Ringkasan eksekutif berisi penjelasan ringkas mengenai isi dari MPS (pada umumnya tidak lebih dari 3 halaman).
- Hal-hal pokok minimum yang perlu dimuat di dalam ringkasan eksekutif ini adalah:
 - Kondisi eksisting sanitasi kabupaten/kota
 - Rencana pengembangan sanitasi kabupaten/kota
 - Ringkasan kebutuhan biaya untuk pengembangan sanitasi kabupaten/kota
 - Kesepakatan yang telah/akan dicapai dalam rangka pendanaan sanitasi dari berbagai sumber pendanaan
 - Kebutuhan biaya yang harus dicarikan sumber pendanaan karena belum ada kesepakatan
 - Ringkasan kegiatan yang akan diimplementasikan pada tahun n+2 dan n+3 yang masih harus dilengkapi dengan kriteria kesiapan.
 - Ringkasan rencana monitoring dan evaluasi.
- Gunakan bahasa yang populer dan mudah dipahami oleh masyarakat awam.

7 31 1
<u>Hapus</u> seluruh teks ini pada saat Ringkasan Eksekutif sudah selesai disiapkan

OUTLINE MPS

RINGKASAN EKSEKUTIF KATA PENGANTAR SURAT KESEPAKATAN DAFTAR ISI DAFTAR TABEL DAFTAR GAMBAR

Bab 1 Pendahuluan

1.1	Latar Belakang
1.2	Maksud dan Tujuan
1.3	Wilayah Perencanaan
1.4	Metodologi

Bab 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan Sanitasi

2.1	Profil Kabupaten/Kota
2.1.1	Kependudukan
212	Area Beresiko

- 2.1.3 Keuangan Daerah
- 2.2 Air Limbah
- 2.2.1 Permasalahan Air Limbah
- 2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah
- 2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah

2.3 Persampahan

- 2.2.1 Permasalahan Persampahan
- 2.2.2 Sasaran Pembangunan Persampahan
- 2.2.3 Prioritas Pembangunan Persampahan

2.4 Drainase

- 2.4.1 Permasalahan Drainase
- 2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase
- 2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase

2.5 Kesehatan (PHBS)

- 2.5.1 Permasalahan Kesehatan (PHBS)
- 2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)
- 2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)

2.6 Kerangka Kerja Logis

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi

- 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah
- 3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah
- 3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah
- 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan
- 3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan
- 3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan
- 3.3 Rencana Kegiatan Drainase
- 3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase
- 3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase
- 3.4 Rencana Kegiatan PHBS
- 3.4.1 Rencana Kegiatan PHBS

Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

- 4.1 Rekapitulasi Anggaran
- 4.2 Rencana Anggaran Pemerintah
- 4.2.1 APBD Kab/Kota
- 4.2.2 APBD Provinsi
- 4.2.3 APBN
- 4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah
- 4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D
- 4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat
- 4.4 Antisipasi Funding-Gap
- Bab 5 Rencana Implementasi
- 5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan
- 5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender
- 5.1.2 Pembebasan Lahan dan *Resettlement*
- 5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola
- 5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

Lampiran

- A. Kerangka Kerja Logis (KKL)
 - A.1 Kerangka Kerja Logis Air Limbah
 - A.2 Kerangka Kerja Logis Persampahan
 - A.3 Kerangka Kerja Logis Drainase
 - A.4 Kerangka Kerja Logis PHBS
- B. Perhitungan Prioritasi
- C. Perhitungan Volume Kebutuhan Infrastruktur
- D. Program Jangka Menengah
 - D.1 Program, Kegiatan dan Anggaran Sanitasi Jangka Menengah (Total)
 - D.2 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota
 - D.3 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Provinsi
 - D.4 Kesepakatan Sumber Pendanaan APBN dan PHLN
 - D.5 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta
 - D.6 Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat
 - D.7 Daftar Tunggu
- E. Deskripsi Program/Kegiatan
- F. Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

Dokumen Terpisah (sesuai kebutuhan)

- 1. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Swasta CSR)
- 2. Proposal Pendanaan Sanitasi (Pendanaan Hibah)

Bab 1 Pendahuluan

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota, wilayah perencanaan, dan sistematika dokumen.
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.

1.1 Latar Belakang

- Berisi penjelasan mengenai pentingnya penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS), baik bagi Pemerintah (Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat) maupun bagi lembaga donor, perusahaan swasta, dan masyarakat.
- Jelaskan pula konteks penyusunan MPS ini dengan pelaksanaan program nasional Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP)
- Jelaskan pula keterkaitan antara MPS dengan proses penganggaran secara umum.

1.2 Maksud dan Tujuan

Berikan penjelasan mengenai maksud dan tujuan disusunnya dokumen MPS.

1.3 Wilayah Perencanaan

- Berikan penjelasan mengenai wilayah perencanaan, letak dan orientasi geografis kabupaten/kota.
- Gambar 1.1 informasi mengenai wilayah perencanaan (kabupaten/kota), dan orientasi geografis (di dalam provinsi).
- Lengkapi dengan Peta:
 - Gambar 1.1: Peta Administrasi Kabupaten/Kota

1.4 Metodologi

• Berikan penjelasan mengenai metode pendekatan, proses, dan jenis data yang digunakan dalam penyusunan MPS.

Bab 2 Review SSK dan Prioritas Pembangunan

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil review SSK, sasaran dan prioritas pembangunan sanitasi untuk 5 tahun mendatang.
- Jabarkan dan simpulkan hasil review Buku Putih dan SSK, khususnya aspek kependudukan, area beresiko sanitasi, dan potensi pendanaan sanitasi. Telaah kembali (dan sempurnakan, bila diperlukan) Kerangka Kerja Logis (KKL).
- Jabarkan dan simpulkan kondisi dan permasalahan, sasaran dan target, dan prioritas pembangunan sanitasi.
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

2.1 Profil Kabupaten/Kota

2.1.1 Kependudukan

- Berisi penjelasan mengenai aspek kependudukan kabupaten/kota, yang meliputi : jumlah, distribusi, kepadatan, kondisi sosial ekonominya, dan proyeksinya hingga 5 (lima) tahun mendatang.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.1: Jumlah dan Kepadatan Penduduk
 - Tabel 2.2: Proyeksi Penduduk

2.1.2 Area Beresiko

- Berisi penjelasan mengenai area beresiko sanitasi, yang meliputi lokasi/kawasan yang mempunyai resiko sanitasi, penanganan yang dibutuhkan, dan informasi lainnya.
- Tabel 2.3 dan Gambar 2.1 menjelaskan mengenai Area Beresiko Sanitasi sebagaimana yang diidentifikasikan dalam BPS/SSK.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.3: Area Beresiko Sanitasi
- Lengkapi dengan Gambar:
 - Gambar 2.1: Peta Area Beresiko Sanitasi

2.1.3 Keuangan Daerah

- Berisi penjelasan mengenai kondisi keuangan Daerah dan kemampuan pendanaan sanitasi untuk 5 (lima) tahun mendatang.
- Tabel 2.4 ,menjelaskan mengenai proyeksi kemampuan pendanaan sanitasi (APBD Kabupaten/Kota) untuk 5 tahun mendatang.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.4: Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi APBD Kabupaten/Kota

2.2 Air Limbah

2.2.1 Permasalahan Air Limbah

- Penjelasan mengenai permasalahan air limbah dari berbagai aspek
- Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif.
- Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.5: Permasalahan mendesak Air Limbah Domestik

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

- Penjelasan mengenai sasaran pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.6: Resume Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik
 - Tabel 2.7: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik

2.2.3 Prioritas Pembangunan Air Limbah

- Penjelasan mengenai prioritas pembangunan air limbah yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.8: Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik

2.3 Persampahan

2.3.1 Permasalahan Persampahan

- Penjelasan mengenai permasalahan persampahan dari berbagai aspek
- Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif.
- Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.9: Resume Permasalahan mendesak Persampahan Domestik

2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan

- Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.10: Resume Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik
 - Tabel 2.11: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan Domestik

2.3.3 Prioritas Pembangunan Persampahan

- Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.12: Prioritas Program dan Kegiatan Persampahan Domestik

2.4 Drainase

2.4.1 Permasalahan Drainase

- Penjelasan mengenai permasalahan drainase dari berbagai aspek
- Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif.
- Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.13: Resume Permasalahan Drainase

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

- Penjelasan mengenai sasaran pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.14: Resume Tujuan dan Sasaran Pengembangan Drainase
 - Tabel 2.15: Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase

2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase

- Penjelasan mengenai prioritas pembangunan persampahan yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.16: Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase

2.5 PHBS

2.5.1 Permasalahan Kesehatan (PHBS)

- Penjelasan mengenai permasalahan PHBS dari berbagai aspek
- Manfaatkan Diagram Sistem Sanitasi dalam menjelaskan agar lebih komprehensif.
- Manfaatkan hasil survei EHRA, Buku Putih, SSK, dan data-data aktual lainnya
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.17: Resume Permasalahan Mendesak PHBS

2.5.2 Sasaran Pembangunan Kesehatan (PHBS)

- Penjelasan mengenai sasaran pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.18: Resume Tujuan dan Sasaran PHBS

2.5.3 Prioritas Pembangunan Kesehatan (PHBS)

- Penjelasan mengenai prioritas pembangunan PHBS yang dirinci setiap tahun
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 2.19: Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan PHBS

2.6 Kerangka Kerja Logis

- Beberapa contoh Kerangka Kerja Logis yang dianggap penting dimasukkan dalam Tabel:
 - Tabel 2.20: Kerangka Kerja Logis Air Limbah
 - Tabel 2.21: Kerangka Kerja Logis Persampahan
 - Tabel 2.22: Kerangka Kerja Logis Drainase
 - Tabel 2.23: Kerangka Kerja Logis PHBS
- Kerangka Kerja Logis (KKL) yang lengkap untuk air limbah, persampahan, drainase dan PHBS terkait sanitasi dimasukan didalam Lampiran.

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
- Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.
- Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (*beneficieries*), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.
- Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, <u>tabel lengkap seluruh</u> kegiatan diletakkan di Lampiran)
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

3.1.1 Sarana dan Prasarana Air Limbah

- Uraikan dengan ringkas:
 - Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal
 - Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota
 - Rencana Air Limbah Non-Domestik (bila ada)
- Lengkapi dengan gambar:
 - Gambar 3.1: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan volumenya yang ada saat ini
 - Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah dan volumenya yang akan dibangun.

3.1.2 Kegiatan Pendukung Air Limbah

- Uraikan dengan ringkas:
 - Studi dan Perencanaan Teknis
 - Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 3.1: Rencana Kegiatan Air Limbah

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

3.2.1 Sarana dan Prasarana Persampahan

- Uraikan dengan ringkas:
 - Rencana Pengurangan Sampah
 - Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, dan TPA.
- Lengkapi dengan gambar:
 - Gambar 3.3: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan volumenya yang ada saat ini
 - Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan dan volumenya yang akan dibangun.

3.2.2 Kegiatan Pendukung Persampahan

- Uraikan dengan ringkas:
 - Studi dan Perencanaan Teknis
 - Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 3.2: Rencana Kegiatan Persampahan

3.3 Rencana Kegiatan Drainase

3.3.1 Sarana dan Prasarana Drainase

- Uraikan dengan ringkas:
 - Rencana Pembangunan Saluran Drainase
 - Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung
- Lengkapi dengan gambar:
 - Gambar 3.5: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang ada saat ini
 - Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase dan volumenya yang akan dibangun.

3.3.2 Kegiatan Pendukung Drainase

- Uraikan dengan ringkas:
 - Studi dan Perencanaan Teknis
 - Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 3.3: Rencana Kegiatan Drainase

3.3 Rencana Kegiatan PHBS

- Uraikan dengan ringkas Rencana Kegiatan PHBS
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 3.4: Rencana Kegiatan PHBS

3.5 Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah

- Uraikan dengan ringkas potensi atau akses sumber pendanaan nonpemerintah seperti dari donordonor internasional, nasional, CSR dan sumber-sumber pendanaan lainya yang memiliki potensi untuk pendanaan sanitasi.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 3.5: Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial;
 - Tabel 3.6: Daftar perusahaan penyelenggara CSR, swasta, BUMN, BUMD dsb yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pengembangan sector sanitasi

Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
- Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.
- Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (beneficieries), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran)
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

4.1 Rekapitulasi Anggaran

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi dan APBN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS).
- Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran, per sumber pendanaan (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN, Partisipasi Swasta dan Partisipasi Masyarakat) dan rekapitulasi biaya untuk air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS terkait sanitasi.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.1: Rekapitulasi Anggaran per Sumber Pendanaan
 - Tabel 4.2: Rekapitulasi Anggaran Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah

4.2.1 APBD Kab/Kota

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.3: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Kab./Kota

4.2.2 APBD Provinsi

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.4: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBD Provinsi

4.2.3 APBN

 Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

- Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.5: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan APBN

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah

4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D

- Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta, CSR dsb.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.6: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari Partisipasi Swasta

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

- Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi masyarakat
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.7: Rekapitulasi Anggaran Sumber Pendanaan dari partisipasi Masyarakat.

4.4 Antisipasi Funding-Gap

- Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhka jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 4.8: "Funding Gap" APBD Kab./Kota

Bab 5 Rencana Implementasi

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai status kesiapan pelaksanaan (implementasi) kegiatan, khususnya pada tahun pertama dan kedua.
- Bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan, maka perlu dilakukan tindakan segera, agar kendala tersebut dapat tertangani dengan baik dan efektif, utamanya masalah perencanaan teknis, pembebasan lahan dan resettlement (bila ada), dan penyiapan organisasi pengelola (bila belum ada).
- Penyusunan rencana monitoring dan evaluasi tahunan.
- Lengkapi tabel rencana implementasi (tidak perlu seluruhnya, <u>tabel lengkap diletakkan di</u> Lampiran)
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

- Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran O&M), dll.
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 5.1: Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran (n+2)
 - Tabel 5.2: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun (n+2)
 - Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran (n+3)
 - Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun (n+3)

5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender

- Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
- Tabel 5.5 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan segera untuk memenuhi persyaratan "Readiness Criteria", khususnya untuk kegiatan tahun (n+2) dan (n+3)
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 5.5: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement

- Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan resettlement (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari.
- Tabel 5.6 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, khususnya untuk kegiatan tahun (n+2) dan (n+3)
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 5.6: Identifikasi permasalahan lahan

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola

- Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru.
- Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll.
- Tabel 5.7 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, khususnya untuk kegiatan tahun (n+2) dan (n+3)
- Lengkapi dengan tabel:
 - Tabel 5.7: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola

5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

5.2.1 Monitoring dan Evaluasi

- Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPS, misalnya: pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana.
- Lengkapi deng gambar:
 - Gambar 5.1: Rencana kerja monitoring dan evaluasi tahunan

Lampiran-Lampiran:

Lampiran A: Kerangka Kerja Logis

Lampiran A.1: Kerangka Kerja Logis Air Limbah

Lampiran A.2: Kerangka Kerja Logis Persampahan

Lampiran A.3: Kerangka Kerja Logis Drainase

Lampiran A.4: Kerangka Kerja Logis PHBS

Lampiran B: Perhitungan Prioritas Pembangunan Sanitasi

Lampiran C: Perhitungan Volume Kegiatan Infrastruktur

Lampiran D: Program, Kegiatan dan Penganggaran

Lampiran D.1: Program Kegiatan dan Anggaran Sanitasi Jangka Menengah (Total)

Lampiran D.2: Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Kabupaten/Kota

Lampiran D.3: Kesepakatan Sumber Pendanaan APBD Provinsi

Lampiran D.4: Kesepakatan Sumber Pendanaan APBN

Lampiran D.5: Kesepakatan Sumber Pendanaan Partisipasi Swasta

Lampiran D.6: Kesepakaan Sumber Pendanaan Partisipasi Masyarakat

Lampiran D.7: Daftar Tunggu

Lampiran E: Deskripsi Program/Kegiatan

Lampiran F: Keputusan Bupati/Walikota tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

Template tabel dan contoh peta/gambar

Gunakan untuk mengisi tabel-tabel sebagaimana diindikasikan di dalam template MPS. Pokja dapat menambahkan tabel, peta maupun gambar apabila dirasa perlu untuk memperjelas informasi yang ingin disampaikan. Nomor tabel dan peta/gambar disini sesuai dengan nomor tabel dan peta/gambar di penjelasan terkait Pedoman Outline MPS.

Yang tertulis dibawah ini hanya semata-mata sebagai contoh dan penjelasan untuk memudahkan Pokja dalam menyusun Dokumen MPS.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

CONTOH:

Program dan Kegiatan dalam dokumen ini merupakan hasil **konsolidasi dan integrasi** dari berbagai dokumen perencanaan terkait pengembangan sektor sanitasi dari berbagai kelembagaan terkait, baik sinkronisasi dan koordinasi pada tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Kementerian / Lembaga untuk periode Jangka Menengah. Dari sisi penganggaran, dokumen ini juga memuat rancangan dan komitmen pendanaan untuk implementasinya, baik komitmen alokasi peng-anggaran pada tingkat Kab/Kota, Provinsi, Pusat maupun dari sumber pendanaan lainnya.

Untuk sumber penganggaran dari sektor Pemerintah, keseluruhan komitmen dalam dokumen ini akan menjadi acuan dalam tindak lanjut melalui proses penganggaran formal tahunan.

Beberapa pokok utama yang telah dicapai dengan penyusunan dokumen ini antara lain:

- Pemrograman telah mempertimbangkan komitmen bersama antara kemampuan APBD Pemda dan pendanaan Pemerintah Pusat maupun partisipasi dari sektor lain yang peduli sanitasi.
- Program dan Anggaran untuk 5 tahun ke depan sudah diketahui, sehingga perencanaan lebih optimal dan matang.
- Memorandum Program investasi kabupaten/kota merupakan rekapitulasi dari semua dokumen perencanaan sanitasi dan telah disusun dengan mempertimbangkan kemampuan kabupaten/kota dari aspek teknis, biaya dan waktu.
- Memorandum Program investasi ini dilengkapi dengan kesepakatan pendanaan yang diwujudkan melalui persetujuan dan tanda tangan dari Bupati/ Walikota/ Gubernur selaku kepala daerah.
- Program investasi sektor Sanitasi ini telah disusun berdasarkan prioritas menurut kebutuhan kabupaten/kota untuk memenuhi sasaran dan rencana pembangunan kabupaten/kota.
- Proses penyusunan rencana program investasi ini telah melalui aspek keterpaduan antara pengembangan wilayah/kawasan dengan pengembangan sektor bidang yang terkait kesanitasian, yang mencakup: Koordinasi Pengaturan, Integrasi Perencanaan, dan Sinkronisasi Program berdasarkan Skala Prioritas tertentu atau yang ditetapkan paling sesuai dalam rangka menjawab tantangan pembangunan.

Memorandum Program ini dilengkapi dengan tabel-tabel rencana investasi program, rencana pelaksana an periode sampai akhir 5 (lima) tahun ke depan, dan peta-peta pokok yang dapat menjelaskan arah pengembangan dan struktur ruang perkotaannya.

1.2 Maksud dan Tujuan

CONTOH:

Maksud:

Tersusunnya dokumen rencana **strategi dan komitmen pendanaan** oleh pemerintah Kabupaten / Kota dan pihak terkait untuk rancangan implementasi pembangunan sektor sanitasi yang komprehensif untuk Jangka Menengah. Secara umum MPS ini secara spesifik bersifat sebagai "Expenditure Plan" – khususnya untuk program pembangunan sektor sanitasi.

Tujuan:

- MPS diharapkan dapat dipakai sebagai pedoman penganggaran untuk implementasi pelaksanaan pembangunan sanitasi mulai tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx yang telah tercantum dalam dokumen Strategi Sanitasi Kab/Kota.
- ii). Dapat memberikan gambaran tentang kebijakan pendanaan untuk implementasi pembangunan Sanitasi Kab/Kota Xxx selama 5 tahun yaitu tahun 20xx sampai dengan tahun 20xx.
- iii). Dipergunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Operasional tahapan pembangunan sanitasi.
- iv). Dipergunakan sebagai dasar dan pedoman bagi semua pihak (instansi, masyarakat dan pihak swasta) yang akan melibatkan diri untuk mendukung dan berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kab/Kota Xxx.



1.3 Wilayah Perencanaan

1.3.1 Gambaran Umum

Kota Kediri secara geografi berada pada ketinggian 67 meter di atas permukaan laut serta terletak pada 111,15° hingga 112,03° Bujur Timur dan 7,45° hingga 7,55° Lintang Selatan, terbelah oleh Sungai xxxxxx yang mengalir dari selatan ke utara menjadi dua wilayah yaitu wilayah barat sungai dan timur sungai. Luas Wilayah Kota Kediri mencapai 63,40 km² terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan xxxxxxx, Kecamatan xxxxxx dan Kecamatan xxxxxxx. Seluruh wilayah Kota xxxxx berbatasan dengan kecamatan-kecamatan pada wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Kediri. Adapun batas administratif Kota xxxx sebagai berikut:

Sebelah barat
 Sebelah timur
 Sebelah utara
 Kecamatan xxxxxx
 Kecamatan xxxxxx
 Kecamatan xxxxxx
 Kecamatan xxxxxxxx

Kondisi wilayah yang relatif datar, meskipun di bagian barat dibatasi oleh Gunung xxx dengan ketinggian 672 meter dan Gunung xxxxx setinggi 300 meter. Tingkat kemiringan lahan antara 0 sampai 40%. Rata-rata area

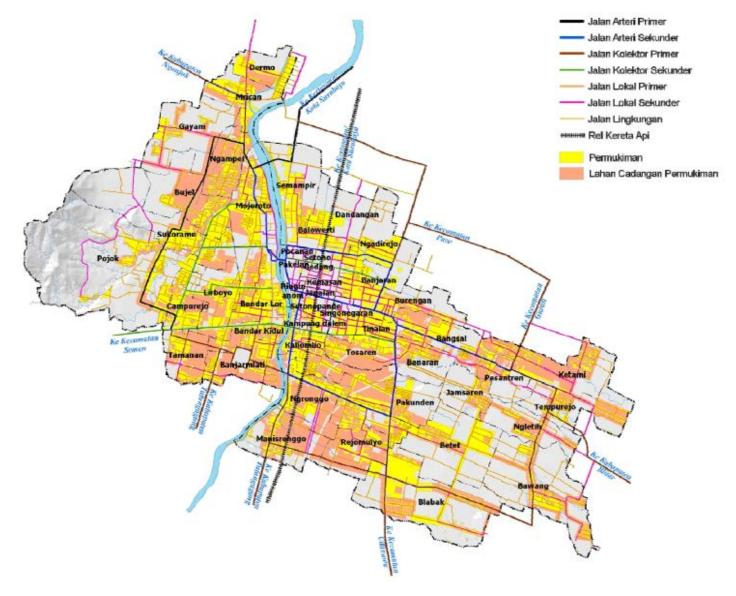
luas kemiringan lahan wilayah Kota xxxxxx terdiri dari datar (0-2%) seluas 5.737 Ha, bergelombang (3-15%) : 197 Ha, Curam (16-40%) 182 Ha dan sangat curam (>40%) : 224 Ha.

1.3.2 Arah Pengembangan Kota

Dalam rangka perencanaan spasial di Indonesia, Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan adanya dokumen rencana tata ruang yang terdiri dari rencana umum dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang terdiri dari Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan jangka waktu 20 tahun, Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi (RTRWP) untuk jangka waktu 20 tahun, serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (RTRWK) untuk jangka waktu 20 tahun yang dikaji ulang setiap 5 tahunnya. Disamping rencana umum, diperlukan juga adanya rencana rinci yang terdiri dari rencana tata ruang pulau/kepulauan dan rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang kawasan strategis propinsi, serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota dan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten/kota. Gambaran Rencana Tata Ruang Wilayah khususnya Rencana Lahan Permukiman di Kota xxx dapat dilihat pada Gambar 1.1

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang tersebut diatas, Pemerintah Kota xxxx menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kota xxxx tahun 2010-2030 dengan Visi "Terwujudnya Penataan ruang Wilayah yang Produktif, Seimbang dan Lestari bagi Kesejahteraan Masyarakat" yang bertujuan untuk mewujudkan Kota xxxxxx yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Untuk mencapai visi tersebut, beberapa misi yang ditetapkan adalah:

- Mewujudkan struktur ruang yang seimbang guna mendorong pertumbuhan wilayah sekaligus mengurangi kesenjangan antar wilayah;
- 2. Mewujudkan pola ruang yang selaras dan bekelanjutan;
- 3. Mewujudkan terciptanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha sesuai rencana tata ruang serta mendorong peluang investasi produktif;
- Mewujudkan penyediaan sarana dan pasarana untuk peningkatan kualitas SDM yang lebih produktif dan mandiri serta berdaya saing tinggi.



Gambar 1.1 Peta Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

1.4 Methodologi

1.4.1 Methodologi Penyusunan Dokumen

CONTOH:

Metode penyusunan MPS adalah sebagai berikut:

- 1. Review SSK
- 2. Internalisasi
- 3. Konsultasi dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait di provinsi.
- 4. Akses Sumber Pendanaan Non-Pemerintah
- 5. Pengawalan Program dan Kegiatan kedalam mekanisme penganggaran.

Proses penyusunan MPS terdiri dari beberapa tahapan yang tidak dapat terlepas antara satu dengan lainnya, antara lain sebagai berikut:

- 1. Melakukan Riview SSK khususnya untuk Kerangka Logis, Program, Kegiatan dan Penganggaran serta Prioritasi Program.
- 2. Melakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota
- 3. Melakukan konsultasi teknis kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait.
- 4. Melakukan pertemuan dengan sumber-sumber alternatif non pemerintah ditingkat Kab./Kota
- 5. Melakukan pengawalan kepada mekanisme panganggaran.

1.4.2 Sistimatika Penyajian

CONTOH:

Sistematika dokumen MPS terdiri dari 5 bab yaitu sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan yang menggambarkan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan MPS, metode penyusunan dan sistematika dokumen.

Bab kedua menyajikan hasil review SSK yang menyangkut kondisi eksisting sanitasi, Prioritasi Program, kerangka logis.

Bab ketiga berisi tentang rencana implementasi program dan kegiatan, perhitungan volume kebutuhan infrastruktur dan non infrastruktur.

Bab keempat berisi tentang rencana kebutuhan biaya untuk implementasi dan sumber pendanaan bagi masing-masing kegiatan. Disamping itu dalam bab ini juga menguraikan rencana antisipasi bilamana terjadi funding gap.

Bab kelima berisi inventarisasi status kesiapan dari masing-masing kegiatan, langkah-langkah dan tindak lanjut yang harus dilakukan bagi kegiatan yang belum memenuhi kriteria kesiapan dan rencana Monev.

BAB 2 REVIEW SSK DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN SANITASI

CONTOH:

2.1. Profil Kabupaten / Kota xxxxx

2.1.1. Kependudukan

Tabel 2.1 Jumlah dan Kepadatan Penduduk Tahun 201x

		Luas	Penduduk		
No.	Kecamatan	Terbangun	Jumlah	Kepadatan	Keterangan
		(Ha)	(Jiwa)	(Jiwa/Ha)	
1	Getasan	858	48.748	56.81	Pedesaan
2	Tengaran	1.828	64. 546	35.31	Pedesaan
3	Susukan	1.065	43.319	40.67	Perdesaan
4	Ungaran Timur	1.049	75.040	71.53	Perkotaan
5	Ungaran Barat	1.144	69.441	60.70	Perkotaan
6	Bergas	1.821	69.570	38.20	Perkotaan
Dst.	Dst				
Jumla	h				

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2

Tabel 2.2 Proyeksi Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten/xxxx

	Kecamatan	Jumlah	Pertum-	Jumlah Penduduk (Jiwa)						
No		Pendd. buhan (n-1)		(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)		
1	Getasan	48.748	0.56	49.296	49.572	49.849	50.128	50.409		
2	Tengaran	64. 546	0.53	65.232	65.232	65.925	66.275	66.626		
3	Susukan	43.319	0.24	43.527	43.632	43.736	43.841	43.947		
4	Ungaran Timur	75.040	0.84	76.306	76.947	77.593	78.245	78.902		
5	Ungaran Barat	69.441	0.78	70.529	71.079	71.633	72.192	72.755		
6	Bergas	69.570	0.84	70.744	71.338	71.937	72.541	73.151		
dst	Dst									
	Jumlah									

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab. 2

2.1.2. Area Beresiko

Masukkan hanya untuk Desa/Kelurahan yang resiko sangat tinggi dan resiko tinggi saja.

CONTOH:

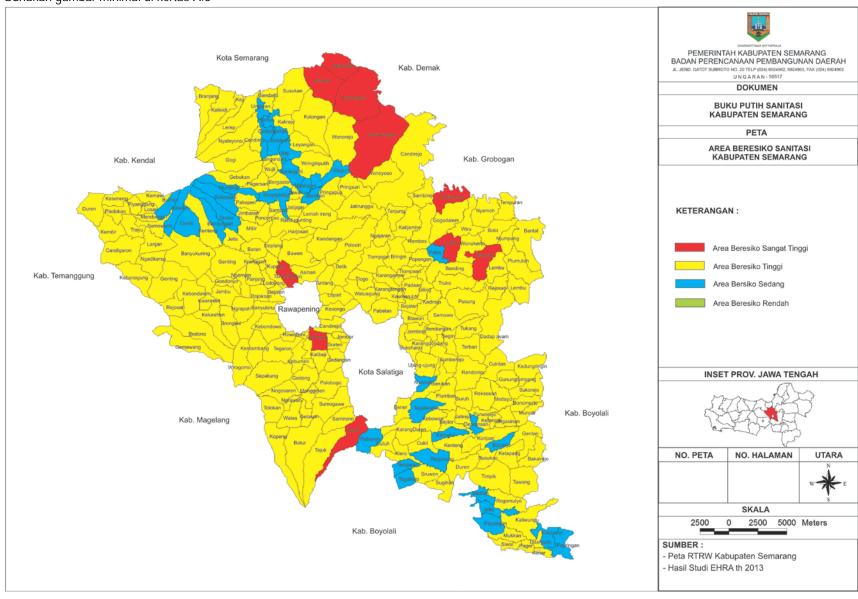
Tabel 2.3 Area Beresiko Sanitasi

No.	Desa/Kel/Kecamatan	Tingkat Resiko	Perkotaan/ Pedesaan	Kebutuhan Penanganan/ Penyebab Utama Resiko
010	Kec. Getasan			
01	Kopeng	Tinggi	Perkotaan	AL, Sampah, PHBS
02	Batur	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, Drainase, PHBS
03	Tajuk	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
04	Jetak	Sangat Tinggi	Pedesaan	Limbah, Sampah, PHBS
dst	dst			
020	Kec. Tengaran			
01	Sruwen	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
02	Sugihan	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
03	Bener	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
04	Barukan	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
dst	dst			
030	Kec. Susukan			
01	Badran	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
02	Timpik	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
03	Tawang	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
04	Bakalrejo	Tinggi	Pedesaan	AL, Sampah, PHBS
dst	dst			
040	Kec. xxxxxx			
01	Xxxxxxxx			
dst	dst			

Sumber: Buku Putih Sanitasi Bab 5

Peta 1.1 Area Beresiko Sanitasi

Gunakan gambar minimal di kertas A.3



2.1.3. Keuangan Daerah

Tabel 2.4 Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi

No.	Uraian	Proyeksi Besaran Pendanaan Sanitasi (Rp. Juta)						
140.	Graidir	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	Jumlah	
1	Perkiraan Belanja Langsung	538.199	592.019	651.220	716.342	787.977	3.285.757	
2	Perkiraan APBD Murni untuk Sanitasi	13,464	14.810	16.291	17.920	19.712	82.199	
3	Perkiraan Komitmen Pendanaan Sanitasi APBD Kab./Kota.	15,120	17.125	19.837	22.813	26.235	101.135	
	Prosentase Komitmen terhadap Belanja Langsung	2.79%	2.91%	3.05%	3.18%	3.33%	3.08%	

Sumber: SSK, Bab. 2

2.2. Air Limbah

2.2.1 Permasalahan Air Limbah

Uraikan resume permasalahan "MENDESAK" untuk permasing-masing sektor secara singkat dalam bentuk tabel. Data ini secara umum sudah tersedia di dokumen BPS. Yang diperlukan pada tahap ini adalah <u>kesepakatan dari seluruh anggota Pokja</u> dalam penetapan skala permasalah. Uraian permasalahan bisa dibagi menjadi 2 kelompok y.i dari sisi:

- a) Sistim Sanitasi (lihat petunjuk terkait Diagram Sistim Sanitasi /DSS) dan
- b) Aspek lain disamping Pengembangan Sarana Prasarana (seperti dari aspek Pendanaan, Kelembagaan, Peraturan dan Perundangan serta Peran Swasta/Masyarakat). Identifikasi dan klassifikasi terkait permasalahan ini dapat mengacu ke dokumen Kebijakan dan Strategi Nasional.

Secara umum kesepakatan "Permasalahan utama" ini pada sub bab ini akan dikaitkan dengan "Sasaran" yang akan dicapai dan akan menjadi dasar penyiapan Program Kegiatan prioritas.

CONTOH:

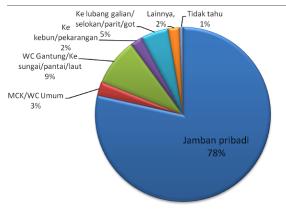
Tabel 2.5: Permasalahan Mendesak Air Limbah Domestik

A. Sistem Air Limbah Permukiman:

1. Aspek Pengembangan Sarana dan Prasarana:

Kepemilikan Jamban di Kab.xx adalah 81%, dengan rincian 78% jamban pribadi dan MCK/WC Umum 3%, sedangkan sisanya ke lain-lain:

User Interface:

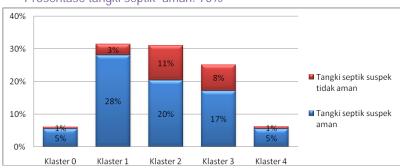


DISEPARATI

Keterangan:

- Jumlah Penduduk Kab./Kota tahun 2011: 932.688 jiwa atau 245.242 KK
- Jumlah Penduduk Perkotaan tahun 2011: 279.806 jiwa atau 55.961 KK Kesimpulan:
 - Kepemilikan akses Jamban Pribadi & MCK = 81 % (198.646 KK)
 - BABS = 19 % (232.980 jiwa atau 46.596 KK) yang meliputi:
 - BABS WC gantung/sungai/laut = 9 % (22.072 KK atau 110.359 jiwa)
 - BABS kebun/pekerangan = 2 % (4.905 KK atau 24.524 jiwa)
 - BABS lubang galian/selokan = 5 % (12.262 KK atau 61.311 jiwa)
 - BABS tempat lainnya = 3% (7.357 KK atau 36.786 jiwa)

Pengumpulan & Penampungan / Pengolahan Awal: Prosentase tangki septik aman: 75%



Keterangan: Kepemilikan Akses Pribadi dan MCK = 198.646 KK Kesimpulan:

- Penyaluran akhir tinja rumah tangga yang aman = 75 % (148.985 KK)
- Penyaluran akhir tinja rumah tangga tidak aman = 25 % (49.662 KK)
- Pengangkutan / Pengaliran:
- hanya ada 1 truk penyedot tinja, pembuangan tinja ke sungai xxx,
- praktek pengurasan tangki septik 3% atau 4.470 KK
- prosentase keluarga yang memiliki SPAL 11%
- Pengolahan Akhir Terpusat
- Kapasitas IPLT: 15 m3/hari.
- Pemanfaatan IPLT : 3 m3/hari (belum optimal)
- Kondisi IPLT rusak atau tidak berfungsi optimal.

Daur Ulang / Pembuangan Akhir:	•	belum dilakukannya praktek pendeteksian kualitas limbah, xxx
Perencanaan Teknis dll.	•	Belum adanya Master Plan Air Limbah Permukiman yang terintegrasi dengan RTRW perkotaan

B. <u>Lain-lain</u> :	
2. Aspek Pendanaan:	 Rendahnya alokasi pendanaan dari Pemerintah Belum tertariknya sektor swasta untuk melakukan investasi Belum optimalnya penggalian potensi pendanaan dari masyarakat
3. Aspek Kelembagaan:	 Belum terpisahnya fungsi regulator dan Operator dalam pengelolaan IPLT. Masih rendah dan terbatasnya SDM yang terkait pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi dalam penetapan kebijakan
Aspek Peraturan Perundangan dan penegakan hukum:	 Belum memadainya perangkat Perda yang diperlukan dalam pengelolaan Belum adanya Perda terkait Restribusi Air Limbah Permukiman
5. Aspek Peran serta Masyarakat dan Dunia Usaha / Swasta:	 Masih rendahnya kesadaran masyarakat Terbatasnya penyelenggaraan pengembangan system yang berbasis masyarakat Masih kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya pengelolaan Rendahnya koordinasi antar instansi terkait dalam menggerakkan peran masyarakat
6. Aspek Komunikasi, PMJK dll.	■ XXXXXXX

(sumber referensi: BPS bab xx)

Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Air Limbah Permukiman

2.2.2 Sasaran Pembangunan Air Limbah

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 20xx. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan <u>Tingkat Prioritas</u> dan merupakan <u>hasil kesepakatan</u> seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan "Permasalahan Utama". Uraian secara detail tersedia pada dokumen SSK.

CONTOH:

Tabel 2.6: Tujuan dan Sasaran Air Limbah Domestik

Air Limbah Permukiman

- 1) Berkurangnya praktek buang air besar sembarangan (BABs) dari 19% menjadi 0% atau 46.596 KK (pada tahun 201x)
- 2) Meningkatnya kesadaran masyarakat sebesar 19 % atau 232.980 jiwa untuk tidak BABS pada akhir tahun 201x.
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana jamban keluarga dengan tangki septik yang tidak aman dari 25% menjadi 0% atau meningkat 25% (49.662 KK) pada akhir tahun 201x.
- 4) Tersedianya Regulasi Air Limbah Permukiman domestik pada tahun 201x.
- 5) Meningkatnya volume lumpur tinja yang masuk IPLT dari 90 m3 per bulan menjadi 450 m3 per bulan atau rata-rata: 15 m3/hari pada tahun 201x.
- 6) Terpisahnya antara regulator dan operator dalam pengelolaan IPLT
- 7) Peningkatan pendanaan sanitasi dari 0,3% menjadi 1,5% pada tahun 201x

Tabel 2.7 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Air Limbah Domestik Kab./Kota

No	Sistem	Cakupan layanan	Tahun					Keterangan
140		eksisting	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	Reterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Α	Sistem On-Site							
1	Individual (tangki septik)	78%	80%	82%	84%	87%	90%	186.631 KK
2	Komunal (MCK, MCK++, tangki septik)	3%	4%	5%	6%	8%	10%	20.737 KK
3	Cubluk dan sejenisnya	9%	8%	6%	4%	2%	0%	
В	Sistem Off-site							
1	Skala Kota	-	-	-	-	-	-	-
2	Skala Wilayah/Kawasan	-	-	-	-	-	-	-
С	BABS	19%	16%	13%	10%	5%	0%	
D	Lumpur Tinja ke IPLT (m3/bln)	90	162	234	306	378	450	

2.2.3. Prioritas Pembangunan Air Limbah

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan sematamata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen "MPS Tahunan"). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN.

CONTOH: Tabel 2.8 Prioritas Program dan Kegiatan Air Limbah Domestik

			Score (dar				
No.	Program	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
			25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan MCK++	2	4	4	3	3.50	1
2	Pembangunan MCK	1	4	4	4	3.25	1
3	Penyuluhan, Kampanye & Edukasi	2	2	3	3	3.00	1
4	Pembangunan IPAL Komunal	1	4	4	3	2.25	2
5	Pembangunan IPLT	2	3	3	1	2.25	2
6	Pembentukan Badan Pengelola IPLT	2	2	2	1	1.75	3
dst	Dst						

2.3. Persampahan

2.3.1 Permasalahan Persampahan CONTOH:

Tabel 2.9 Permasalahan Persampahan

A. Sistem Persampahan

1. Aspek Pengembangan

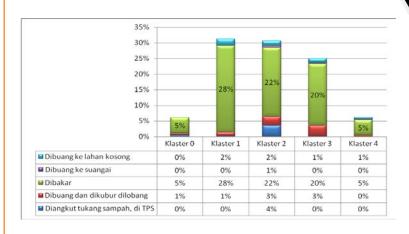
Tingkat Pengolahan Sampah Rumah Tangga (RT) sbb:

Sarana dan Prasarana

Tingkat layanan penanganan sampah RT: 4% diangkut Tukang Sampah, 96% tidak diangkut Tukang Sampah (dikubur, dibuang ke sungai, dibuang ke lahan kosong dsb)

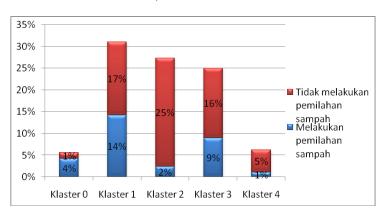
User Interface:

Pengelolaan Sampah pada RT:



Keterangan:

- Produksi Sampah Kota/Kab. per hari = 9.327 m3/hari
- Timbulan Sampah Wil. Perkotaan per hari =
- Pelayanan Sampah 4 % per hari = 373 m3/hari, hanya di Kluster 2 (wilayah perkotaan).
- Praktek Pemilahan Sampah oleh RT:



Keterangan:

- Pemilahan sampah yang sudah dilakukan oleh RT: 0.5 % (xxx m3/hari)
- Pengurangan sampah dari sumbernya (RT): 0.3 % (xxx m3/hari)

Pengumpulan setempat

- Sampai saat ini telah tersedia : 20 unit gerobag dorong, kapasitas angkut: @ 3 m3/hari (total: 60 m3/hari).
- Sampai saat ini telah tersedia: 15 unit gerobag dorong, kapasitas angkut: @ 9 m3/hari (total: 135 m3/hari).

	■ Belum adanya skema strategi untuk kerjasama dengan swasta/kelompok					
	masyarakat dalam pengelolaan persampahan.					
Penampungan Sementara	Sampai saat ini tersedia: 8 unit TPS					
(TPS):	 Sampai saat ini tersedia: 2 unit TPST, kapasitas total: 20 m3/hari atau setara 					
	dengan 0,21 % dari timbulan sampah Kab./Kota.					
Pengangkutan:	 Jumlah Dump truck Kap. @ Masih kurangnya sarana pengangkut, baru ada 2 truk 					
	pengangkut untuk wilayah perkotaan.					
(Semi) Pengolahan Akhir	 70% masih belum melakukan pemilahan, baru ada 2 kelompok proyek 3R 					
Terpusat						
Daur Ulang / Tempat	TPA xx yang akan habis masa pemanfaatannya pada tahun xx					
Pemrosesan Akhir:	Pengelolaan TPA masih memakai system Open Dumping					
Perencanaan	Belum tersedianya master plan dan dokumen perencanaan lainnya					

A. <u>Lain-lain</u> :	
2. Aspek Kelembagaan:	Dinas masih berfungsi sebagai operator dan regulator
	 SDM kurang memadai, baik dari kuantitas dan kualitas
3. Aspek Pendanaan:	 Penganggaran terkait pengelolaan persampahan baru mencapai 0.3%
	Pengelolaan sampah masih belum menjadi prioritas
	Pola penanganan sampah belum optimal
	Rendahnya dana penarikan restribusi
4. Aspek Peran Serta	Potensi masyarakat belum dikembangkan secara sistematis
Masyarakat dan Dunia	 Rendahnya investasi dunia usaha / swasta
Usaha / Swasta:	
5. Aspek Peraturan	Penerapan sanksi hukum dari Perda belum efektif
Perundangan dan	 Belum tersosialisasinya ketentuan penangan sampah terhadap masyarakat
penegakan hukum:	

(sumber referensi: BPS bab xx)

Catatan: disamping dari BPS, untuk penetapan Aspek dapat mengacu ke Jakstra Persampahan

2.3.2 Sasaran Pembangunan Persampahan

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 20xx. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan <u>Tingkat Prioritas</u> dan merupakan <u>hasil kesepakatan</u> seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan "Permasalahan Utama" seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya.

CONTOH: Tabel 2.10 Tujuan dan Sasaran Pengembangan Persampahan Domestik

Persampahan

- 1) Meningkatnya cakupan pelayanan pengangkutan sampah dari 60% menjadi 85% pada wialyah perkotaan dan 20% menjadi 40% pada daerah pedesaan pada akhir tahun 201x.
- 2) Pengurangan sampah dari sumbernya dari 0.1% 5% untuk wlayah perkotaan.
- Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan persampahan sesuai dengan UU persampahan dan SPM pada akhir tahun 201x.
- 4) Tersedianya regulasi persampahan yang sesuai dengan UU persampahan pada akhir tahun
- 5) Meningkatnya kesadaran masyarakat ber-PHBS dalam pengelolaan persampahan sebesar 60% dari jumlah penduduk atau 57.400 jiwa pada tahun 201x.

Tabel 2.11 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Persampahan

No	Sistem	Cakupan Iayanan			Keterangan			
NO	Jistom	eksisting	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	Reterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Α	Penanganan Langsung							
1								
2								
3								
В	Penanganan tidak langsung							
1								
2								
С	Penanganan berbasis masyarakat							
D	TPA							

2.3.3. Prioritas Pembangunan Persampahan

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan sematamata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen "MPS Tahunan"). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN. Peran tim Pengarah Pokja sangat diperlukan dalam proses ini.

201x.

CONTOH:

Tabel 2.12 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Persampahan Domestik

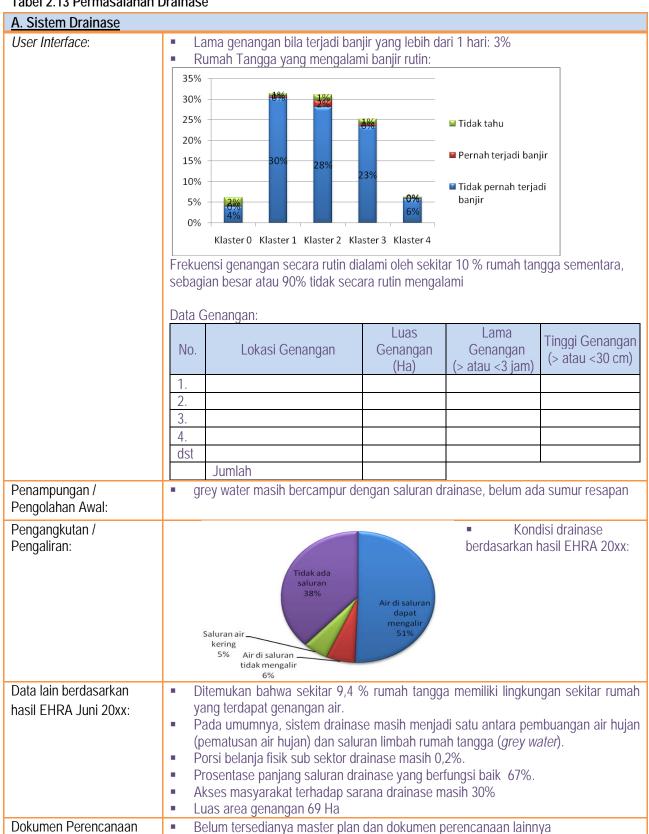
			Score (da	n bobot)			
No.	Program	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
		25%	25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan TPA	4	4	4	3	3.75	1
2	Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan	3	4	4	3	3.50	1
3	Penyusunan Masterplan Persampahan	4	4	4	2	3.50	1
4	Pengadaan kontainer 3 unit	2	4	4	1	2.75	2
5	Pembangunan TPS 3R Sidomukti dan fasilitasnya	1	3	3	3	2.50	2
6	Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	2	2	3	3	2.50	2
7	Pengadaan Amroll Truck 1 unit	2	3	4	1	2.50	2
8	Pengadaan Amroll Truck 2 unit	2	2	2	1	2.00	2
9	Pengadaan kontainer 3 unit	2	2	2	1	1.75	3
10	Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi	2	2	2	1	1.75	3
11	Revisi Perda Pengelolaan Persampahan	3	2	2	1	1.75	3
12	Pembangunan TPST 3R Kec. Madiraja dan fasilitasnya	1	2	1	2	1.50	3
dst	Dst						

2.4. Drainase

2.4.1 Permasalahan Drainase

CONTOH:

Tabel 2.13 Permasalahan Drainase



B. <u>Lain-lain</u> :	
Catatan:	■ XXXXXX
Aspek lain seperti diatas	
dan dapat mengacu ke	

2.4.2 Sasaran Pembangunan Drainase

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 20xx. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan <u>Tingkat Prioritas</u> dan merupakan <u>hasil kesepakatan</u> seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan "Permasalahan Utama" seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya.

CONTOH:

Tabel 2.14 Resume Tujuan dan Sasaran Utama Pembangunan Drainase

Drainase

- 1) Tersedianya dokumen Masterplan Drainase dan dokumen perencanaan lainnya
- 2) Meningkatnya prosentase panjang saluran drainase yang berfungsi baik dari 67% menjadi 73% atau 5.600 jiwa pada akhir tahun 201x.
- 3) Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana drainase dari 30% menjadi 50% atau 18.300 jiwa pada akhir tahun 201x
- 4) Tersedianya Regulasi drainase pada tahun 201x.
- 5) Berkurangnya luas genangan sebesar 25 Ha pada tahun 20xx, dilokasi:

CONTOH:

Tabel 2.15 Rencana Pengembangan Jangka Menengah Drainase

No	Sistem	eksisting	Sasaran Tahun					Keterangan
INO	NO SISICIII	cksisting	(n+1)	(n+2)	(n+3)	(n+4)	(n+5)	Reterangan
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Α	Cakupan Layanan	30%	33%	36%	40%	45%	50%	
В	Fungsi Drainase	67%	67.5%	68%	69%	71%	73%	
С	Luas Genangan	50 Ha	45 Ha	40 Ha	35 Ha	30 Ha	25 Ha	
3								
В	Penanganan tidak							
ь	langsung							
1								
2								
С	Penanganan berbasis							
	masyarakat							

Keterangan: Lihat rencana Pengembangan didalam SSK

2.4.3 Prioritas Pembangunan Drainase

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan sematamata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi kepentingan dari masing-masing kedinasan.

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat

menetapkan kembali prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen "MPS Tahunan"). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN.

CONTOH:

Tabel 2.16 Prioritas Implementasi Program dan Kegiatan Drainase

			Score (dar	n bobot)			
No.	Program	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
		25%	25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak	4	4	4	4	4.00	1
2	Penyusunan Masterplan Drainase	4	4	4	2	3.50	1
3	Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo	3	4	4	3	3.50	1
4	Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Kelapa	4	3	3	4	3.50	1
5	Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota	4	3	3	3	3.25	1
6	Pembangunan Saluran tersier Kp. Semit	2	3	3	4	3.00	1
7	Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso	3	3	3	2	2.75	2
8	Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota.	2	2	3	2	2.50	2
9	Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota	2	2	3	3	2.25	2
10	Penyusunan Perda	2	2	2	1	1.75	3
dst	Dst						

2.5. PHBS terkait sanitasi

2.5.1 Permasalahan PHBS terkait sanitasi

CONTOH:

Tabel 2.17 Permasalahan mendesak PHBS terkait sanitasi

Berdasarkan hasil EHRA Juni 2012, maka:

- Masih rendahnya kesadaran sebagian kecil masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat didukung dengan pola hidup masyarakat perkotaan yang berdampak pada penurunan kualitas lingkungan tempat tinggal.
- Kurangnya kepedulian masyarakat dan pengambil kebijakan terhadap programprogram yang bersifat preventif dan promotif (pencegahan dan promosi).

2.5.2 Sasaran PHBS terkait sanitasi

Tabel berikut berisi resume Sasaran prioritas yang akan dicapai terkait pembangunan Sanitasi dan PHBS terkait sanitasi sampai dengan periode Tahun 20xx. Uraian resume sasaran sudah disusun berdasarkan <u>Tingkat Prioritas</u> dan merupakan <u>hasil kesepakatan</u> seluruh anggota Pokja. Penetapan sasaran dengan mempertimbangkan "Permasalahan Utama" seperti yang diuraikan pada sub bab sebelumnya.

CONTOH:

Tabel 2.18 Tujuan dan Sasaran PHBS terkait sanitasi

PHBS

- 1) Meningkatnya proporsi pemberi informasi (komunikan) tentang Perilaku Hidup Bersih dan sehat dari kalangan SKPD dan kader kesehatan lingkungan sebesar 10% atau 9.200 jiwa pada akhir tahun 201x
- 2) Meningkatnya kesadaran anak sekolah dan pondok pesantren dalam berperilaku PHBS.
- 3) Terlatihnya kader kesehatan lingkungan sebanyak 15% atau 14.200 jiwa dari jumlah warga Kelurahan di setiap Kelurahan pada akhir tahun 201x
- 4) Berperannya kelompok masyarakat (organisasi masyarakat) laki- laki dan perempuan di 46 kelurahan dalam penyadaran higiene pada akhir tahun 201x.
- 5) Termanfaatkannya media pilihan masyarakat (media lokal) di lokasi prioritas dalam penyadaran berperilaku hidup bersih dan sehat pada akhir tahun 201x

2.5.3 Prioritas PHBS terkait sanitasi

Uraian pada Sub bab ini merupakan rangkaian dari sub bab sebelumnya dan sesuai manual data ini bisa di adopsi dari Daftar Program dan Kegiatan yang sudah disusun dari SSK. Penekanan pada sub bab ini, adalah agar Pokja dapat mengkaji dan menyepakati Daftar Program sesuai urutan Tingkat Prioritas-nya, dengan sematamata mempertimbangkan kepentingan Kab/Kota dan tanpa dipengaruhi keprntingan dari masing-masing kedinasan.

Secara proses, direkomendasikan untuk menetapkan terlebih dahulu 3 atau 4 saja sebagai Prioritas UTAMA – kaji terkait ketersediaan ANGGARAN dan RENCANA IMPLEMENTASI-nya. Apabila dalam proses ke 3 atau 4 program diatas sudah ada kepastian penganggarannya (dari berbagai sumber pendana), Pokja dapat menetapkan kembali prioritas lanjutan (kemungkinan bisa dilakukan pada tahun n+3 atau n+4 atau di review pada dokumen "MPS Tahunan"). Konsultasi dan koordinasi dengan seluruh Dinas terkait untuk penetapan prioritasi ini merupakan KEHARUSAN.

CONTOH:

Tabel 2.19 Prioritas implementasi program dan kegiatan PHBS terkait sanitasi

			Score (dan				
No.	Program	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Perse psi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
		25%	25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Program STBM	4	4	4	4	4.00	1
2	Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	3	4	4	3	3.50	1
3	Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah dan Pondok Pesantren	4	3	3	2	3.00	1
4	Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan	3	3	3	3	2.75	2
5	Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio	4	2	3	3	2.50	2
dst	Dst						

2.6. Review Kerangka Kerja Logis

- Perhatikan dan ikuti Proses-2 untuk melakukan review Kerangka Kerja Logis
- Masukkan berapa contoh KKL yang dianggap paling penting untuk Air imbah, Persampahan, Drainase dan PHBS. KKL selengkapnya masukkan dalam Lampiran.

CONTOH:

Tabel 2.20 Kerangka Kerja Logis Air Limbah

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
Praktek BABS saat ini 25 %	Tercapainya Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk layanan air limbah domestik tahun 2018	Berkurangnya praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dari 25 % menjadi 0% tahun 2018	Meningkatkan akses layanan air limbah komunal bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) perkotaan	Peningkatan Sarana dan Prasarana Sistem Komunal	Pembangunan MCK++ Pembangunan Tangki septik Komunal Revitalisasi IPLT
			Meningkatkan Akses Sistem terpusat pada daerah CBD	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat Skala Kawasan
Dst					

<u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Tabel 2.21 Kerangka Kerja Logis Persampahan

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
Dst					

Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis Drainase

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
Dst					

Tabel 2.22 Kerangka Kerja Logis PHBS

Permasalahan mendesak	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan
Dst					

Bab 3 Rencana Kegiatan Pembangunan Sanitasi

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
- Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.
- Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (*beneficieries*), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll.
- Tabel diisi khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, <u>tabel lengkap seluruh</u> kegiatan diletakkan di Lampiran)
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

Contoh:

Salah satu sasaran pembangunan air limbah yang akan dicapai pada akhir perencanaan ini adalah praktek BABS dari 19 % menjadi 0% pada tahun 2018. Untuk mengitung kebutuhan kegiatan pada akhir perencanaan maka diasumsikan bahwa tingkat pertumbuhan BABS setara dengan tingkat pertumbuhan penduduk yaitu 1.78 % pertahun sehingga praktek BABS pada akhir perencanaan adalah 19 % dari prediksi jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 258.996 jiwa atau 51.799 KK.

3.1.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Air Limbah

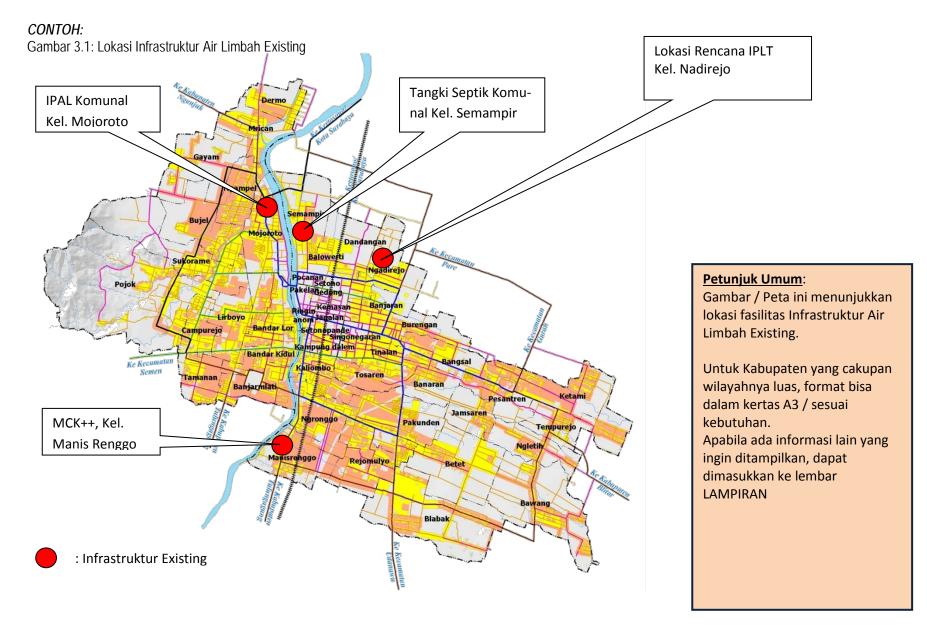
 Rencana Sistem Setempat (On-site): sistem individual maupun komunal Contoh:

Sistem individual dan komunal yang akan dibangun meliputi: MCK, MCK++ dan Septiktank komunal baik yang berbasis masyarakat maupun berbasis kelembagaan.

Pembangunan MCK, MCK++ dan Septiktank Komunal akan difokuskan pada daerah yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi.

 Rencana Sistem Terpusat (Off-site): IPAL kawasan dan skala kota Contoh:

Pembangunan sistem terpusat akan dibangun pada skala kawasan yang diprioritaskan untuk kawasan perkotaan yang meliputi kawasan xxxxx (contoh: kawasan bisnis/CBD, kawasan perumahan xxx, dsb).



CONTOH: (Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi)

MCK++, Kel. Lokasi Rencana IPLT Mrican (1 unit) Kel. Nadirejo Tangki Septik Komu-**IPAL** Komunal nal Kel. Semampir Kel. Mojoroto Lokasi Rencana IPAL Komunal (7 unit):Kel. Kp.Dalem (2 unit), Kel. Kemasan (2 unit), Kel. Pesantren (3 unit). Petunjuk Umum: Pojok Gambar / Peta ini menunjukkan lokasi fasilitas Infrastruktur Air Limbah Existing dan Rencana Ke Kecamatan MCK++, Kel. Ban-Tinalan Bandar Kidul Untuk Kabupaten yang cakupan Semen dar Lor (2 unit) Tamanan Banaran wilayahnya luas, format bisa Ketami Pesantren dalam kertas A3 / sesuai MCK++, Kel. Pakunden kebutuhan. Tempurejo Apabila ada informasi lain yang Manis Renggo ingin ditampilkan, dapat Rejomulyo Betet dimasukkan ke lembar : Infrastruktur Existing **LAMPIRAN** : Infrastruktur Rencana Blabak Lokasi Rencana Sistem Terpusat Skala Kawasan Ds.Pecangan Kec. Xx

Gambar 3.2: Peta Lokasi Infrastruktur Air Limbah sampai Akhir Perencanaan

3.1.2 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Air Limbah

 Studi dan Perencanaan Teknis Contoh:

Kegiatan studi dan perencanaan teknis yang diperlukan dalam rangka mendukung kegiatan fisik khususnya yang brbasis kelembagaan meliputi masterplan, studi kelayakan, studi lingkungan dan desain rinci. Kebutuhan dan jenis dari studi dan perencanaan teknis ini akan disesuaikan dengan kebutuhan atau persyaratan yang berlaku.

Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.

Contoh:

Kelembagaan, peraturan dan komunikasi merupakan keharusan dalam rangka mendukung keberlanjutan program sanitasi.

Kelembagaan yang akan dibentuk berupa kelembagaan formal dan kelembagaan yang bersifat non-formal atau berbasis masyarakat. Kelembagaan yang akan dibentuk berupa UPTD untuk Pengelola IPLT, KSM untuk Pengelola MCK, MCK++, Tangki Septik Komunal dan Pembentukan Kader-kader ditingkat kelurahan.

Peraturan atau regulasi akan mengatur pengelolaan air limbah secara keseluruhan yang berupa Perda.

Komunikasi yang akan dilakukan berupa kampanye, sosialisasi, edukasi, pemicuan baik secara langsung melalui kader-kader sanitasi maupun melalui siaran radio, televisi, leflet dsb.

• Hitung Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

Contoh: Tabel 3.1 Rencana Kegiatan Air Limbah

Na	Uraian Kariatan	Dotoil Lakasi	Jumlah	Caturan		Tahu	n Pelaksa	anaan		Jumlah
No.	Uraian Kegiatan	Detail Lokasi	Penduduk	Satuan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Volume
	Kegiatan Sasaran BABS 0%									
1	Program Pembangunan Tankiseptik Komunal		7.500 KK	unit	20	20	20	20	20	100
2	Program Pembangunan MCK++		6.000 KK	unit	20	20	20	20	20	100
3	Program Pembangunan MCK		800 KK	unit	20	20	20	20	20	100
4	Kampanye, Pemicuan & Edukasi		15500 KK	Jaga	3020	3020	3020	3020	3020	15100
5	Program STBM		10000 KK	Jaga	2000	2000	2000	2000	2000	10000
	Jumlah penerima manfaat		39500 KK							
6	Program Pembangunan IPLT		207.368 KK	1 unit	0	1	0	0	0	UPTD
7	Pengadaan Truk Tinja		82.947 KK	2 unit	0	1	0	1	0	UPTD
dst										

<u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

Sasaran pelayanan persampahan wilayah perkotaan dari 65% menjadi 85% dan untuk wilayah pedesaan dari 20% menjadi 40% pada akhir perencanaan.

Sasaran yang lain adalah pengurangan sampah wilayah perkotaan dari sumbernya menjadi 5% pada akhir perencanaan.

Pelayanan persampahan akan diprioritaskan untuk daerah perkotaan.

3.2.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Persampahan

- Uraikan dengan ringkas:
 - Rencana Pengurangan Sampah (3R)
 - Rencana Penanganan Sampah : pewadahan, alat angkut, TPS, TPA, dst.
- Lengkapi dengan gambar: (seperti contoh untuk air limbah)
 - Gambar 3.3: Lokasi Infrastruktur Persampahan Existing
 - Gambar 3.4: Peta Lokasi Infrastruktur Persampahan sampai Akhir Perencanaan
- Hitung Kebutuhan Sarana dan Prasarana untuk mencapai sasaran yang ditetapkan sesusi dengan tatacara perhitungan volume yang dapat dipertanggungjawabkan.

3.2.2 Kegiatan Pendukung (Non Fisik) Persampahan

- Uraikan dengan ringkas:
 - Studi dan Perencanaan Teknis
 - Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.

Contoh: Tabel 3.2 Rencana Kegiatan Persampahan

			Jumlah	•		Tahu	n Pelaksa	anaan		
No.	Uraian Kegiatan	Detail Lokasi	Penduduk terlayani	Satuan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Volume
1	Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan		554.708 jiwa	paket	1	1	1	1	1	5
2	Penyusunan Masterplan Persampahan		1.036 jt jiwa	paket	0	1	0	0	0	1
3	Pembangunan TPS 3R dan fasilitasnya		52.500 jiwa	unit	2	2	2	3	4	13
4	Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW		20 desa	paket	1	1	1	1	1	5
5	Pembangunan TPA		554.708 jiwa	unit	0	0	1	0	0	1
6	Pengadaan Alat Angkut		554.708 jiwa	unit	2	6	6	7	7	26
7	Revisi Perda Pengelolaan Persampahan		1.036 jt jiwa	paket	0	0	1	0	0	1
8	Pembangunan TPS		554.708 jiwa	unit	8	50	50	50	64	214
9	Pengadaan Gerobag Sampah/Motor Sampah		554.708 jiwa	unit	35	290	300	300	300	890
dst										

<u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

3.3 Rencana Kegiatan Drainase

3.3.1 Sarana dan Prasarana (Fisik) Drainase

- Uraikan dengan ringkas:
 - Rencana Pembangunan Saluran Drainase
 - Rencana Pembangunan Bangunan Pendukung
- Lengkapi dengan gambar: (seperti contoh untuk air limbah)
 - Gambar 3.5: Lokasi Infrastruktur Drainase Existing
 - Gambar 3.6: Peta Lokasi Infrastruktur Drainase sampai Akhir Perencanaan

3.3.3 Kegiatan Pendukung (Non-Fisik) Drainase

- Uraikan dengan ringkas:
 - Studi dan Perencanaan Teknis
 - Aspek Kelembagaan, Peraturan, Komunikasi, dll.

Contoh: Tabel 3.3 Rencana Kegiatan Drainase

NI-	Harian Vanistan	Datail Labori	Pengurangan	Calaran		Tahu	n Pelaksa	anaan		Instanasi
No.	Uraian Kegiatan	Detail Lokasi	Genangan	Satuan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Pengelola
1	Penyusunan Masterplan Drainase		-	paket	0	1	0	0	0	1
2	Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak		3 Ha	m	1500	0	0	0	0	1500
3	Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo		1 Ha	m	1250	1250	0	0	0	2500
4	Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Kelapa		1.5 ha	m	0	1250	0	0	0	1250
5	Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota		3.25 Ha	m2			4000			4000
6	Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso		0.65 Ha	m	0	0	1250	1250	0	2500
7	Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota.		0,75 Ha	km	0	0	0	15	0	15
8	Pembangunan Saluran tersier Kp. Semit		-	m	0	0	0	0	3500	3500
9	Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota		-	m	0	0	0	0	4000	4000
10	Penyusunan Perda		-	paket	0	0	0	0	1	1
dst	Dst									

<u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

3.4 Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi

Uraikan dengan ringkas Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi

Contoh: Tabel 3.4 Rencana Kegiatan PHBS terkait sanitasi

No.	Urajan Korjatan	Detail Lokasi	Pengurangan	Jumlah/ Volume		Tahu	n Pelaksa	inaan		Instanasi
IVO.	Uraian Kegiatan	Detail Lokasi	Genangan	Kegiatan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Pengelola
1	Program STBM		-	1 paket	0	1	0	0	0	Dinkes
2	Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.		3 Ha	1500 m	1500	0	0	0	0	Dinkes
3	Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah dan Pondok Pesantren		1 Ha	2500 m	1250	1250	0	0	0	Dinkes
4	Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader kesehatan lingkungan ditingkat Kelurahan		1.5 ha	1250 m	0	1250	0	0	0	Dinkes
5	Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio		3.25 Ha	4000 m2			4000			Dinkes
6	Dst		0.65 Ha	2500 m	0	0	1250	1250	0	Dinkes

<u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Bab 4 Rencana Anggaran Pembangunan Sanitasi

Petunjuk Umum

- Bab ini memberikan penjelasan mengenai rencana kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sanitasi (fisik) dan kegiatan pendukungnya (non-fisik).
- Uraikan rencana kegiatan pembangunan air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS secara komprehensif, terutama justifikasi atas kegiatan yang akan dilaksanakan, tujuan dan manfaatnya, dll.
- Lengkapi tabel rencana kegiatan dengan informasi : lokasi kegiatan, kelompok sasaran/ penerima manfaat (*beneficieries*), tahun pelaksanaan, instansi pelaksana, dll. Tabel khusus untuk kegiatan yang penting saja (tidak perlu seluruhnya, tabel lengkap diletakkan di Lampiran)
- Uraikan dengan singkat, dan jelas.
- Penjelasan lebih rinci dapat dimasukkan di dalam lampiran.

4.1 Rekapitulasi Anggaran

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi total anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun, baik berdasarkan sumber anggaran (APBD Kabupaten/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN) maupun jenis kegiatan (air limbah, persampahan, drainase dan PHBS).
- Tabel 4.1 dan 4.2 menjelaskan mengenai hasil rekapitulasi anggaran, per sumber anggaran (APBD Kab/Kota, APBD Provinsi, APBN dan PHLN, Partisipasi Swasta dan Partisipasi Masyarakat) dan rkapitulasi biaya air limbah, persampahan, drainase, dan PHBS terkait sanitasi.
- <u>Catatan</u>: Isian yang ada di dalam tabel dibawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

CONTOH: Tabel 4.1 Rekapitulasi Anggaran per Sumber Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Sumber		T	ahun Anggara	n		Total
INO.	Anggaran	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
A.	Pemerintah						
1	APBD Kab/Kota	15.120	25.141	25.229	20.300	15.164	100.954
2	APBD Provinsi	11.300	40.678	21.877	18.200	31.607	123.662
3	APBN	35.342	155.826	228.367	113.680	102.672	635.342
Juml	ah A	61.762	221.645	275.473	152.180	149.443	860.503
B.	Non-Pemerintah						
1	CSR Swasta	450	550	750	0	0	0
2	Masyarakat	0	0	0	0	0	0
Juml	ah B	0	0	0	0	0	0
Total	(A + B)	61.762	221.645	275.473	152.180	149.443	860.503

CONTOH: Tabel 4.2 Rekapitulasi Anggaran

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan		ī	ahun Anggara	n		Total
		n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
1	Air Limbah	7.475	77.230	136.095	46.030	40.720	307.550
2	Persampahan	9.967	15.470	28.100	16.550	25.345	95.432
3	Draianse	43.760	128.501	110.778	89.000	83.278	455.317
4	PHBS terkait sanitasi	560	444	500	600	100	2.204
Jumla	ah	61.762	221.645	275.473	152.180	149.443	860.503

4.2 Rencana Anggaran Pemerintah

• Catatan: Isian yang ada di dalam tabel dibawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

4.2.1 APBD Kab/Kota

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.3 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Kab/Kota.

CONTOH: Tabel 4.3 Rekapitulasi APBD Kabupaten/Kota

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan		Total Anggaran					
	n+1 n+2 n+3 n+4 n+5							
1	Air Limbah	1200	420	1.445	800	20	3.885	
2	Persampahan	3100	2.500	4.120	1.900	1.950	13.570	
3	Drainase	10.260	21.777	19.164	17.000	13.094	81.295	
4	PHBS terkait sanitasi	560	444	500	600	100	2.204	
Jumla	ah	15.120	25.141	25.229	20.300	15.164	100.954	

4.2.2 APBD Provinsi

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBD Provinsi yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.4 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBD Provinsi.

CONTOH: Tabel 4.4 Rekapitulasi APBD Provinsi

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan		T	ahun Anggara	n		Total
IVO.	Oralan Regiatan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
1	Air Limbah	925	13.160	2.500	3.000	1.500	21.085
2	Persampahan	1.025	1.300	2.840	3.200	15.020	23.385
3	Drainase	9.350	26.218	16.537	12.000	15.087	79.192
4	PHBS terkait sanitasi		-	-	-	-	-
Jumla	ah	11.300	40.678	21.877	18.200	31.607	123.662

4.2.3 APBN

- Berisi penjelasan mengenai rekapitulasi APBN dan PHLN yang dibutuhkan untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.5 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui APBN.

CONTOH: Tabel 4.5 Rekapitulasi APBN

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan		Ţ	ahun Anggara	n		Total
NO.	Oralan Regiatan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
1	Air Limbah	5.350	63.650	132.150	42.230	39.200	282.580
2	Persampahan	5.842	11.670	21.140	11.450	8.375	58.477
3	Drainase	24.150	80.506	75.077	60.000	55.097	294.830
4	PHBS terkait sanitasi		-	-	-	-	-
Jumla	ah	35.342	155.826	228.367	113.680	102.672	635.887

4.3 Rencana Anggaran Non-Pemerintah

• Catatan: Isian yang ada di dalam tabel dibawah ini hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

4.3.1 Potensi Kontribusi Swasta dan BUMN/D

- Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan swasta untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.6 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi swasta.

Tabel 4.6 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Partisipasi Swasta

X Rp. 1 Juta

No.	Urajan Kagiatan		Total				
IVO.	Uraian Kegiatan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
1	Air Limbah						
2	Persampahan						
3	Drainase						
4	PHBS terkait sanitasi						
Jumla	ah						

4.3.2 Potensi Kontribusi Masyarakat

- Berisi penjelasan mengenai potensi pendanaan masyarakat untuk pembangunan sanitasi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- Tabel 4.7 menjelaskan rekapitulasi pendanaan sanitasi melalui partisipasi Masyarakat.

Tabel 4.7 Rekapitulasi Pendanaan Sanitasi Masyarakat

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian Kegiatan		Total				
NO.	Oralan Kegialan	n+1	n+2	n+3	n+4	n+5	Anggaran
1	Air Limbah						
2	Persampahan						
3	Drainase						
4	PHBS terkait sanitasi						
Juml	ah						

4.4 Antisipasi Funding-Gap

 Berisi penjelasan mengenai kemungkinan terjadinya Funding Gap bila jumlah anggaran yang dibutuhka jauh lebih besar daripada yang tersedia. Di bagian akhir dijelaskan mengenai langkahlangkah yang harus dilakukan untuk mengurangi kesenjangan (gap) tersebut.

CONTOH: Tabel 4.8 Funding Gap APBD Kabupaten/Kota

X Rp. 1 Juta

No.	Uraian		Total Anggaran				
		n+1					
1	Kebutuhan Pendanaan	15.120	25.141	25.229	20.300	15.164	100.954
2	Kemampuan Pendanaan						
3	Selisih (Rp)						
4	Selisih (%)						

Bab 5

RENCANA IMPLEMENTASI

Bab ini menguraikan rencana tindak yang akan dan perlu dilakukan dalam rangka <u>persiapan tahap</u> implementasi, utamanya untuk program dan kegiatan yang <u>sudah ada kesepakatan</u> dan alokasi penganggarannya. Khusus tahapan proses terkait pengawalan Anggaran Tahun (n+2) dan (n+3)

Khusus untuk Bab ini difokuskan untuk rencana implementasi Tahun n+2 dan n+3. Untuk tahun-tahun selanjutnya perlu dilakukan updating dan dipersiapkan secara detail pada dokumen MPS Tahunan.

5.1 Kondisi Kesiapan Pelaksanaan

- Berisi penjelasan mengenai kesiapan implementasi (pelaksanaan) yang mencakup ketersediaan Studi dan Perencanaan Teknis (DED, AMDAL, dll), lahan, organisasi pelaksana, organisasi pengelola, anggaran, surat-surat pernyataan (surat minat, surat kesediaan menerima aset, surat kesediaan menyediakan anggaran O&M), dll.
- Tabel 5.1 menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun (n+2)
- Tabel 5.2 menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun (n+2)
- Tabel 5.3 menjabarkan status kesiapan dalam mekanisme penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan tahun (n+3)
- Tabel 5.4 menjabarkan status kesiapan pelaksanaan kegiatan infrastruktur untuk tahun (n+3)

CONTOH:

Sesuai dengan kesepakatan pendanaan yang telah disepakati, beberapa pekerjaaan akan diimplementasi kan dengan dukungan Jasa Pengadaan, baik berupa pengadaan Barang ataupun Jasa. Sub bab berikut berisi "daftar centang" persiapan tersebut, a.l dalam bentuk daftar centang ketersediaan Deskripsi Singkat Program/Kegiatan, yang diperlukan sebagai materi acuan penyiapan dokumen Kerangka Acuan Kerja untuk proses Pelelangan oleh para Pemegang Mata Anggaran Terkait.

Hal lain kebutuhan Daftar Centang terutama terkait Kriteria Kesiapan alokasi pendanaan dan administrasi pendukung lainnya. Penunjukan Dinas/ Person Penanggung Jawab untuk melakukan koordinasi dan tindak lanjutan perlu disepakati sejak awal.

CONTOH:

Tabel 5.1 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+2 (tahun depan misal 2015)

(khusus sumber dana dari Pemerintah)

(Kriusus sumber dana dan remerintan)		Kriter	ia Kesiapan	dalam Mek	anisme Pen	ganggaran	Reguler	Penanggung
Kegiatan	Pemegang Mata Anggaran	Renja SKPD	Musren bang	APBI RPIJM	N PU Konreg	RKA	DPA	Jawab / Tindak Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AIR LIMBAH		1	1					
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Air Limbah	Dinkes	V	V	Χ	Х	V	-	Dinkes
Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah	KLH	V	V	Χ	X	V	-	KLH
Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 2 unit (SANIMAS)	Satker PLP	Х	V	V	V	V	-	PU
Sambungan Rumah	Dinas PU	V	V	Χ	Χ		-	PU
Pembangunan MCK++ 2 unit (SANIMAS)	Satker PLP	Х	V	V	V	V	-	PU
Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS)	Satker Perumahan	Х	V	V	V	V	-	PU
Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT	Dinas PU	V	V	V	Χ	V	-	PU
Perda Pengelolaan Air Limbah	DKP	V	V	Χ	Х	-	-	PU, Sekda
Dst								
PERSAMPAHAN								
Penyusunan Masterplan Persampahan	DKP	V	V	V	V	-	-	DKP
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan	Diskes	V	V	Χ	Χ	V	-	Dinkes
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	DKP	V	V	Х	Χ	V	-	DKP
Pembangunan TPST 3R Sidomukti dan fasilitasnya	Satker PLP	V	V	V	V	V	-	Satker, PU, DKP
Pembentukan dan Pelatihan KSM Pengelola TPST 3R	Satker PLP	V	V	V	V	V	-	Satker, DKP
Studi Kelayakan TPA Margorejo	Dinas PU	V	V	V	V	V	-	PU, DKP
Studi UKL/UPL TPA Margorejo	KLH	V	V	V	V	V	-	PU, DKP, KLH
Pembebasan Lahan untuk TPA	BKAD	V	V	V	V	V	-	BKAD, BPN
Pengadaan Amroll Truck 2 unit	DKP	V	V	Х	Χ	V	-	DKP
Pengadaan kontainer 6 unit	DKP	V	V	Х	Χ	V	-	DKP
Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi	Dinas PU	V	V	X	Χ	V	-	PU, DKP
Revisi Perda Pengelolaan Persampahan	DKP	V	V	Х	Χ	V	-	DKP, Sekda, Biro Hukum
Dst								

	Domogona	Kriter	ia Kesiapan	dalam Mek	anisme Pen	ganggaran	Reguler	Penanggung
Kegiatan	Pemegang Mata Anggaran	Renja	Musren	APBN PU	APBN PU		DPA	Jawab / Tindak
	Wata Anggaran	SKPD	bang	RPIJM	Konreg	RKA	DFA	Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DRAINASE								
Review Masterplan Sistem Drainase	Dinas PU	V	V	Χ	Χ	V	-	Dinas PU
Perencanaan Detail Sal. Drainase Primer Sidodadi	Dinas PU	V	V	V	V	V	-	Dinas PU
Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak	Satker PLP	TP	V	-	-	-	-	Dinas PU
Pembebasan Lahan Kolam Retensi	BKAD	V	V	-	Χ	V	-	Dinas PU
Pengerukan sedimen sal. drainase tersier Kp. Pandaan	Dinas PU	V	V	Χ	Χ	V	-	Dinas PU
Penyusunan Perda Pengelolaan Sistem Drainase	Dinas PU	V	V	Χ	Χ	V	-	Dinas PU
Pembentukan KSM Pengelola Sistem Drainase tersier Mandiri	Dinas PU	V	V	Х	Х	V	-	Dinas PU
Dst								
PHBS								
Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio	Dinkes	V	V	Х	Х	V	-	Dinkes
STBM	Dinkes	V	V	Χ	Χ	V	-	Dinkes
Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	Dinkes	V	V	Х	Х	V	-	Dinkes
Ost								

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Keterangan:

- "V": Sudah ada/siap; "-": Tidak ada/belum siap; "X": Tidak perlu
- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para "Penanggung Jawab" berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.

CONTOH:

Tabel 5.2 Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+2

(khusus sumber dana dari Pemerintah)

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)	Lokasi	Master plan	Review RPIJM	Dok. FS	Dok. Studi Lingku- ngan	DED	Lahan	Kesia- pan Masy.	Kesiapan Lembaga Pengelola	Penanggung jawab/ Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AIR LIMBAH										
Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 2 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Х	-	-	-	Diskimtaru
Sambungan Rumah		Χ	V	Х	Χ	Χ	-	-	-	Diskimtaru
Pembangunan MCK++ 2 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Χ	-	-		
Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Χ	-	-	-	
Dst										
PERSAMPAHAN										
Pembangunan TPS 3 Sidomukti dan fasilitasnya		Х	V	Х	Χ	-	-	V	-	DKP
Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi		Х	V	Х	Χ	Χ	V	V	V	DKP
Dst										
DRAINASE										
Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak		V	V	Х	Х	Х	V	V	-	
Dst										

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Keterangan:

- "V": Sudah ada/siap; "-": Tidak ada/belum siap; "X": Tidak perlu
- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para "Penanggung Jawab" berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.

CONTOH:

Tabel 5.3 Kriteria Kesiapan dalam Mekanisme Penganggaran n+3 (misal 2016)

(khusus sumber dana dari Pemerintah)

		Kriter	ia Kesiapan	dalam Mek	anisme Pen	ganggaran	DPA	Penanggung
Kegiatan	Pemegang Mata Anggaran	Renja	Musren	APB	N PU	DIA	DDA	Jawab / Tindak
	iviala Allyyarali	SKPD	bang	RPIJM	Konreg	RKA	DPA	Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AIR LIMBAH								
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Air Limbah	Dinkes	V	V	Х	Χ	-	-	Dinkes
Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah	KLH	V	V	Χ	Χ	-	-	KLH
Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 3 unit (SANIMAS)	Satker PLP	Х	V	V	V	-	-	PU
Sambungan Rumah	Dinas PU	V	V	Х	Χ	-	-	PU
Pembangunan MCK++ 3 unit (SANIMAS)	Satker PLP	Х	V	V	V	-	-	PU
Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS)	Satker Perumahan	Х	V	V	V	-	-	PU
Dst								
PERSAMPAHAN								•
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan	Diskes	V	V	Х	Χ	-	-	Dinkes
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	DKP	V	V	Х	Х	-	-	DKP
Pembangunan TPS 3R Hadiluwih dan fasilitasnya	Satker PLP	V	V	V	V	-	-	Satker, PU, DKP
Pembentukan dan Pelatihan KSM Pengelola TPS 3R	Satker PLP	V	V	V	V	-	-	Satker, DKP
Pembangunan TPA Margorejo	Dinas PU	V	V	V	V	-	-	PU, DKP
Pengadaan Amroll Truck 2 unit	DKP	V	V	-	-	-	-	DKP
Pengadaan kontainer 8 unit	DKP	V	V	-	-	-	-	DKP
Pembangunan Landasan Kontainer 4 lokasi	DKP	V	V	-	-	-	-	PU, DKP
Dst								
DRAINASE								
Pembangunan Sal. Drainase Primer Sidodadi	Dinas PU	V	V	V	V	V	-	Dinas PU
Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak Tahap-2	Satker PLP	X	V	-	-	-	-	Dinas PU
Pembangunan Kolam Retensi	BKAD	V	V	-	-	V	-	Dinas PU
Pembentukan KSM Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri	Dinas PU	V	V	-	-	V	-	Dinas PU
Dst								

	_	Kriter	ia Kesiapan	dalam Mek	anisme Pen	ganggaran	Reguler	Penanggung
Kegiatan	Pemegang Mata Anggaran	Renja	Musren	APBN PU		RKA	DPA	Jawab / Tindak
	Wata 7 inggaran	SKPD	bang	RPIJM	Konreg	IXIXA	DIA	Lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9
PHBS								
Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio	Dinkes	V	V	Х	Х	-	-	Dinkes
STBM	Dinkes	V	V	Χ	Χ	-	-	Dinkes
Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	Dinkes	V	V	Х	Х	-	-	Dinkes
Dst								

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Keterangan:

- "V": Sudah ada/siap; "-": Tidak ada/belum siap; "X": Tidak perlu
- Kolom 9: Person / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para "Penanggung Jawab" berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.

CONTOH:

Tabel 5.4: Kriteria Kesiapan Implementasi Infrastruktur tahun n+3

(khusus sumber dana dari Pemerintah)

Rencana Kegiatan (sesuai dengan MPS)	Lokasi	Master plan	Review RPIJM	Dok. FS	Dok. Studi Lingku- ngan	DED	Lahan	Kesia- pan Masy.	Kesiapan Lembaga Pengelola	Penanggung jawab/ Tindak lanjut
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
AIR LIMBAH										
Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya 3 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Х	-	-	-	Diskimtaru
Sambungan Rumah		Х	V	Х	Х	Χ	-	-	-	Diskimtaru
Pembangunan MCK++ 3 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Χ	-	-	-	
Pembangunan MCK 3 unit (SANIMAS)		Х	V	Х	Х	Х	-	-	-	
Dst										
PERSAMPAHAN										
Pembangunan TPS 3R Sidomukti dan fasilitasnya		Х	V	Χ	Х	-	-	-	-	DKP
Pembangunan TPA Margorejo		V	V	V	V	-	V	-	-	
Pembangunan Landasan Kontainer 4 lokasi		Х	V	Χ	Х	Χ	V	-	-	DKP
Dst										
DRAINASE										
Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Sidodadi		V	V	Х	Х	-	V	-	V	Dinas PU
Pembangunan Sal. Drainase Primer Kali Mancak Tahap-2		V	V	Х	Х	V	V	-	V	
Pembangunan Kolam Retensi		V	V	V	V	-	-	-	V	
Dst										

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Keterangan:

- "V": Sudah ada/siap; "-": Tidak ada/belum siap; "X": Tidak perlu
- Kolom 11: Orang / Dinas Penanggung Jawab untuk Koordinator Tindak Lanjut / Pengawalan.
- Para "Penanggung Jawab" berkewajiban memberikan laporan secara rutin Daftar Centang ini kepada Pokja tembusan para pemegang Mata Anggaran. Hasil akhir yan diinginkan adalah kepastian implementasi dari Kegiatan tersebut.

5.1.1 Studi & Disain, dan Dokumen Tender

- Berisi penjelasan kebutuhan Studi dan Disain Teknis (Masterplan, DED, AMDAL, dll) guna mendukung pelaksanaan suatu kegiatan.
- Tabel 5.3 menjabarkan status Studi dan Disain Teknis yang dibutuhkan penyusunannya segera untuk memenuhi persyaratan "Readiness Criteria."

CONTOH:

Tabel 5.3: Kriteria Kesiapan Studi dan Perencanaan Teknis (contoh)

No.	Studi dan Perencanaan Teknis	Tahun Imple- mentasi	Lokasi	Pelaksana	ToR	SKPD Penanggung jawab
1	UKL/UPL IPLT	n+2	Kel Cempaka	Konsultan	tersedia	Bappeda
2	DED IPLT (dan dokumen tender)	n+3	Kel Cempaka	Konsultan	belum ada	Din. PU
3	Review Master Plan Air Limbah	n+2	Kabupaten	Konsultan	tersedia	Din. PU
4	AMDAL TPA Sanitary Landfill	n+2	Kel Anggrek	Konsultan	belum ada	Bappeda
5	Studi Kelembagaan & Peraturan	n+3	Kabupaten	Swakelola	belum ada	Bappeda
6	Studi		Kabupaten	Swakelola	tersedia	

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

5.1.2 Pembebasan Lahan dan Resettlement

- Berisi penjelasan mengenai permasalahan pembebasan lahan dan *resettlement* (bila ada) yang harus segera ditangani agar Kegiatan/Proyek tidak tertunda atau bermasalah di kemudian hari.
- Tabel 5.4 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pertanahan dan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

CONTOH:

Tabel 5.4: Identifikasi Permasalahan Lahan (contoh)

No.	Kegiatan	Lokasi	Luas	Land Use	Kendala	Penanganan	SKPD Penanggung jawab
1	IPLT baru	Kel	2 Ha	Permukiman	Harga terlalu	Ada alternatif	
'	IF LI Dalu	Cempaka	2110	Fermuniman	tinggi/mahal	lokasi lain	
2	TPA baru	Kel Anggrek	5 Ha	Kebun/Hutan	Harga dan penolakan masyarakat	Sosialisasi & ganti- rugi	
3	Normalisasi saluran	Sepanjang saluran	3 Ha	Permukiman	Penolakan masyarakat	sosialisasi & Resettlement	

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

5.1.3 Kesiapan Organisasi Pengelola

- Berisi penjelasan mengenai penyiapan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun, dapat berupa perluasan dari organisasi yang ada atau organisasi yang sama sekali baru.
- Penyiapan organisasi baru ini termasuk pernyataan akan kesediaan menerima aset (bila ada), penyediaan anggaran operasional dan pemeliharaan (O&M), regulasi, dll.
- Tabel 5.5 menjabarkan hasil identifikasi permasalahan pembentukan dan/atau penguatan organisasi pengelola prasarana dan sarana sanitasi yang akan dibangun.

CONTOH:

Tabel 5.5: Pembentukan dan/atau Penguatan Organisasi Pengelola (Contoh)

No.	Kegiatan	Lokasi	Instansi	Kendala	Keterangan
1	IPLT baru	Kel Cempaka	DKP	Ada, tapi belum efektif	
2	TPA baru	Kabupaten	DKP	Belum terbentuk	Instansi baru
3	MCK Komunal	Kel Anggrek	KSM	Perlu penguatan	
4	IPAL Kawasan/Kota	Kec Bunga	PD PAL	Belum terbentuk	Instansi baru
	Dst				

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

5.2 Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi

- Berisi penjelasan mengenai rencana dan tata cara melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan MPS, misalnya: pelaksanaan rapat koordinasi, pengawalan anggaran, solusi funding gap, promosi dan sosialisasi, dll. Hal ini untuk memastikan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana.
- Gambar 5.1 menyajikan rencana kerja monitoring dan evaluasi sepanjang tahun.

CONTOH:

Gambar 5.1: Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi Tahunan Tahun (n+2)

		<u> </u>				•							
Kegiatan Monev Tahunan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nop	Des	Ket.
Rapat Koordinasi													
Pengawalan Penganggaran													
- Musrenbang													
- Review RPIJM													
- Renja SKPD													
- RKA													
- DPA													
- dst													
Melengkapi Readiness Criteria													
Solusi Funding Gap													
Promosi/Sosialisasi													
Updating MPS Tahunan													
Dst													

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

Lampiran-lampiran

CONTOH:

Lampiran A: Kerangka Kerja Logis (KKL)

Permasalahan mendesak sanitasi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program	Kegiatan

Lampiran B: Perhitungan Prioritasi

Contoh: Perhitungan Prioritasi Air Limbah

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan	Total Score	Prioritas
	15%	15%	15%	15%	20%	20%		
Program Pembangunan IPAL Komunal	1	4	4	3	2	4	18	1
Penilaian	0.15	0.6	0.6	0.45	0.4	0.8	3	1
Program Pembangunan MCK++	2	4	4	4	2	4	20	1
Penilaian	0.3	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	3.3	1
Program Pembangunan MCK	1	4	4	4	2	4	19	1
Penilaian	0.15	0.6	0.6	0.6	0.4	0.8	3.15	1
Penyuluhan, Kampanye & Edukasi	2	2	3	3	4	4	18	1
Penilaian	0.3	0.3	0.45	0.45	0.8	0.8	3.1	1
Program Pembangunan IPLT	2	3	3	1	4	4		2
Penilaian	0.3	0.45	0.45	0.15	0.8	0.8	2.95	2
Pembentukan Badan Pengelola IPLT	2	3	3	1	4	4	17	2
Penilaian	0.3	0.45	0.45	0.15	0.8	0.8	2.95	2
Penyusunan Perda	3	2	2	1	4	2	14	2
Penilaian	0.45	0.3	0.3	0.15	0.8	0.4	2.4	2

Contoh: Perhitungan Prioritasi Air Limbah

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima	Permasalahan	Persepsi	Dro noor	Readiness	Kesiapan		
Program, Regiatan	manfaat	mendesak	Pokja	Pro-poor	Criteria	pendanaan	Total Score	Prioritas
	15%	15%	15%	15%	20%	20%		
Program Pembangunan MCK++	2	4	4	4	2	4	3.3	1
Program Pembangunan MCK	1	4	4	4	2	4	3.15	1
Penyuluhan, Kampanye & Edukasi	2	2	3	3	4	4	3.1	1
Program Pembangunan IPAL Komunal	1	4	4	3	2	4	3	1
Program Pembangunan IPLT	2	3	3	1	4	4	2.95	2
Pembentukan Badan Pengelola IPLT	2	3	3	1	4	4	2.95	2
Penyusunan Perda	3	2	2	1	4	2	2.4	2

Contoh: Perhitungan Prioritasi Persampahan

contoni i crintangan i nortasi i crisampanan				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan		Prioritas
	15%	15%	15%	15%	20%	20%	Total Score	
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan	3	4	4	3	4	3		1
Penilaian	0.45	0.6	0.6	0.45	0.8	0.6	3.5	
Penyusunan Masterplan Persampahan	4	4	4	2	4	2		1
Penilaian	0.6	0.6	0.6	0.3	0.8	0.4	3.3	1
Pembangunan TPST 3R Sidomukti dan fasilitasnya	1	3	3	3	4	4		1
Penilaian	0.15	0.45	0.45	0.45	0.8	0.8	3.1	
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	2	2	3	3	4	4		1
Penilaian	0.3	0.3	0.45	0.45	0.8	0.8	3.1	•
Pembangunan TPA	4	4	4	3	2	2		1
Penilaian	0.6	0.6	0.6	0.45	0.4	0.4	3.05	1
Pengadaan Amroll Truck 1 unit	2	3	4	1	4	3		2
Penilaian	0.3	0.45	0.6	0.15	0.8	0.6	2.9	2
Pengadaan kontainer 3 unit	2	4	4	1	4	2		2
Penilaian	0.3	0.6	0.6	0.15	0.8	0.4	2.85	2
Pengadaan Amroll Truck 2 unit	2	2	2	1	4	2		2
Penilaian	0.3	0.3	0.3	0.15	0.8	0.4	2.25	2
Pengadaan kontainer 3 unit	2	2	2	1	4	2		2
Penilaian	0.3	0.3	0.3	0.15	0.8	0.4	2.25	
Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi	2	2	2	1	4	2		2
Penilaian	0.3	0.3	0.3	0.15	0.8	0.4	2.25	2
Revisi Perda Pengelolaan Persampahan	3	2	2	1	4	2		2
Penilaian	0.45	0.3	0.3	0.15	0.8	0.4	2.4	
Pembangunan TPST 3R Kec. Madiraja dan fasilitasnya	1	2	1	2	2	2		3
Penilaian	0.15	0.3	0.15	0.3	0.4	0.4	1.7	•

Contoh: Perhitungan Prioritasi Persampahan

				Score (dar	bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan		Prioritas
	15%	15%	15%	15%	20%	20%	Total Score	
Penyuluhan, Kampanye dan Edukasi Persampahan	3	4	4	3	4	3	3.50	1
Penyusunan Masterplan Persampahan	4	4	4	2	4	2	3.30	1
Pembangunan TPST 3R Sidomukti dan fasilitasnya	1	3	3	3	4	4	3.10	1
Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	2	2	3	3	4	4	3.10	1
Pembangunan TPA	4	4	4	3	2	2	3.05	1
Pengadaan Amroll Truck 1 unit	2	3	4	1	4	3	2.90	2
Pengadaan kontainer 3 unit	2	4	4	1	4	2	2.85	2
Pengadaan Amroll Truck 2 unit	2	2	2	1	4	2	2.25	2
Pengadaan kontainer 3 unit	2	2	2	1	4	2	2.25	2
Pembangunan Landasan Kontainer 2 lokasi	2	2	2	1	4	2	2.25	2
Revisi Perda Pengelolaan Persampahan	3	2	2	1	4	2	2.40	2
Pembangunan TPST 3R Kec. Madiraja dan fasilitasnya	1	2	1	2	2	2	1.70	3

Contoh: Perhitungan Prioritasi Pembangunan Drainase

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan	Total Score	Prioritas
	20%	15%	15%	10%	20%	20%		
Penyusunan Masterplan Drainase	4	4	4	2	4	4		1
Penilaian	0.8	0.6	0.6	0.2	0.8	0.8	3.8	1
Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak	4	4	4	4	3	4		1
Penilaian	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	0.8	3.8	
Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo	3	4	4	3	3	4		1
Penilaian	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.8	3.5	1
Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Kelapa	4	3	3	4	2	4		1
Penilaian	0.8	0.45	0.45	0.4	0.4	0.8	3.3	
Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota	4	3	3	3	2	4		1
Penilaian	0.8	0.45	0.45	0.3	0.4	0.8	3.2	1
Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso	3	3	3	2	4	3		1
Penilaian	0.6	0.45	0.45	0.2	0.8	0.6	3.1	1
Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota.	2	2	3	2	4	3		2
Penilaian	0.4	0.3	0.45	0.2	0.8	0.6	2.75	
Pembangunan Saluran tersier Kp. Semit	2	3	3	4	2	2		
Penilaian	0.4	0.45	0.45	0.4	0.4	0.4	2.5	2
Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota	2	2	3	3	2	2		
Penilaian	0.4	0.3	0.45	0.3	0.4	0.4	2.25	2
Penyusunan Perda	2	2	2	1	2	2		2
Penilaian	0.3	0.3	0.3	0.15	0.4	0.4	1.85	3

Contoh: Perhitungan Prioritasi Pembangunan Drainase

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan	Total Score	Prioritas
	20%	15%	15%	10%	20%	20%		
Penyusunan Masterplan Drainase	4	4	4	2	4	4	3.80	1
Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Mancak	4	4	4	4	3	4	3.80	1
Pembangunan Saluran Sekunder Margorejo	3	4	4	3	3	4	3.50	1
Pembangunan/Normalisasi Saluran Primer Kali Kelapa	4	3	3	4	2	4	3.30	1
Pembangunan Kolam Retensi Kel. Kota	4	3	3	3	2	4	3.20	1
Pembangunan Saluran Sekunder Margoyoso	3	3	3	2	4	3	3.10	1
Pengerukan Sedimen Sal. Drainase Kp. Bandan Kel. Kota.	2	2	3	2	4	3	2.75	2
Pembangunan Saluran tersier Kp. Semit	2	3	3	4	2	2	2.50	2
Pembangunan Saluran tersier RW. III Kel. Kota	2	2	3	3	2	2	2.25	2
Penyusunan Perda	2	2	2	1	2	2	1.85	3

Contoh: Perhitungan Prioritasi Prohisan/PHBS

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima	Permasalahan	Persepsi	Pro-poor	Readiness	Kesiapan		
Frogram, Regiatan	manfaat	mendesak	Pokja	F10-p001	Criteria	pendanaan	Total Score	Prioritas
	20%	15%	15%	10%	20%	20%		
Program STBM	4	4	4	4	4	4		1
Penilaian	0.8	0.6	0.6	0.4	0.8	0.8	4	1
Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	3	4	4	3	3	4		1
Penilaian	0.6	0.6	0.6	0.3	0.6	0.8	3.5	•
Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah dan								
Pondok Pesantren	4	3	3	2	4	3		1
Penilaian	0.8	0.45	0.45	0.2	0.8	0.6	3.3	
Penyuluhan dan Sosialisasi PHBS kepada ditingkat								
Kelurahan	3	3	3	3	2	4		1
Penilaian	0.6	0.45	0.45	0.3	0.4	0.8	3	
Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat								
(PHBS) melalui siaran TV dan Radio	4	2	3	3	4	1		2
Penilaian	0.8	0.3	0.45	0.3	0.8	0.2	2.85	

Contoh: Perhitungan Prioritasi Prohisan/PHBS

				Score (dar	n bobot)			
Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasalahan mendesak	Persepsi Pokja	Pro-poor	Readiness Criteria	Kesiapan pendanaan	Total Score	Prioritas
	20%	15%	15%	10%	20%	20%		
Program STBM	4	4	4	4	4	4	4.00	1
Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	3	4	4	3	3	4	3.50	1
Penyuluhan dan edukasi PHBS kepada Sekolah dan Pondok Pesantren	4	3	3	2	4	3	3.30	1
Penyuluhan, edukasi dan pembentukan kader ditingkat Kelurahan	3	3	3	3	2	4	3.00	1
Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) melalui siaran TV dan Radio	4	2	3	3	4	1	2.85	2

Lampiran C: Perhitungan Volume Kebutuhan Infrastruktur CONTOH PERHITUNGAN:

Lampiran C.1: AIR LIMBAH

BABS 2012 177.211 jiwa 35.442 KK

Asumsi Pertumbuhan praktek BABS sama dengan laju pertumbuhan penduduk : 1.78%

Prediksi BABS pada tahun 2018 (0 %)

196.999 jiwa 39.400 KK

CONTOH: PERHITUNGAN KEBUTUHAN KEGIATAN AIR LIMBAH

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laju Pertumbuhan Penduduk		1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	932.688	949.290	966.187	983.385	1.000.890	1.018.705	1.036.838
Jumlah Penduduk (KK)	186.538	189.858	193.237	196.677	200.178	203.741	207.368
BABS	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Jumlah Penduduk BABS (Jiwa)	177.211	180.365	183.576	186.843	190.169	193.554	196.999
Jumlah Penduduk BABS (KK)	35.442	36.073	36.715	37.369	38.034	38.711	39.400
Program Pembangunan Tankiseptik Komunal			20	20	20	20	20
Pnerima Manfaat Tangkiseptik komunal (KK)			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Program Pembangunan MCK++ (KK)			20	20	20	20	20
Penerima manfaat MCK++			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Program Pembangunan MCK			20	20	20	20	20
Penerima manfaat MCK (KK)			160	160	160	160	160
Penyuluhan, Kampanye & Edukasi (KK)			3.020	3.020	3.020	3.020	3.020
Program STBM (KK)			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Pembangunan Sistem Air Limbah Tepusat			7.880	7.880	7.880	7.880	7.880
TOTAL PENERIMA MANFAAT (KK)							39.400

CONTOH: REKAPITULASI PENERIMA MANFAAT

No	Kegiatan	Volur	ne	Penerima	a Manfaat
	Program Pembangunan Tankiseptik Komunal	100	unit	7.500	KK
	Program Pembangunan MCK++	100	unit	6.000	KK
	Program Pembangunan MCK	100	unit	800	KK
	Penyuluhan, Kampanye & Edukasi			15.100	Jaga
	Program STBM			10.000	Jaga
	Pembangunan Sistem Air Limbah Tepusat				
	Jumlah Penerima manfaat			39.400	

PERHITUNGAN IPLT

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laju Pertumbuhan Penduduk		1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	932.688	949.290	966.187	983.385	1.000.890	1.018.705	1.036.838
Jumlah Penduduk (KK)	186.538	189.858	193.237	196.677	200.178	203.741	207.368
BABS	19%	19%	19%	19%	19%	19%	19%
Jumlah Penduduk BABS (Jiwa)	177.211	180.365	183.576	186.843	190.169	193.554	196.999
Jumlah Penduduk BABS (KK)	35.442	36.073	36.715	37.369	38.034	38.711	39.400
Sasaran	3%	4%	7%	12%	20%	30%	40%
Jumlah Penduduk terlayani	27.981	37.972	67.633	118.006	200.178	305.612	414.735
Produksi Lumpur Tinja (65 gr/org/hr) - ton	1.82	2.47	4.40	7.67	13.01	19.86	26.96
Jumlah truk	0.15	0.21	0.37	0.64	1.08	1.66	2.25
Dibulatkan	1	1	1	1	1	2	2

CONTOH PERHITUNGAN:

Lampiran C.2: Persampahan

PERSAMPAHAN

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Laju Pertumbuhan Penduduk		1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
Jumlah Penduduk (Jiwa)	932.688	949.290	966.187	983.385	1.000.890	1.018.705	1.036.838
Jumlah Penduduk (KK)	186.538	189.858	193.237	196.677	200.178	203.741	207.368
Produksi Sampah Total (ton)	2.332	2.373	2.415	2.458	2.502	2.547	2.592

PERHITUNGAN KEBUTUHAN PELAYANAN PERSAMPAHAN

				Tahun			
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
PELAYANAN PERSAMPAHAN PERKOTAAN							
Laju Pertumbuhan Penduduk Perkotaan		1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
Jumlah Penduduk Perkotaan (Jiwa)	279.806	284.787	289.856	295.015	300.266	305.611	311.051
Produksi Sampah Perkotaan (ton)	2.332	2.373	2.415	2.458	2.502	2.547	2.592
Produksi Sampah Perkotaan (ton)	700	712	725	738	751	764	778
Sasaran pelayanan persampahan perkotaan	60%	62%	65%	69%	74%	79%	85%
Produksi Sampah Perkotaan yang akan ditangani (ton)	420	441	471	509	555	604	661
Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 1.5 ton/hari - (unit)	280	294	314	339	370	402	441
Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. 6.25 ton/hari	67	71	75	81	89	97	106
Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. 8 ton/hr	8	9	9	10	11	12	13
PELAYANAN PERSAMPAHAN PEDESAAN							
Laju Pertumbuhan Penduduk Pedesaan		1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%	1.78%
Jumlah Penduduk Pedesaan (Jiwa)	652.882	664.503	676.331	688.370	700.623	713.094	725.787
Produksi Sampah Pedesaan (ton)	1.632	1.661	1.691	1.721	1.752	1.783	1.814
Sasaran pelayanan persampahan pedesaan	20%	21%	23%	26%	30%	35%	40%
Produksi Sampah Pedesaan yang akan ditangani (ton)	326	349	389	447	525	624	726
Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 1.5 ton/hari - (unit)	218	233	259	298	350	416	484
Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. 6.25 ton/hari	52	56	62	72	84	100	116
Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. 8 ton/hr	7	7	8	9	11	12	15
Total Sampah yang akan ditangani (ton)	746	790	860	956	1.081	1.228	1.387
Kebutuhan Gerobag Sampah/Motor Sampah, @ kap. 1.5 ton/hari - (unit)	497	527	573	638	721	818	925
Kebutuhan TPS (TPS biasa & Kontainer), @ kap. 6.25 ton/hari	119	126	138	153	173	196	222
Kebutuhan alat angkut (truk sampah & Amroll), kap. 8 ton/hr	15	16	17	19	22	25	28
PENGURANGAN SAMPAH DARI SUMBERNYA							
Sasaran Pengurangan Sampah dari sumbernya pada wilayah perkotaan	0.10%	0.50%	1.40%	2.30%	3.20%	4.10%	5%
Volume sampah yang diolah (ton)	2.33	11.87	33.82	56.54	80.07	104.42	129.60
Kebutuhan TPST 3R, @ Kap. 10 ton/hari	1	1	3	6	8	10	13
Jumlah Penduduk terlayani TPST 3R	933	4.746	13.527	22.618	32.028	41.767	51.842

Lampiran D: Program Jangka Menengah *CONTOH:*

Lampiran ini berisi **Tabel Program dan Kegiatan** yang sudah di sinkronkan dan di koordinasikan dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk kesepakatan untuk dukungan dalam implementasi program kegiatan dan komitmen untuk dukungan pendanaan.

Setelah tercapainya konsensus ini, Pokja tetap harus melakukan "pengawalan" agar semua Program Kegiatan yang sudah mencapai kesepakatan dapat masuk ke Dokumen Perencanaan maupun Dokumen Penganggaran Tahunan, baik tingkat Kab/Kota, Provinsi maupun Pusat.

Lampiran D.1: Tabel Program dan Kegiatan Sanitasi Kab / Kota xx

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI JANGKA MENENGAH

Kab. / Kota : (nama kab./kota)
Provinsi : (nama provinsi)
Tahun : (tahun disusunnya MPS)

																					Halaman	dari
		DETAIL LOKASI	Estimasi (Outcome		Ke	butuhan l	Penangai	nan meny	eluruh			In	dikasi Bia	aya (juta r	upiah)		Su	mber Pendan	aan/Pembiay	aan (juta rupia	ih)
NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	(Kec./Desa/Kel./Kws)	Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATU AN			Volume			Total Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Jumlah	кота	PROV.	APBN	SWASTA/C SR	MASYARA KAT
1	2	3	4	5	6	20xx	20xx 8	20xx 9	20xx 10	20xx	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	AIR LIMBAH																					
					-																	
					<u> </u>																	†
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																					
В.	PERSAMPAHAN																					
					-																	
					<u> </u>																	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan				-					_												
	DRAINASE PERKOTAAN																					
																						
					<u> </u>																	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase Perkotaan				_																	-
D.	PHBS terkait sanitasi																					
					 			-	-						-		-	-	-			├
					 																	
																	-					
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS terkait sanitasi																					
		JUMLAH TOTAL ANGGARAN																				

REKAPITULASI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI JANGKA MENENGAH

Kab. / Kota : (nama kab./kota)
Provinsi : (nama provinsi)
Tahun : (tahun disusunya MPS)

																					Halaman	dari
		DETAIL LOKASI	Estimasi (Dutcome		Ke	butuhan l	Penangar	nan meny	eluruh			li	ndikasi Bia	aya (juta i	rupiah)		Su	mber Pendar	aan/Pembiay	aan (juta rupia	ah)
NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	(Kec./Desa/Kel./Kws)	Jml. Penduduk terlayani	Luas Wilayah terlayani	SATU			Volume			Total	l	l	l	l	l		КОТА	PROV.	APBN	SWASTA/C SR	MASYARA KAT
					AN	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Jumlah				-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
A.	KOMPONEN AIR LIMBAH DOMESTIK																					
																						-
																					-	-
																					-	
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Air Limbah Domesti	k																				
В.	KOMPONEN PERSAMPAHAN DOMESTIK																					
																						-
																						-
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Persampahan Dome	stik																				
C.	KOMPONEN DRAINASE LINGKUNGAN PERMUKIMAN																					
					<u> </u>																	
					t							 	 		-							
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Komponen Drainase Lingkunga	n																				
D.	PROHISAN/PHBS	<u> </u>																				
					1							1						-				
					<u> </u>																	
					1							<u> </u>	-									
																	-					
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PROHISAN/PHBS																					
		JUMLAH T	OTAL ANGGARA	N																		

Kab/Kota, Tanggal - Bulan - Tahun Disusun, Pokja Sanitasi Kab/Kota.

Tabel yang diadopsi dari Bab V dokumen SSK dan sudah direview kembali ini berisi Rencana Program Kegiatan secara Lengkap – yang perlu dilaksanakan semuanya pada periode Jangka Menengah ini – agar semua Sasaran dan Tujuan yang ditargetkan dapat tercapai sesuai rencana.

Lampiran D.2: Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Kab / Kota *CONTOH:*

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD KAB./KOTA

																			Halamanda	ri
NOMO			DETAIL LOKASI	Estimasi		Kebutu	uhan Pen	anganan/	volume y	ang dibiay	yai APBD	Kab./Kota		Sumi	ber Pemb	iayaan (ju	ıta rupiah)		SKPD	SKPD/Badan Penge
NOMC R	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	(Kec./Desa/Kel./Kws	Jml. Penduduk	Luas Wilayah	SATU			Volume			Total		AP	BD Kab./	Kota			Penanggungjaw ab Pelaksanaan	Pasca Konstruks
				terlayani	terlayani	AN		20xx	20xx	20xx	20xx	Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	AIR LIMBAH																			
					-	\vdash		-	_		-					-				
	Jumlah Pembiayaan / Per	ndanaan Air Limbah				Н														
В.	PERSAMPAHAN																			
	Jumlah Pembiayaan / Per	ndanaan Persampahan																		
C.	DRAINASE PERKOTAAN																			
			_		-															
	Jumlah Pembiayaan / Per	ndanaan Drainase Perkotaan																		
D.	PHBS terkait sanitasi																			
					-	-														
			_																	
	 				-	\vdash									-				 	
						М														
	Jumlah Pembiayaan / Per	ndanaan PHBS terkait sanitasi																		
	Total Pembiayaan / Pendanaan Sumber APBD KABUPATEN / KOTA																			

Lampiran D.3: Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Provinsi

CONTOH:

Kabupaten / Kota

: (nama kab./kota)

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI SUMBER PENDANAAN APBD PROVINSI

: (nama kab./kota) : (nama provinsi) : (tahun disusunya MPS)

																			Halamanda	i
NOMO	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw	Estimasi (Outcome Luas	Ke	butuhan	Penanga	nan/volu Provin	me yang si	dibiayai	APBD		Sumb	er Pembi	iayaan (j	uta rupial	h)	SKPD Penanggungjaw	SKPD/Badan Pengelola Pasca
R	RODE NOMENCEATOR	PROGRAM / REGIATAN (Output Sub Output Komponen)	s)	Penduduk	Wilayah	SATU			Volume			Total		AP	BD Provi	insi			ab Pelaksanaan	Konstruksi
				terlayani	terlayani	AN	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Jumlah		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	AIR LIMBAH																			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	ndanaan Air Limbah																		
В.	PERSAMPAHAN																			
											-					_	_			
																	_			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	undanaan Baraamnahan				\vdash			-		-						-			
	DRAINASE PERKOTAAN								-		-						 			
C.	DIVARIADE I ENTO I AAR																			
J.																				
											<u> </u>					_	-			
																	_			
						\vdash					<u> </u>						_			
																	_			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan Drainase Perkotaan															1			
D.	PHBS terkait sanitasi																			
	1																			
			 						—		\vdash					\vdash	 			
			1								t						t			
											l					i –				
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan PHBS terkait sanitasi																		
		То	tal Pembiayaan / Pend	lanaan Sumbe	er APBD PRO	OVINSI														
	-			Telah	dihahas da	n disa	nakati d	loh:										Kab / Kota	xxx, tanggal / bu	lan / tahun
	Telah dibahas dan disepakati oleh: Pokis Sanitasi Provinsi											Ka	Disusun Pokja Sanitasi b./Kota Ketua,							

Lampiran D.4: Tabel Program dengan Kesepakatan Pemerintah Pusat CONTOH:

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPS) RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI SUMBER PENDANAAN APBN

: (nama kab./kota) : (nama provinsi)

IOMO R	KODE NOMENKLATUR	PROGRAM / KEGIATAN (O	utput/Sub Output/Komponen)	DETAIL LOKASI (Kec./Desa/Kel./Kw	Estimasi Jml.	Luas		butuhan			me yang	dibiayai		Sur	nber Pen		(juta rup	siah)	Jumlah Total	SKPD Penanggun gjawab	SKPD/Bada Pengelola Pasca
				s)	Penduduk terlayani	Wilayah terlayani	SATU	20xx	20xx	Volume 20xx	20xx	20xx	Total Volume	20xx	20xx	APBN 20xx	20xx	20xx		Pelaksanaa n	Konstruksi
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	18	19	20
A.	AIR LIMBAH																				
				_																	
	Jumlah Pembiayaan / Pe	ndanaan Air Limbah																			
B.	KOMPONEN PERSAMPA	HAN DOMESTIK																			
C.	Jumlah Pembiayaan / Pe DRAINASE PERKOTAAN																				
О.	DRAINAGE FERROTAAN																				
							<u> </u>														
	Jumlah Pembiayaan / Pe	ndanaan Drainase Perkotaan																			
D.	PHBS terkait sanitasi																				
					-		<u> </u>														
				_																	
	Jumlah Pembiayaan / Pe	ndanaan PHBS terkait sanitasi					<u> </u>				<u> </u>				<u> </u>						
				Total Pembiayaan / Per	ndanaan Sumb	oer APBN															
			Telah (libahas dan disepakati	oleh:												K	b / Kota	xxx, tanggal / b Disusun,	ulan / tahun	
		Kepala Satker: 1) Kepala Satker	1). Ttd						Provin	kja Sani	tasi							Kat	Pokja Sanitasi ./Kota		
		2) Kepala Satker	2). Ttd							Ketua,									Ketua,		
		3) Kepala Satker	3). Ttd																		
		4) Kepala Satker	4). Ttd																		
		5)	5). Ttd							XXXXXXX								÷	ip. xxxxxx xxxx		

Lampiran D.5: Tabel Program dengan Kesepakatan Partisipasi Swasta CONTOH:

MEMORANDUM PROGRAM SANITASI (MPS)
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI SUMBER PENDANAAN SWASTA/CSR

			DETAIL LOKASI	Estimasi		Kebut	uhan Pei	nanganar	/volume	yang dib	iayai Sw	asta / CSR	Su	mber Pemi	oiayaan dar	i CS/Swast	a (juta rupi	ah)	Halamanda	KSM/Badan
NOMO R	PROGRA	M / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	(Kec./Desa/Kel./Kw s)	Jml. Penduduk	Luas Wilayah	SATU	r -		Volume			Total			CSR/Swast	9		_	Nama CSR/Swasta	Pengelola Pase Konstruksi
			8)	terlayani	terlayani	AN	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Jumlah		Konstruksi
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	8	9	10	11	12	13	14	15
A.	AIR LIMBAH																			
					-										-		-			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan Air Limbah																		
В.	KOMPONEN PERSAMPA	AHAN DOMESTIK																		
															_		<u> </u>			
					-													-		
								_									1			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan Persampahan																		
C.	DRAINASE PERKOTAAI	v																		
																	1			
					-															
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan Drainase Perkotaan																		
D.	PHBS terkait sanitasi																			
					ļ										-		-			
	Jumlah Pembiayaan / Pe	endanaan PHBS terkait sanitasi																		
			Total P	embiayaan / I	Pendanaan :	Sumber	SWAST	A												
					Telah d	ihahas	dan dis	enakati	oleh:								ŀ	Kab / Kota	xxx, tanggal / b	ulan / tahun
	Wakil Perusahaan / C.	SR						ga			4). Ttd							Kal	Pokja Sanitasi JKota	
	2) Wakil Perusahaan / CS							ga			5). Ttd								Ketua,	
	3) Wakil Perusahaan / CS	SR				6)		-			6). Ttd									
																		ī	Nip. xxxxx xxxx	x

Lampiran D.6: Tabel Program dengan Kesepakatan Masyarakat CONTOH:

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPS)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI SUMBER PENDANAAN DARI MASYARAKAT

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)
Provinsi : (nama provinsi)
Tahun : (tahun disusunya MPS)

юмо																			
	PROGRAM (VEGILTAN (CALAMETA CALAMETA)	DETAIL LOKASI	Estimasi Jml.	Outcome Luas	Kebu	tuhan Pe	nangana	n/volume	yang dit	biayai Ma	syarakat	Inc	dikasi su	mber Per	nbiayaar	(juta rup	iah)	Nama Masya- rakat/KSM	SKPD/Badan Pengelola Pas
R	PROGRAM / KEGIATAN (Output/Sub Output/Komponen)	(Kec./Desa/Kel./Kw s)	Penduduk	Wilayah	SATU			Volume			Total		N	Masyarak	at		Jumlah	Penanggungjawab Pelaksanaan	Konstruksi
			terlayani	terlayani	AN	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx	Volume	20xx	20xx	20xx	20xx	20xx			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A.	AIR LIMBAH DOMESTIK																		
_																			
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah																		
В.	PERSAMPAHAN																		
	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan																		
_	Julian remulayaan / remuanaan remainpanan																		
C.	DRAINASE PERKOTAAN																		
_																			
_	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase Perkotaan																		
D.	PHBS terkait sanitasi																		
_	Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS terkait sanitasi																		
_		Total Pembiayaan / Pe	ndanaan Sun	ber PARTIS	IPASI M	ASYARA	KAT						_						
		,,															Kah / Ka	ita xxx, tanggal / bula	ın / tahun
	Telah dibahas dan disepakati oleh Wakil Masyarakat:																read / rec	Pokia Sanitasi	iii / turiuii
	1) Wakil Masyarakat			4) Wakil Ms	syaraka	t			4). Ttd									ab./Kota	
	2) Wakii Masyarakat			5) Wakil Ms	svaraka	t			5). Ttd									Ketua,	
	3) Wakil Masyarakat			6) Wakii Ma					6). Ttd										
	3). Ita			o, wakii Mi	s yaraka				o). 180										
																		Nip. xxxxxx xxxxx	

Lampiran B.7: Program yang Belum Ada Komitmen Pendanaannya *CONTOH:*

MEMORANDUM PROGRAM SEKTOR SANITASI (MPS)

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SANITASI DAFTAR TUNGGU (YANG BELUM ADA SUMBER PENDANAAN)

Kabupaten / Kota : (nama kab./kota)
Provinsi : (nama provinsi)
Tahun : (tahun disusunya MPS)

PROGRAM / KEGIATAN (Cutput/Sub Output/Komponen) DETAIL LOKASI Microsoft Substitution Mic	sal / Paska Konstrul
Pendukuk Wilsyah SAT Wilsyah SAT	Digest Paska Konstrui
Terlayani terlayani N 20x 20	
AIR LIMBAH Jumlah Pembisyaan / Pendanaan Air Limbah	21
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Air Limbah	
. PERSAMPAHAN	
	_
	_
Juniah Pembiayaan / Pendanaan Persampahan	
DRAINASE PERKOTAAN	
	_
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan Drainase Perkotaan	
. PHBS terkait sanitasi	
	-
Jumlah Pembiayaan / Pendanaan PHBS terkait sanifasi	\neg
Total Kebutuhan Pembiayaan / Pendanaan YANG BELUM ADA KOMITMEN	
1	
Kab / Kota xxxx. tan	

Nip. xxxxxx xxxxx

Lampiran E: Deskripsi Program / Kegiatan

Lampiran ini lebih ditujukan untuk memberikan informasi kepada instansi / pihak terkait tentang segala sesuatu menyangkut informasi umum untuk program-program utama, termasuk latar belakang, tujuan, sasaran dan mafaat program, rencana pendanaan dan rencana skedul pelaksanaan.

Informasi diatas dimaksudkan untuk dapat sebagai <u>bahan pertimbangan</u> dalam **proses mendapatkan komitmen pendanaan** pihak diluar instansi Pemerintah Kab / Kota, baik itu Prov, Pusat ataupun swasta dll.dan **tahap persiapan implementasi** (penyiapan ToR pelelangan dll.)

Lampiran ini khusus untuk program utama yang berskala besar dan dimaksudkan untuk mendukung proses "buy-in" dan administrasi tahap implementasi

CONTOH: Tabel Deskripsi Program / Kegiatan

Nama Program/Kegiatan	
Tujuan	
Sasaran	
Indikator Kinerja	

Deskripsi Program/Kegiatan	
Lokasi Kegiatan	(Peta terlampir)
Penerima Manfaat	
Instansi Pelaksana	
Rencana Implementasi	
Volume kegiatan	meter, kilometer, meter persegi, hektar, dsb.
Perkiraan Biaya	dalam juta rupiah
Sumber Pendanaan	
Keterangan	Berikan keterangan tambahan yang menjelaskan tentang kegiatan tersebut.

Lampiran F: Keputusan Bupati/Walikota Tentang Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota

Petunjuk Praktis: Penyusunan Memorandum Program Sanitasi (MPS) Kabupaten/Kota

Bagian-03

Petunjuk Teknis MPS

Petunjuk Teknis-01

REVIEW SSK DAN PENETAPAN PROGRAM PRIORITAS

Ī	Dokumen Referensi Terkait:	Pelaksana:	Perkiraan Lama Kegiatan:
	- Petunjuk Penyusunan Buku Putih dan	PokjaSanitasi Kabupaten/Kota dan SKPD terkait	6 minggu
	SSK.		
	- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ		

Tujuan:

- Review/Penelaahan kembali dokumen BPS dan SSK
- Penyempurnaan dokumen BPS dan SSK yang diperlukan sebagai masukan untuk penyusunan dokumen MPS yang meliputi review kerangka kerja logis (KKL), prioritas pembangunan sanitasi dan review program, kegiatan dan penganggaran.

Output:

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- 1. Tersusunya Bab 1
- 2. Ter-peta-kan Permasalahan mendesak; Sasaran dan Prioritas Pembangunan Sanitasi.
 - Air Limbah Domestik
 - Persampahan
 - Drainase Perkotaan
 - PHBS
- 3. Tersusunnya hasil review Kerangka Kerja Logis (KKL)
- 4. Tersusunnya Lampiran A, B dan C

Deskripsi:

Kondisi eksisting sanitasi Kabupaten/Kota telah dilakukan studi yang tertuang didalam Buku Putih Sanitasi (BPS) yang menjadi dasar pijakan awal dalam merencanakan pengembangan sanitasi Kab./Kota.

Kerangka Kerja Logis (KKL) merupakan alat untuk mengetahui secara cepat antara permasalahan mendesak, isu strategis, sasaran, strategi, program dan kegiatan merupakan satu rangkaian yang saling terkaitan dengan kata lain dengan bahwa strategi, program dan kegiatan harus dapat menjawab sasaran, isu strategis dan permasalahan.

Program, kegiatan dan penganggaran yang sudah dibuat pada tahapan sebelumnya (Penyusunan SSK) adalah merupakan daftar program, kegiatan dan penganggaran yang diperlukan untuk mencapai sasaran dan permasalahan sanitasi. Untuk memastikan bahwa program, kegiatan dan penganggaran dapat menjawab permasalah sasaran dan permasalahan maka harus dikaji kembali yang meliputi jenis kegiatan, lokasi kegiatan, volume dari masing-masing kegiatan, urutan waktu pelaksanaan, besaran biaya yang realistis dsb.

Adanya perubahan kebijakan atau kebijakan baru, adanya sumber pendanaan potensial (baru) yang mungkin terjadi pada setiap tahun, terselesainya masterplan, studi dan desain yang mengharuskan Pokja Kab./Kota melakukan evaluasi dan revisi daftar program kegiatan dan penganggaran yang telah disusun didalam SSK. Adanya perubahan ini maka harus dilakukan pembahasan kembali terhadap program dan kegiatan dengan pihak terkait.

1.1. Review Strategi Sanitasi Perkotaan (SSK)

Yang dimaksud dengan "Review" adalah melihat dan menelaah kembali dokumen Buku Putih dan SSK serta melakukan perbaikan/penyempurnaan atau penyesuaian seperlunya sebagai dasar untuk menyusun Memorandum Program Sanitasi (MPS).

Hasil review ini merupakan masukan bagi penyusunan MPS, bilamana dipandang perlu oleh Pokja Kab./Kota untuk melakukan review Buku Putih dan SSK yang lebih mendalam lagi maka Pokja harus membuat catatan-catatan terkait hal-hal yang perlu dilakukan review tersebut. Catatan-catatan tersebut harus dimasukkan kedalam lampiran MPS sebagai dasar/petunjuk adanya perubahan atau perbedaan yang ditulis didalam Buku Putih dan SSK dengan yang tertulis didalam MPS.

Beberapa data yang diperlukan tetapi belum ada didalam buku putih maka harus dilengkapi berdasarkan data sekunder diantaranya adalah data genangan yang meliputi : lokasi genangan, lama genangan dan tinggi genangan.

Data Genangan:

No.	Lokasi Genangan	Luas Genangan (Ha)	Lama Genangan (> atau <3 jam)	Tinggi Genangan (> atau <30 cm)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
dst				

Keterangan:

- Luas genangan dalam Ha.
- Lama genangan diisikan: > dari 3 jam atau < 3 jam
- Tinggi genangan diisikan: > 30 cm atau < 30 cm

Referensi yang harus digunakan sebagai dasar untuk melakukan Review Buku Putih dan SSK adalah Petunjuk Praktis Penyusunan Buku Putih dan SSK.

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Pelajari dan diskusikan kembali Area Berisiko

- Lihat dan pelajari peta area beresiko;
- Pelajari permasalahan sanitasi untuk Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi.
- Gunakan peta area beresiko sebagai pertimbangan utama dalam menentukan lokasi kegiatan.
- Gunakan permasalahan pada area beresiko sebagai masukan untuk tabel kerangka logis.

2. Review Kerangka Kerja Logis

Berdasarkan tabel Kerangka Logis dari dokumen SSK maka perlu diperiksa kembali terhadap kesesuaian antara isi tabel kerangka logis dengan Buku Putih dan SSK yang meliputi antara lain:

- Permasalahan mendesak, lihat kembali permasalahan mendesak yang ada didalam SSK bila mana diperlukan Pokja dapat melakukan review terhadap permasalahan mendesak.
- Tujuan, lihat dan telaah kembali tujuan dari Air Limbah, Persampahan, Drainase dan PHBS terkait sanitasi bilamana diperlukan dan disepakati lakukan review terhadap tujuan tersebut.

- Sasaran meliputi: Lihat dan telaah kembali apakan sasaran yang sudah ditetapkan didalam SSK cukup realistis dan dapat dicapai dalam 5 tahun mendatang dengan segala keterbatasan yang ada. Bilamana diperlukan lakukan review dan sepakati dari review sasaran tersebut. Pernyataan Sasaran harus terukur dan indikator sasaran harus jelas.
- Strategi: gunakan hasil analisa SWOT sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi.
- Program dan kegiatan harus mengacu kepada Sasaran PPSP yang meliputi Penanganan Air Limbah Domestik, Sampah Domestik dan Drainase Perkotaan dan harus dapat menjawab terhadap permasalahan dan sasaran yang ditetapkan.
- Kegiatan: hanya kegiatan utama yang dimasukkan kedalam kolom kegiatan misalnya: Penyusunan Masterplan, Penyusunan Perda, Sosialisasi dan Edukasi. Untuk kegiatan infrastruktur yang perlu dimasukkan kedalam kolom kegiatan adalah kegatan utamanya saja contoh: pembangunan TPA, Pembangunan IPLT, Pembangunan TPS 3R dst (kegiatan pendukung tidak perlu dimasukkan).
- Masukkan hasil review Kerangka Logis dalam Lampiran MPS.

3. Penetapan Program Prioritas

Prioritasi program dilakukan karena keterbatasan kemampuan pendanaan dari pemerintah dan keterbatasan waktu pelaksanaan (5 tahun) untuk pengembangan sanitasi permukiman.

- Gunakan tabel prioritasi untuk menentukan program prioritas seperti tabel dibawah ini.
- Diskusikan dan sepakati bobot untuk masing-masing kriteria.
- Masukkan kegiatan utama saja (pada kolom 1) untuk kegiatan infrastruktur (seperti: Pembangunan TPA, TPS 3R, IPLT dsb) dan non-infrastruktur yang tidak berpengaruh secara langsung terhadap kegiatan infrastruktur (seperti: penyusunan masterplan, penyusunan Perda, pengadaan alat angkut sampah, Program STBM dsb).
- Diskusikan dan sepakati nilai score untuk masing-masing kegiatan terhadap kriteria pembobotan.
- Hitung Score total untuk masing-masing kegiatan dan proses perhitungan dimasukkan dalam lampiran.
- Urutkan program/kegiatan yang mempunyai score tertinggi pada urutan teratas.
 - Nilai total score 3,00 4,00 : Prioritas-1
 - Nilai total score 2,00 2,99 : Prioritas-2
 - Nilai total score 1,00 1,99: Prioritas- 3

Kegiatan pendukung dari kegiatan utama inftrastruktur secara otomatis memiliki prioritas yang sama dengan kegiatan utamanya.

- Masukkan dan urutkan program sesuai prioritas dan lengkapi kegiatan-kegiatan pendukungnya.
- Lakukan prioritasi untuk setiap komponen (Air Limbah, Persampahn, Drainase dan PHBS terkait sanitasi).
- Lakukan pembahasan hasil prioritasi program ditingkat PokjaKab./Kota.
- Finalisasi program dan kegiatan prioritas versi Pokja Kab./Kota (sebelum konsultasi dengan SKPD terkait)
- Konsultasikan dan internalisasikan kepada Kepala SKPD terkait.

Penetapan prioritasi program pada kontek persiapan implementasi tanpa mengabaikan prioritasi yang telah disusun di SSK dengan memasukkan indikator pertimbangan kriteria kesiapan *(Readiness Criteria)* dan ketersediaan atau kesiapan sumber pendanaan.

Contoh: Tabel Prioritasi Persampahan

		Score (dan bobot)					
No.	Program/Kegiatan	Penerima manfaat	Permasal ahan mendesak	Perse psi Pokja	Pro- poor	Score total	Urutan prioritas
		25%	25%	25%	25%		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Pembangunan TPA	4	3	3	2	3	1
2	Pembangunan TPS 3R	2	4	2	1	2.5	2
3	Dst						
dst							

Sumber: Petunjuk Praktis Penyusunan SSK

Keterangan:

- (1) Tabel ini disusun untuk membantu Pokja menetapkan prioritas program. Pokja dapat menggunakan metode lain dalam proses penetapan prioritas ini.
- (2) Untuk menyusun prioritas program tetapkan beberapa kriteria, diantaranya adalah:
 - Jumlah penerima manfaat (kolom 3)
 - Apakah menjawab permasalahan mendesak yang dihadapi Kabupaten/Kota (kolom 4)
 - Apakah menurut Pokja program tersebut adalah prioritas (kolom 5)
 - Apakah program tersebut memihak pada masyarakat miskin *pro-poor* (kolom 6)
- (3) Pokja dapat menetapkan kriteria lain serta mengurangi maupun menambahkan kriteria tersebut.
- (4) Selanjutnya, tetapkan bobot untuk masing-masing kriteria tersebut sehingga total bobot mencapai 100%. Pembotan dapat ditentukan secara berbeda untuk masing-masing komponen.
- (5) Berikan score untuk masing-masing kriteria 1 4, dengan 1 adalah tidak prioritas dan 4 adalah paling prioritas
- (6) Kalikan bobot dan score, selanjutnya jumlahkan untuk menghasilkan total score (kolom 7).
- (7) Urutkan kegiatan yang memiliki score terbesar merupakan kegiatan yang paling prioritas (kolom 8)

4. Review Program, Kegiatan dan Penganggaran

Langkah-langkah Review Program, Kegiatan dan Penganggaran adalah sebagai berikut:

- Gunakan Tabel hasil Review Kerangka Kerja Logis untuk menyusun program dan kegiatan.
- Pastikan bahwa Program dan kegiatan dapat menjawab permasalahan dan target pengembangan sanitasi;
- Pastikan bahwa Program dan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SMART (Specific jelas, tidak mengundang interpretasi, Measureable – terukur, Achieveable – dapat dicapai, Relevant – informasi yang jelas bagi pengguna, Timely – tepat waktu
- Pastikan bahwa Opsi Teknologi yang digunakan sesuai dengan Lokasi kegiatan. Gunakan "Buku Referensi Sistem dan Teknologi Sanitasi" atau gunakan "Zoning Tool" untuk membantu dalam pemilihan Opsi Teknologi yang tepat.
- Pastikan bahwa urutan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah SIDLACOM khususnya untuk kegiatan infrastruktur. Gunakan Lampiran 01 sebagai referensi.
- Pastikan bahwa kegiatan fisik/infrastruktur sudah didukung dengan kegiatan non-fisik lainnya.

- Pastikan bahwa output sudah realistis dengan kegiatan yang dilakukan;
 Output yang dimaksudkan adalah output dari kegiatan yang dilakukan misalnya pembangunan 1 unit MCK++ melayani 50 KK dengan radius pelayanan 100 m, maka untuk 5 unt MCK akan melayani 250 KK.
- Pastikan satuan kegiatan sudah sesuai dengan kaidah atau ketentuan, misalnya untuk Pembangunan TPA (hektar); MCK++, tangki septik komunal, MCK, TPS 3R (unit); Saluran Primer, sekunder, tersier (meter); kolam retensi (m2 atau hekta) dsb.
- Tentukan lokasi kegiatan, prioritas utama dari lokasi kegiatan adalah area beresiko dan pilih teknologi yang sesuai.
- Hitung ulang volume kegiatan yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan dan sasaran yang ditetapkan sampai dengan akhir perencanaan ini. Volume yang diperhitungkan adalah volume kegiatan yang diperhitungkan sampai akhir perencanaan jangka menengah.
 Tatacara perhitungan sbb:
 - a. Proyeksikan jumlah penduduk pada akhir perencanaan ini.
 - b. Tentukan dan hitung sasaran pelayanan yang akan dicapai setiap tahun (gunakan tabel Rencana Pengembangan Sanitasi di SSK sebagai dasar pengembangan)
 - c. Hirung Jumlah Penduduk yang harus dilayani/ditangani setiap tahun.
 - d. Pastikan bahwa sasaran pada akhir tahun perencanaan dapat dicapai
 - e. Hitung sebaran pelayanan Sarpras yang harus ditangani.
 - f. Tentukan jenis pelayanan dan sasaran dari setiap jenis pelayanan yang akan dilakukan.
 - g. Hitung volume kegiatan Infarstruktur yang akan dilakukan.
- Untuk menghitung volume dan kebutuhan kegiatan dapat digunakan "SSK Tool".
- Jabarkan hasil perhitungan volume kegiatan kedalam rencana implementasi sesuai dengan sasaran tahunan yang ditetapkan dari hasil perhitungan;
- Urutkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kaidah urutan pelaksanaan kegiatan dan tidak saling mendahului; contoh: Studi dan desain dilakukan sebelum pelaksanaan konstruksi.
- Pastikan bahwa Estimasi Biaya, sudah sesuai dengan kondisi saat ini; bilamana ragu terhadap estimasi biaya maka lakukan konsultasi kepada pihak terkait seperti Kepala SKPD, Pokja Provinsi, Satker terkait atau gunakan "Buku Opsi Teknologi" yang diterbitkan oleh TTPS atau sumber lain yang dapat dipercaya.
- Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai dengan "KEMAMPUAN PENDANAAN SANITASI" dari Kab./Kota;
- Pastikan bahwa indikasi sumber pendanaan sesuai dengan Tupoksi dan kebijakan pemerintah;

Untuk mempermudah Pokja Kab./Kota dalam menyusun kegiatan "INFRASTRUKTUR" yang lengkap dan berurutan maka telah disiapkan "Daftar Indikasi Kegiatan Sanitasi Permukiman berdasarkan kaidah SIDLACOM". Kegiatan yang ada didalam daftar tersebut hanya merupakan kegiatan indikatif dan bersifat terbuka (dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan situasi dan kondisi daerah), sehingga Pokja Kab./Kota harus melakukan kajian dan penyesuaian terhadap kondisi dan situasi dari masing-masing Kab./Kota yang bersangkutan.

Hasil Review Program, Kegiatan dan Penganggaran sebagai input untuk Bab 3 dan Bab 4

Informasi Persampahan

Cakupan Pelayanan Persampahan (sebagai informasi):

No.	Deskripsi	Keterangan
1.	Timbulan Sampah	2.00 – 2.50 ltr/orang/hari
2.	Kepadatan Sampah	0.20 – 0.30 ton/m3
3.	Prosentase Sampah Organik	40 – 70 %
4.	Timbulan Sampah Pasar	5 – 10 m3/hari
5.	Kapasitas Gerobag Sampah	1 – 1.50 m3
6.	TPS Biasa	
	- Luas Area TPS Biasa	Kisaran 5 m2
	- Ketinggian Tumpukan sampah	Maximum 1 m
	- Tingkat Kepadatan Sampah	0.7 – 0.9 ton/m3
7.	Transfer Depo I	
	- Luas Area Transfer Depo 1	Kisaran 200 m2
	- Jumlah Kontainer	2 – 4 unit
	- Kapasitas kontainer	6 – 10 m3/unit
	- Tingkat Kepadatan Sampah	0.7 – 0.9 ton/m3
8.	Transfer Depo II	
	- Luas Area Transfer Depo II	Kisaran 100 m2
	- Jumlah Kontainer	2 – 4 unit
	- Kapasitas kontainer	6 – 10 m3/unit
	- Tingkat Kepadatan Sampah	0.7 – 0.9 ton/m3
9.	Transfer Depo III	
	- Luas Area Transfer Depo III	Kisaran 10 - 50 m2
	- Jumlah Kontainer	1 – 2 unit
	- Kapasitas kontainer	6 – 10 m3/unit
	- Tingkat Kepadatan Sampah	0.7 – 0.9 ton/m3
10.	Kontainer	
	- Luas Area Konainer	Kisaran 10 m2
	- Jumlah Kontainer	1 – 2 unit
	- Kapasitas kontainer	6 – 10 m3/unit
	- Tingkat Kepadatan Sampah	0.7 – 0.9 ton/m3
11.	Kapasitas Dumptruck	6 – 8 m3
12.	Prosentase Sampah plastik/kertas	5 – 15 % (kertas 8% & plastik 7%)
13.	Efisiensi Pemilahan Sampah Organik tingkat Rumah Tangga	50 %
14.	Efisiensi Pemilahan Sampah Organik tingkat TPS	10 – 40 %
15.	Fasilitas Komposter Skala Kawasan	
	- Luas area	500 m2, effektif: 70% dari luas
	- Ketinggian Tumpukan Sampah Organik	1 – 2 meter
	- Lebar dasar Tumpukan Sampah	3 – 4 meter
	- Umur Proses Komposting Aerob	7 minggu
	- Kapasitas Produksi	5 – 15 m3/hari
Cumples	r: SSK Tool & Ruku Doforonsi Onsi Sistom dan Toknologi Sanitasi	•

Sumber: SSK Tool & Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi

Informasi Air Limbah

Kapasitas Prasarana dan Sarana IPLT (sebagai informasi):

No.	Infrastruktur	Kapasitas	Keterangan
1.	Produksi Lumpur Tinja	65 gr/hari/orang	
2.	Kapasitas Truck Tinja	2 – 4 m3/unit	

Sumber: Berbagai sumber

Cakupan Pelayanan Air Limbah (sebagai informasi):

No.	Infrastruktur	Pelayanan	Kepadatan Penduduk (jiwa/Ha)	Keterangan
1.	Individual	< 5 KK	Rural: < 100, Urban: < 25	
2.	MCK	5-10 KK	Rural: 100-250	Radius max. 100 m
3.	MCK++	10-60 KK	Rural: 100-250	Radius max. 100 m
4.	Tangki Septik Komunal	40-100 KK	Rural: 100-250	
5.	IPAL Komunal	40-200 KK	Rural: 100-250	
6.	Sistem terpusat/Offsite Sanitation	Skala Kawasan/Kota	Rural: > 250 Urban: > 100	Sistem perpipaan

Sumber: Buku Referensi Opsi Sistem dan Teknologi Sanitasi

Informasi Drainase

Identifikasi permasalahan genangan dan Indikasi Penanganan Genangan (sebagai Infoemasi)

No.	Penyebab Genangan	Indikasi Penanganan yang diperlukan	
I.	,	kiriman dan pasang surut) – Sungai, Laut, Danau dsb.	
	(a). Limpasan/ overtopping	Peninggian Tanggul; pembangunan parapet, pelebaran sungai; normalisasi sungai; pengurangan debit puncak banjir yang masuk kedalam sungai dengan pembangunan waduk, pembangunan kanal banjir, dsb. (Tupoksi SDA)	
	(b). Air Balik	Pembangunan & rehabilitasi Pintu air, Kolam Retensi, Stasiun Pompa, dsb.	
II.	Sistem Mikro (Hujan L	okal) – Sal. Primer, Sal. Sekunder dan Sal. Tersier	
	(a). Sistem tidak baik	Perbaikan sistem secara menyeluruh, Sistem Saluran/aliran, Kolam Retensi, Sistem Polder, Stasiun Pompa, dsb.	
	(b). Kapasitas Infrastruktur tidak mencukupi	 Perbaikan dan peningkatan kapasitas infrastruktur yang ada (saluran, gorong-gorong, pintu air), sumur resapan untuk mengurangi aliran permukaan/run off. Pengerukan Sedimen Menghilangkan hambatan-hambatan saluran. Menampung aliran permukaan (sementara) dengan membangun kolam tandon/retensi, Long Storage, Waduk dsb. 	

Opsi Teknologi penanganan genangan

Penyebab Genangan	Kondisi Lingkungan	Opsi Teknologi
Air Balik akibat Muka Air Banjir di Sungai	Bila elevasi lahan dibawah MAB Q.5 tahun atau genangan terjadi sekali atau lebih dalam 5 tahun.	Sister polder dengan kolam retensi dgn atau tanpa stasiun pompa.
	Bila elevasi lahan sama dengan Muka Air Banjir (MAB) Q.5 tahun atau tidak terjadi genangan banjir 5 tahunan tetapi terjadi genangan pada banjir lebih dari 5 tahunan.	Pintu Air
	Bila elevasi lahan diatas MAB atau tidak pernah terjadi banjir.	Gravitasi
Air Balik akibat Pasang Surut Laut	Bila elevasi lahan dibawah MSL (<i>Mean Sea Level</i>) – Muka Air Laut Rata-rata atau terjadi genangan setiap hari.	kolam retensi dengan atau tanpa stasiun pompa.
	Bila elevasi lahan antara MSL dan HWL atau genangan terjadi setiap bulan purnama.	Pintu Air
	Bila elevasi Lahan diatas HWL (High Water Level) – Muka Air Pasang Tertinggi atau tidak pernah terjadi genangan.	Gravitasi

Petunjuk Teknis-02

KONSOLIDASI PROGRAM

Dokumen Referensi Terkait:	Pelaksana:	Perkiraan Lama Kegiatan:
- Dokumen MPS Bab 1 dan Bab 2	- Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota dan SKPD	5 minggu
- SE Mendagri No. SE 660/4919/SJ	terkait	
	- Pokja Sanitasi Provinsi	
	- Satker Provinsi K/L	

Tujuan:

- Menyusun Program dan Kegiatan
- Menyusun Penganggaran
- Konsultasi program, kegiatan dan pengangaran untuk sumber pendanaan APBD Prov., APBN dan sumber pendanaan potensial lainnya.
- Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran oleh Pokja Kab./Kota.
- Kesepakatan program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah dari sumber pendanaan APBD Kabupaten/Kota.
- Pemilahan Daftar program, kegiatan dan penganggaran jangka menengah yang diharapkan dari sumber pendanaan APBD Kab./Kota, sumber APBD Prov., sumber APBN dan sumber-sumber pendanaan lainnya.
- Penetapan daftar tunggu bagi kegiatan-kegiatan yang belum ada sumber pendanaannya versi Pokja Kabupaten/Kota.
- Akses Sumber Pendanaan Non Pemerintah

Deskripsi:

Program, kegiatan dan Penganggaran telah disusun didalam dokumen SSK dan dilakukan review di MPS untuk memastikan bahwa progam dan kegiatan yang telah disusun termasuk lokasi dan volume kegiatan dapat menjawab permasalahan dan sasaran yang sudah ditetapkan didalam SSK.

Untuk rencana implementasi dari program dan kegiatan dapat didanai dari berbagai sumber pendanaan baikpemerintah (APBD Kab./Kota, APBD Prov. dan APBN maupun non-pemerintah.

Sedangkan untuk mendapatkan dukungan dari stakesholder terkait Program, kegiatan dan penganggaran dari pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu dilakukan Internalisasi oleh Pokja Sanitasi Kabupaten/Kota.

Keterbatasan anggaran pemerintah untuk pendanaan sanitasi menyebabkan adanya "gap" pendanaan yang harus dicarikan solusi dengan meng-akses sumber-sumber non-pemerintah untuk menutup "funding gap" tersebut agar target dan sasaran pengembangan/pelayanan sanitasi dapat tercapai sesuai yang diharapkan sehingga diperlukan akses sumber pendanaan non-pemerintah.

Output:

Output yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

- 1. Tersedianya daftar program dan kegiatan yang berisi program dan kegiatan, lokasi kegiatan, outcome, volume kegiatan beserta rencana implementasi (Bab 3)
 - Air Limbah Domestik

- Persampahan
- Drainase Perkotaan
- PHBS terkait sanitasi
- 2. Tersedianya daftar program kegiatan dan penganggaran
- 3. Tersedianya daftar potensi sumber-sumber pendanaan dari donor, lembaga-lembaga keuangan internasional maupun nasional yang berpotensi untuk pendanaan Sanitasi.
- 4. Tersedianya daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pengembangan sanitasi

Langkah-langkah Pelaksanaan:

1. Diskusikan dan Sepakati Rencana Pendanaan Sanitasi Permukiman

Diskusi dan penyepakatan rencana pendanaan sanitasi permukiman dilakukan pada tataran tim teknis Pokja Kab./Kota dan selajutnya akan dilakukan konsultasi kepada SKPD terkait di Kab./Kota.

- (a) Pisahkan program, kegiatan dan pendanaan sesuai dengan sumber pendanaan yang diharapkan yaitu APBD Kab./Kota, APBD Prov, APBN, Swasta/CSR dan Masyarakat.
- (b) Isikan kolom indikasi sumber pendanaan dengan mengacu kepada Tupoksi dari masing-masing sumber pendanaan.
- (c) Gunakan Petunjuk Praktis Sumber Pendanaan Santasi sebagai referensi/rujukan dan untuk sumber pendanaan dari PPLP maka gunakan Lampiran-2: kriteria kegiatan yang dapat dianggarkan dari PPLP sebagai referensi.
- (d) Pastikan bahwa rencana kegiatan yang dialokasikan untuk APBD Kab./Kota setiap tahun sudah sesuai dengan "KEMAMPUAN DAN RENCANA PENDANAAN SANITASI" dari Kab./Kota, bilamana kebutuhan
- (e) Lakukan konsultasi kepada kepala SKPD terkait Kab./Kota.
- (f) Buat daftar hadir dan notulen hasil konsultasi.
- (g) Akomodir seluruh hasil konsultasi tersebut kedalam tabel program, kegiatan dan pendanaan;
- (h) Lakukan perbaikan dari hasil konsultasi dengan kepala SKPD terkait.

2. Konsultasikan dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait diprovinsi.

Konsultasi ini merupakan konsultasi "awal" kepada Pokja Provinsi dan Satker terkait di Provinsi untuk mendapatkan infomasi yang jelas terhadap program-program dan kegiatan-kegiatan sanitasi yang dapat didanai dari APBD Prov, APBN dan Sumber pendanaan lainnya.

- (a) Selesaikan Bab 1, Bab 2 dan hasil review program dan kegiatan.
- (b) Lakukan self-assessment (QA-sendiri) dan pastikan nilai QA sudah mencapai nilai kelulusan.
- (c) Lakukan konsultasi secara langsung dengan Pokja Provinsi dan Satker terkait dapat dilakukan dengan dua cara:
 - Pokja Kab./Kota dapat mengudang Pokja Provinsi dan Satker terkait; atau
 - Pokja Kab./Kota mendatangi Pokja Provinsi dan Satker terkait di Kota Provinsi.
- (d) Lakukan perbaikan dari hasil konsultasi awal tersebut;
- (e) Susun dan selesaikan Bab 3 dan Bab 4.

3. Internalisasi Program, Kegiatan dan Penganggaran

Tujuan dari internalisasi adalah:

a. Tersosialisasinya program, kegiatan dan anggaran kepada stakeholder terkait sanitasi ditataran Kab./Kota.

- b. Teradopsinya program, kegiatan dan anggaran kedalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran tahunan.
- c. Dukungan dari pemerintah Kab./Kota untuk meng-alokasikan anggarannya untuk prgram-program sanitasi.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam proses internalisasi adalah:

- Diskusikan dan sepakati hasil konsultasi awal dengan seluruh Pokja Kab./Kota.
- Lakukan konsultasi teknis tingkat Kab./Kota yang harus dihadiri oleh Bupati/Walikota, seluruh Kepala SKPD terkait dan undang DPRD Kab./Kota.
- Finalkan hasil konsultasi teknis tersebut.
- Lakukan pengawalan dan pastikan bahwa program dan kegiatan ini sudah teradopsi dalam dokumen perencanaan daerah dan mekanisme penganggaran.

4. Akses Pendanaan Hibah/Pinjaman

- (a) Kumpulkan data dan informasi tentang Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi.
- (b) Buatlah daftar sumber-sumber pendanaan potensial pada point (a) tersebut diatas termasuk potensi kegiatan yang akan didanai.
- (c) Kumpulkan dan pelajari pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan, persyaratan dan criteria setiap sumber pendanaan dari Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi. Ada beberapa donor yang dapat diakses antara lain: IndII (AusAid), Word Bank, USAid, Islamic Development Bank dsb.
- (d) Penuhi kriteria dan persyaratan yang ditentukan dari sumber pendanaan tersebut
- (e) Ikuti workshop atau pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan berkaiatn dengan akses sumber pendanaan tersebut.

Tabel 2.1: Daftar pendek sumber pendanaan negara-negara donor, lembaga-lembaga keuangan internasional, LSM dan lain-lain yang potensial;

	miernaeienar, 20m aan iam jang peterieiar,			
No.	Lembaga Donor	Potensi kegiatan yang sesuai untuk didanai		
1.	IndII (AusAid)	- Air Limbah Sistem terpusat skala menengah (200 – 400 SR)		
		- ITF skala kawasan		
2.	Word Bank (Program USRI)	- Air Limbah Skala Komunal		
3.				
Dst.				

<u>Catatan:</u> Isian yang ada di dalam tabel hanya untuk kepentingan contoh atau ilustrasi.

5. Akses sumber pendanaan Non-Pemerintah

Tujuan dari tahap ini adalah menggali potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta, CSR, masyarakat, lebaga-lembaga donor, LSM dan sebagainya, untuk berkontribusi dan berpartisipasi dalam mendukung Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP). Aktifitas kegiatan ini tidak cukup dalam satu tahun atau dua tahun tetapi harus dilakukan secara terus-menurus dan sebaiknya dilakukan lebih awal untuk dapat mendapatkan gambaran tentang potensi yang ada baik ditingkat Kab./Kota, Provinsi dan Pusat. Agar potensi pendanaan/bantuan dari sector swasta dan masyarakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung target dan sasaran pengembangan sanitasi yang sudah ditetapkan maka pendanaan/bantuan tersebut harus digunakan untuk pembiayaan program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS.

Perusahaan Penyelenggara CSR adalah perusahaan penyelenggara CSR yang terikat oleh undangundang yang wajib memeberikan sebagian keuntungannya untuk peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Perusahaan non-CSR adalah perusahaan Swasta, BUMN, BUMD dan perusahaan Swasta/pihak lainnya yeng tidak menyelenggarakan CSR tetapi memiliki kepedulian terhadap sanitasi.

Lembaga donor lainnya adalah lembaga-lembaga non pemerintah yang memiliki kepedulian terhadap pembangunan Sanitasi Permukiman. Seperti: Universitas, LSM, Organisasi Profesi, Gapensi, Gapeknas, Partai Politik, Ogranisasi Kepemudaan, Organisasi keagamaan, Asosiasi Tenaga Ahli/Profesional, dsb.

Masyarakat adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang memiliki kepedulian terhadap pengembangan sanitasi didaerahnya. Bentuk kepedulian tersebut dapat diwujudkan berupa: tenaga, material, lahan, uang, pengelolaan (O & P) dan sebagainya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meng-akses sumber pendanaan Swasta/CSR maupun non-CSR dan Lembaga Donor lainnya adalah:

- a. Kumpulkan data dan informasi sebanyak-banyaknya tentang perusahaan swasta yang ada didaerah baik ditingkat Kab./Kota maupun ditingkat Provinsi dan Pusat;
- b. Buatlah daftar tentang perusahaan swasta, BUMN dan perusahaan lain yang memiliki potensi untuk memberikan bantuan/pendanaan (CSR) sektor sanitasi.
- c. Lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan dalam workshop berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana pengembangan dan pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung oleh peserta workshop.
- d. Buatlah proposal pendanaan sector sanitasi kepada Sektor Swasta atau sumber donor lainnya;
- e. Selenggarakan forum Swasta/CSR dan Lembaga Donor Lainnya yang diprakarsai oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang dan sampaikan hal-hal tentang pengembangan sanitasi serta tawarkan beberapa proposal;
- f. Ikuti forum-forum CSR Lembaga Donor Sanitasi skala nasional dan skala provinsi yang diselenggarakan oleh kementerian terkait atau pihak lain untuk mengetahui potensi pendanaan nonpemerintah dalam pengembangan sanitasi.
- g. Komunikasikan secara intensif terhadap sumber pendanaan non-pemerintah berpotensi untuk pendanaan sanitasi;
- h. Ikuti prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh sumber pendanaan dalam mengakses pendanaan selama tidak melanggar peraturan perundangan yang berlaku;
- Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan perusahaan Swasta Lembaga donor tersebut:
- j. Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: fasilitasi pertemuan CSR dengan masyarakat, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola dsb.

Tabel 2.2: Daftar perusahaan penyelenggara CSR yang memiliki potensi berpartisipasi dalam pembangunan sanitasi Kabupaten Kota

No.	Nama Perusahaan (CSR)	Alamat	Potensi kegiatan
1.			
2.			
3.			
Dst.			

A. Penyelenggaraam Forum CSR ditingkat Kabupaten/Kota

- Kepala Daerah atau pejabat yang berwenang mengundang Perusahaan Swasta yang ada diwilayahnya untuk mengenalkan dan memasarkan program dan kegiatan sanitasi kabupaten/kota yang perlu dukungan dari pihak swasta.
- Agenda Pertemuan, antara lain berisi:
 - (1). Presentasi oleh Pokja Kab./Kota untuk tingkat Kab./Kota dan Pokja Provinsi menyampaikan antara lain:
 - a. kondisi sanitasi diwilayahnya dan target/sasaran pengembangan sanitasi;
 - b. kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah kab./kota atau provinsi untuk mendukung pencapai target yang ditetapkan.
 - c. program dan kegiatan yang perlumendapat dukungan dari Swasta
 - (2). Tanggapan dari pihak Swasta
 - Pihak Swasta menanggapi presentasi yang disampaikan oleh Pokja dan diharapkan pihak swasta memberikan gambaran kegiatan-kegiatan sanitasi yang dapat didukung.
 - (3). Desk
 - POKJA Kabupaten/Kota atau Provinsi menyampaikan daftar program dan kegiatan kepada swasta dan melakukan desk, kemudian melakukan kesepakatan tindak lanjut yang diperlukan.
 - (4). Perumusan Tindaklanjut yang disepakati

Catatan:

Beberapa perusahaan penyelenggara CSR di Kab./Kota tidak memerlukan penandatanganan komitmen dalam bentuk "Nota Kesepakatan" untuk memberikan bantuan pendanaan sanitasi maka catat dalam lembar tersendiri dan buat notulen setiap pertemuan/rapat.

B. Akses pendanaan dari Masyarakat

- (1). Lakukan sosialisasi dan komunikasi kepada camat, kepala desa dan tokoh masyarakat pada wilayah rawan sanitasi tentang kegiatan-kegiatan sanitasi khususnya kegiatan yang berbasis masyarakat sebagai awal dari pelaksanaan kegiatan fisik dilapangan. Disarankan kegiatan sosialisasi dan komunikasi ini dilakukan pada wilayah rawan sanitasi dimana pelaksanaan kegiatan fisik akan dilakukan pada tahun pertama dan kedua dari dihitung kegiatan sosialisasi dan komunikasi yang dilaksanakan;
- (2). Buatlah kesepakatan antara pemerintah daerah dengan masyarakat:
- (3). Tindak lanjuti dengan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya seperti: penyiapan desain, penyiapan masyarakat, penyiapan lahan, penyiapan badan pengelola (KSM) dsb.

(4). Bentuk partisipasi masyarakat dalam pendanaan sanitasi dapat berupa: penyediaan lahan, penyediaan tenaga kerja, penyediaan sebagian atau seluruh material yang diperlukan, pendanaan dari swadaya masyarakat, dsb.

C. Kontribusi Pokja Kabupaten/Kota dan Pokja Provinsi

Kontribusi Pokja Kab./Kota bersama-sama dengan Fasilitator Kab./Kota mengumpulkan data/informasi dan melakukan identifikasi terhadap potensi sektor swasta dan masyarakat dalam pengembangan sector sanitasi di tingkat wilayah Kabupaten/Kota. Disamping itu Pokja Kab./Kota bersama-sama dengan Fasilitator Kab./Kota mendorong pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pertemuan-pertemuan dengan perusahaan-perusahaan yang berdomisili diwilayahnya dalam rangka sosialisasi dan memasarkan program dan kegiatan untuk pengembangan sector sanitasi yang perlu partisipasi dari sector swasta/CSR. Pertemuan ini harus dilakukan secara rutin dan terus menerus agar tercipta *"ownership"* terhadap program dan kegiatan sector sanitasi kepada semua pememangku kepentingan.

Kontribusi Pokja Provinsi bersama-sama dengan Fasilitator Provinsi mengumpulkan data/informasi dan melakukan identifikasi terhadap potensi sektor swasta dalam pengembangan sector sanitasi di tingkat wilayah Provinsi yang bersangkutan. Disamping itu Pokja Provinsi bersama-sama dengan Fasilitator Provinsi mendorong pemerintah provinsi untuk mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan-perusahaan/CSR yang berdomisili diwilayahnya dan pemerintah kabupaten/kota dalam rangka:

- (1). Fasilitasi pertemuan antara perusahaan-perusahaan/CSR dengan pemerintah kabupaten/kota.
- (2). Sosialisasi dan memasarkan program dan kegiatan untuk pengembangan sector sanitasi yang perlu partisipasi dari sector swasta/CSR.

Peluang kerjasama CSR khususnya berkaitan dengan sektor sanitasi terdapat dibeberapa kementerian seperti Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup dan sebagainya.

Lampiran 2.1: INDIKASI KEGIATAN SANITASI

Indikasi Kegiatan Sanitasi (sebagai contoh atau referensi)_Versi 03

CATATAN PENTING:

- (1). Tabel ini "HANYA" merupakan "ACUAN" yang tidak mengikat.
- Tujuan dari tabel ini adalah
 - (2a). untuk memudahkan Pokja Kab./Kota dalam meng-identifikasi kegiatan sektor sanitasi dan tidak mengikat;
 - (2b). untuk memudahkan Pokja Provinsi dan Pusat dalam meng-klasifikasi kegiatan sektor sanitasi diwilayahnya.
- (3). Kegiatan didalam tabel tersebut dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan SITUASI, kondisi dan kebutuhan kab./kota.
- (4). Indikasi alokasi sumber pendanaan harus dilakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berwenang dan dapat berubah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

PETUNJUK PENGGUNAAN TABEL

a.	Kolom (1): Nomor
b.	Kolom (2): Uraian Kegiatan secara lengkap dan berurutan untuk memudahkan Pokja dalam menyusun Kegiatan Sanitasi. Kegiatan-kegiatan yang ada didalam tabel ini dapat dikurangi atau ditambah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Kabupaten/Kota bersangkutan. Konsultasikan kepada pihak terkait berkaitan dengan nomenklatur kegiatan dan sesuaikan dengan perkembangan.
b.	Kolom (3), (4) dan (5): Indikasi sumber pendanaan/penganggaran dari APBD Kab./Kota, Prov. dan APBN sesuai dengan Tupoksi masing-masing dan kebijakan pemerintah. Indikasi masing-masing sumber pendanaan/penganggaran harus dikonsultasikan dengan pihak Pokja Provinsi dan Satker K/L terkait di Provinsi.
c.	Kolom (6): Indikasi sumber pendanaan/penganggaran sektor swasta, BUMN/D dan sebagainya sebagai penyelenggara CSR sesuai dengan potensi yang ada.
	Kolom (7): Indikasi sumber pendanaan dari masyarakat sesuai kontribusi yang dapat dialokasikan dari masyarakat terhadap kegiatan tersebut. Yang dimaksud dengan masyarakat adalah pribadi, kelompok masyarakat, toko, restoran, hotel, LSM dan perusaahan-perusahaan bukan penyelenggara CSR yang peduli terhadan sanitasi

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
NOMOR	UNAIAN REGIATAN		APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA- RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
1	AIR LIMBAH						
	A. PERENCANAAN UMUM						
	(1). Penyusunan Masterplan Sistem Air Limbah	+					
	(2). Penyusunan Outline plan Sistem Air Limbah	+					
	(3)						
	B. INFRASTRUKTUR AIR LIMBAH SISTEM SETEMPAT DAN SISTEM KOMU	NAL					
	(1). MCK++, IPAL Komunal, Septiktank Komunal, STBM (Program SANIMAS)	+	+	+	+	+	
	(sosialisasi, pembentukan KSM, perencanaan, pembangunan dan pelatihan dalam satu paket kegiatan)						
	(1.1). Pembebasan Lahan					+	
	(1.2). Operasi dan Pemeliharaan					+	
	(2). MCK (Komunal)						
	(2.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK)	+					
	(2.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	+					
	(2.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	+					
	(2.4). Pembebasan Lahan/Tanah					+	
	(2.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK	+				+	
	(2.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.	+					
	(2.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM					+	
	(2.8). Pembangunan MCK Umum	+	+		+	+	
	(2.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK Umum.	+				+	
	(2.10)						
	(3). MCK ++ (Komunal)						
	(3.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun MCK++)	+					
	(3.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan MCK++ kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	+				+	
	(3.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	+				+	
	(3.4). Pembebasan Lahan/Tanah	+				+	
	(3.5). Perencanaan Detail (DED) Pembangunan MCK++	+		1		+	
	(3.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan manajerial.	+		+			
	(3.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM					+	
	(3.8). Pembangunan MCK++	+	+	+	+	+	
	(3.9). Biaya Operasi dan Pemeliharaan MCK++	+				+	
	(3.10)						

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
NOMOR 1			APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
	(4). IPLT						
	(5.1). Pembangunan IPLT						
	(a). Studi Kelayakan (b). Studi Lingkungan Pembangunan IPLT	+					
	(c). Sosialisasi dan Kampanye Rencana Pembangunan IPLT	+					
	(d). Pembebasan Lahan/Tanah	+					
	(e) Perencanaan Detail (DED) Pembangunan IPLT	+	+				
	(f). Pembentukan Kelembagaan Pengelola IPLT	+					
	(g). Pelatihan bagi Pengelola IPLT			+			
	(h) Pelaksanaan dan supervisi Pembangunan IPLT	+	+	+			
	(i). Pengadaan Truk Tinja	+			+		
	(j). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya	+			+	+	
	(k)						
	(5.2). Revitalisasi IPLT						
	(a) Perencanaan Detail (DED) Revitalisasi IPLT	+					
	(b). Pembebasan Lahan/Tanah	+					
	(c) Pelaksanaan dan supervisi Pekerjaan Revitalisasi IPLT	+		-	 . 		
	(d). Pengadaan Truk Tinja (e). Operasi dan Pemeliharaan IPLT dan Fasilitasnya	+	+		+	+	
	(f)(f).				+ -	+	
	47						
	C. SISTEM TERPUSAT (OFF-SITE SYSTEM)						
	(1). IPAL Komunal / Tangki Septik Komunal						
	(4.1). Penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Air						
	Limbah Domestik (pada daerah yang berpotensi untuk dibangun IPAL Komunal)	+					
	(4.2). Sosialisasi Rencana Pembangunan IPAL Komunal kepada masyarakat oleh Dinas Terkait	+					
	(4.3). Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat	+				+	
	(4.4). Pembebasan Lahan/Tanah	+					
	(4.5). Perencanaan Jaringan perpipaan	+				+	
	(4.6). Pelatihan bagi pengurus KSM, berupa pelatihan di bidang teknis, keuangan, dan	+					
	manajerial. (4.7). Sosialisasi kepada masyarakat oleh pengurus KSM					4	
	(4.8). Pembangunan IPAL Komunal dan Jaringannya	+	+	+	+	+	
	(4.9). Pembangunan Sambungan Rumah	+			T .	+	
	(4.10). Biaya Operasi dan Pemeliharaan IPAL Komunal	+				+	
	(4.11)						
	(2). SISTEM TERPUSAT SKALA KOTA/KAWASAN						
	(2.1). Studi Pra Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat	+					
	(2.2). Studi Kelayakan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat	+					
	(2.3). Preliminary Design Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat	+					
	(2.4). Studi Lingkungan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat	+					
	(2.5). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	+					
	(2.6). Pembebasan Lahan/Tanah	+					
	(2.7). Perencanaan Detail (DED) Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat	+			+		
	(2.8). Sosialisasi "Pembangunan" Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah	+					
	(2.9). Pembentukan Lembaga Pengelola Sistim Pengolah Limbah Terpusat	+			+		
	(2.10). Pelatihan Pengelolaan Sistem Pengolah Limbah Terpusat	+		+	+		
	(2.11). Pembangunan dan supervisi Pembangunan IPAL terpusat dan sistem perpipaan	+	+	+	+		
	primer/lateral. (2.12) Pembangunan dan supanjisi Sistem Pernipaan Sekunder dan Tersiser			-			
	(2.12). Pembangunan dan supervisi Sistem Perpipaan Sekunder dan Tersiser (2.13). Pembangunan dan supervisi Sambungan Rumah (SR)	+	+	<u> </u>	+	+	
	(2.14). Perluasan/Penambahan Sambungan Rumah (SR).	+		 	+	+	
	(2.15). Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengolah Air Limbah Terpusat termasuk perpipaan	+			+	+	
	(2.16)	<u> </u>					
	D. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN DAERAH						
	(1). Penyusunan Perda Pengelolaan Air Limbah (2). Penyusunan Peraturan Pengelolaan B3	+					
	(3). Penyusunan Peraturan Pengelolaan BS (3). Penyusunan Perda dalam penyelengaraan sistem air limbah rumah tangga	+					
	(4). Penyusunan Peraturan Ijin Pembuang Limbah Cair (IPLC)	+			<u>L</u>		
	(5)						
	E. PEMANTAUAN						
	(1). Pemantauan Kualitas Air Sungai	+					
	(2). Pemantauan Kualitas Air Sumur Gali/Air Tanah	+					
	(3)	-					

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
1	UKAIAN REGIATAN	APBD- Kab./Kota	APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA- RAKAT	
	2	3	4	5	6	7	
2	PERSAMPAHAN						
	A. PERENCANAAN UMUM		1	1			
	(1). Penyusunan Masterplan Persampahan Skala Kab./Kota	+		+			
	(2). Review Masterplan Persampahan Skala Kab./Kota (3). Studi tentang kualitas dan kuantitas sampah Kab./Kota	+		+			
	(4). Studi Manajemen Pengelolaan Persampahan	+					
	(5). Penyusunan Rencana Usaha (Business Plan) Persampahan	+					
	(6)	<u> </u>					
	B. PENGELOLAAN SAMPAH DARI SUMBERNYA						
	(1). Penyuluhan tentang persampahan kepada masyarakat dan kelompok masyarakat						
	(2). Kampanye pengurangan sampah dari sumbernya (3). Kampanye tatacara dan gerakan pemilihan sampah dari sumbernya	+ +			+		
	(4). Pengadaan Tempat Sampah Terpilah untuk Rumah Tangga.	+			+	+	
	(5). Pengadaan Tempat Sampah terpilah ditempat umum/jalan	+			+		
	(6). Pembentukan Pokmas baru ditingkat RT/RW tentang pengolahan sampah	+	1	1			
	(7). Pembentukan kader warga peduli lingkungan di setiap kelurahan	+					
	(8). Pelatihan 3R bagi aparat pengelola persampahan	+	+	+			
	(9). Pelatihan Pengolahan sampah 3R bagi kader desa dan RT/RW	+			+		
	(10). Pengadaan keranjang sampah komposter	+	+	+	+	+	
	(11). Pengadaan Gerobag Sampah	+			+	+	
	(12). Pengadaan Gerobag Sampah bermotor	+			+		
	(13). Pengadaan Mobil Pick Up Sampah (14)(14)	+			+		
	(17)						
	C. PENGELOLAAN SAMPAH DARI STASIUN ANTARA SAMPAI TPA						
	C.1 PEMBANGUNAN TPS						
	Pembangunan TPS 3R (Program SANIMAS - Berbasis Masyarakat)	+	+	+	+	+	
	(sosialisasi, pembentukan KSM, perencanaan, pembangunan dan pelatihan dalam satu paket						
	kegiatan)						
	(1.1). Pembebasan Lahan (1.2). Operasi dan Pemeliharaan					+	
	(1.2). Operasi dan i ememaraan						
	2. TPS Biasa						
	(1). Pembangunan TPS	+	+	+	+	+	
	(2). Peningkatan TPS biasa menjadi TPS terpilah	+					
	(3). Rehabilitasi TPS	+					
	(4)						
	3. Landasan Kontainer						
	(1). Pembebasan Lahan	+					
	(2). Penyusunan DED Landasan Kontainer	+	ļ				
	(3). Supervisi dan Pembangunan Unit Landasan Kontainer	+	+	+	ļ		
	(4). Pemeliharaan Unit Landasan Kontainer (5). Rehabilitasi Unit Landasan Kontainer	+ +	-	-			
	(6)		1				
	4. Transfer Depo						
	(1). Pembebasan Lahan	+					
	(2). Penyusunan DED Transfer Depo	+					
	(3). Supervisi dan Pembangunan Unit Transfer Depo	+	+	+			
	(5). Pemeliharaan Unit Transfer Depo	+					
	(6). Rehabilitasi Transfer Depo	+	<u> </u>				
	(7)						
	(1). Pembebasan Lahan	+	1				
	5.5	+	1				
	(2). Penyusunan DED TPS 3R				1		
	(2). Penyusunan DED TPS 3R (3). Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R	+					
		 			+		
	(3). Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R	+	+	+	+		
	(3). Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R (4). Pelatihan bagi pengelola TPS 3R (5). Supervisi dan Pembangunan TPS 3R (6). Operasi dan Pemeliharaan TPS 3R	+ +	+	+			
	(3). Pembentukan lembaga pengelola TPS 3R (4). Pelatihan bagi pengelola TPS 3R (5). Supervisi dan Pembangunan TPS 3R	+ + + +	+	+	+		

NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
NOMOR	UKAIAN REGIATAN	APBD- Kab./Kota	APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
	6. Pembangunan ITF						
	(1). Pembebasan Lahan	+					
	(2). Penyusunan DED ITF	+					
	(3). Pembentukan lembaga pengelola ITF (4). Pelatihan bagi pengelola ITF	+			+		
	(5). Supervisi dan Pembangunan ITF	+	+	+	+		
	(6). Operasi dan Pemeliharaan ITF	+	•		+		
	(7). Rehabilitasi ITF	+			+		
	(8)						
	7. Alat Angkut Stasiun antara dan TPA						
	(1). Pengadaan Truck Biasa	+			+		
	(2). Pengadaan Dump Truck	+			+		
	(3). Pengadaan Compactor Truck	+			+		
	(4). Pengadaan Kontainer	+			+		
	(5). Pengadaan Amroll Truck	+			+		
	(6). Operasi dan Pemeliharaan Alat Angkut	+					
	(7)						
	D TEMPAT DEMPOSES AN AKUID (TDA)						
	D. TEMPAT PEMROSESAN AKHIR (TPA)						
	D.1. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA KAB./KOTA			-	-		
	(1). Penyusunan Studi Kelayakan TPA	+					
	(2). Penyusunan Studi Lingkungan	+					
	(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA/TPA kepada masyarakat sekitarnya	+	+				
	(4). Pembebasan Lahan	+					
	(5). Penyusunan DED TPA	+					
	(6). Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya	+					
	(7.1) Rembanyunan arasarana daga/Casilitas Umum TRA						
	(7.1). Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA (7.2). Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA	+	+	+			
	(7.3). Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA	+					
	(7.4). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA	+	+	+	+		
	8. Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	+					
	9. Pelatihan Pengelolaan TPA			+			
	10. Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	+					
	11. Penyusunan Perda Pengelolaan TPA	+					
	12. Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi	+					
	13. Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya	+					
	14						
	D.2. PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN TPA REGIONAL						
	(1). Penyusunan studi kelayakan TPA Regional	+	+				
	(2). Penyusunan AMDAL TPA Regional	+	+				
	(3). Sosialisasi "Rencana" Pembangunan TPA Regional kepada masyarakat sekitarnya dan pihak-						
	pihak terkait	+	+				
	(4). Pembebasan Lahan	+	+				
	(5). Penyusunan DED TPA Regional	+	+	+			
	(6). Pembentukan Tim Koordinasi Kerjasama Daerah (TKKSD) Tingkat Kab./Kota dan Provinsi	ļ	+				
	(7). Koordinasi dengan Kab./Kota dan Provinsi terkait rencana pembangunan TPA Regional	+					
	(8). Penyiapan Konsep Bentuk Kesepakatan dan Penandatanganan	+					
	(9). Penyiapan dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama	+			-		
	(10). Sosialisasi Pembangunan TPA kepada masyarakat sekitarnya	+			-		
	(11). Supervisi dan Pembangunan TPA Regional		_		 		
	(11.1). Supervisi dan Pembangunan prasarana dasar/Fasilitas Umum TPA Regional		+	+	1		
	(11.2). Supervisi dan Pembangunan Fasilitas Perlindungan Lingkungan TPA Regional		+	+			
	(11.3). Supervisi dan Pembangunan Fasilitas Penunjang TPA Regional		+	+			
	(11.4). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA Regional		+	+	-		
	(12). Pembentukan Kelembagaan Pengelolaan TPA Regional/Unit Kerja TPA/UPTD		+		-		
	(13). Pelatihan Pengelolaan TPA Regional			+	-		
	(14). Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA Regional	+	+				
	(15). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA Regional	<u> </u>	+				
	(16). Pemantauan dan Evaluasi TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi		_				
	(17). Operasi dan Pemeliharaan TPA Regional dan Fasilitasnya	+	+				
	Keterangan: untuk TPA Regional, O & P oleh Unit Kerja/UPTD TPA Regional dan didanai oleh APBD Kab./Kota penerima manfaat.						

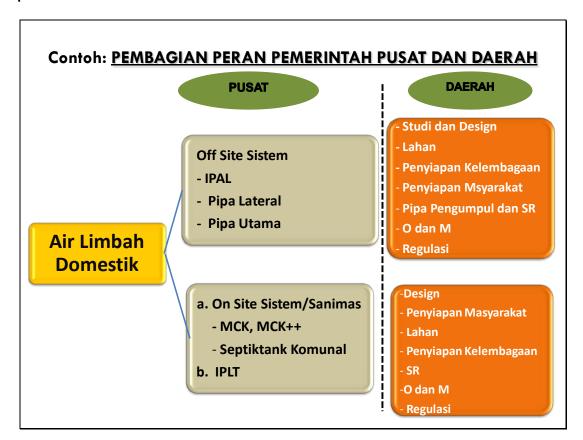
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	IN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN				
		APBD- Kab./Kota	APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
	D.3. REVITALISASI TPA						
	(1). Pembangunan Fisik Revitalisasi TPA						
	(1.1). Penyusunan studi kelayakan Revitalisasi TPA	+					
	(1.2). Penyusunan UKL/UPL atau AMDAL Revitalisasi TPA	+					
	(1.4). Sosialisasi "Rencana" Revitalisasi TPA kepada masyarakat sekitarnya	+					
	(1.3). Perencanaan Detail (DED) Revitalisasi TPA	+					
	(1.4). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Revitalisasi TPA		+	+			
	(1.5)						
	(2). Pengadaan Fasilitas Operasional TPA (Alat Berat) (3). Operasi dan Pemeliharaan TPA dan fasilitasnya	+	+	+			
	(4). Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan TPA/Unit Kerja TPA	+					
	(5). Pelatihan Pengelolaan TPA	•		+			
	(6). Penyuluhan dan Bimbingan kepada masyarakat disekitar TPA	+					
	(7). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA	+					
	(8). Pemantauan dan Evaluasi TPA/TPA Regional pada kondisi/tahap Operasi	+					
	(9)						
	D.4. PENUTUPAN TPA						
					1		
	(1). Penyusunan studi kelayakan Penutupan TPA	+			 		
	(2). Penyusunan AMDAL Penutupan TPA	+					
	(3). Perencanaan Detail (DED) Penutupan TPA	+					
	(4). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Penutupan TPA	+	+	+			
	(5). Monitoring, Pengoperasian dan Pengendalian Pasca Operasi TPA	+					
	(6)						
	E. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN						
	(1). Penyusunan Perda Pengelolaan Persampahan	+					
	(2). Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	+					
	(3). Penyusunan Perda Pengelolaan TPA						
	(4). Kerjasama Pengelolaan Persampahan	+					
	(5). Fasilitasi Kerjasama dengan Dunia Usaha/Lembaga						
	(6). Promosi penggunaan produk daur ulang sampah	+	+	+	+		
	(7). Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Persampahan	+					
	(8)						
	F DDOMOCL KAMDANYE DAN EDUKACI DEDCAMDALIAN						
	F. PROMOSI, KAMPANYE DAN EDUKASI PERSAMPAHAN						
	(1). Promosi Program 3R						
	(2). Kampanye dan Edukasi Persampahan						
_	DRAINAGE						
3	DRAINASE		1				
	A. PERENCANAAN UMUM						
	(1). Penyusunan Masterplan Sistem Drainase	+					
	(2). Penyusunan Outlineplan Sistem Drainase	+					
	(3). Review Masterplan Sistem Drainase	+					
	(4). Penyusunan Data Base Sistem drainase	+					
	(5). Studi Kelayakan Sistem Drainase Perkotaan Sub Sistem	+					
	(6)				 		
				ļ	ļ		
	B. SALURAN DRAINASE PRIMER			<u> </u>	<u> </u>		
	(1). Pembangunan Saluran Drainase Primer xxxxx						
	(a). Detail Desain (DED) Drainase Primer	+	+	+			
	(b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Primer	+					
	(c). Pembebasan lahan	+					
	(d). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Primer	+	+	+			
	(e)				ļ		
	(2). Rehabilitasi Saluran Drainase Primer xxxxx			<u> </u>			
	(a). Detail Desain (DED) Rehabilitasi Saluran Drainase Primer	+					
	(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Primer	+	+	+			
	(c)			ļ			
	(3). Pemeliharaan Saluran Drainase xxxxx						
	(a). Pemeliharaan Saluran Drainase Primer	+					
	(b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Primer	+					

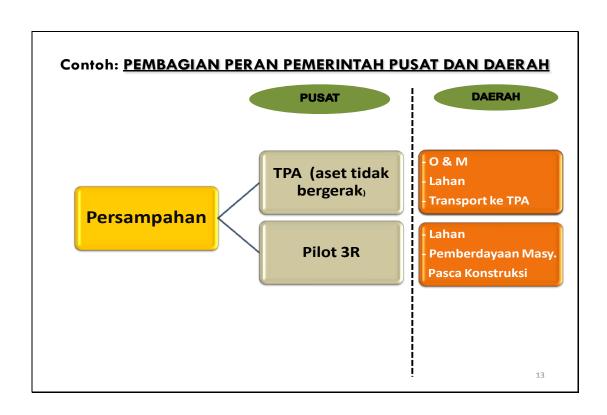
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
NOWOR	UNHAN REGISTAN	APBD- Kab./Kota	APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
	C. SALURAN DRAINASE SEKUNDER						
	(1). Pembangunan Saluran Drainase Sekunder xxxxx						
	(a). Detail Desain (DED) Pembangunan Drainase Sekunder (b). Sosialisasi Rencana Pembangunan Saluran Drainase Sekunder	+	+				
	(c). Pembebasan lahan	+ +					
	(d). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Sekunder	+	+				
	(e)						
	(2). Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder xxxxx						
	(a). Detail Desain (DED) Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder	+					
	(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Sekunder	+	+				
	(c)						
	(3). Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder xxxxx						
	(a). Pemeliharaan Saluran Drainase Sekunder	+					
	(b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Sekunder	+					
	(c)						
	D. SALURAN DRAINASE TERSIER				ļ		
	(1). Pembangunan Saluran Drainase Tersier xxxxx						
	(a). DED Pembangunan Saluran Drainase Tersier	+			-		
	(b). Supervisi dan Pembangunan Saluran Drainase Tersier	+		<u> </u>			
	(c)						
	(a). DED Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier						
	(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Saluran Drainase Tersier	+ +					
	(c)						
	(3). Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier xxxxx						
	1.1						
	(a). Pemeliharaan Saluran Drainase Tersier (b). Pengerukan Sedimen Saluran Drainase Tersier	+ +					
		+ +					
	(C)						
	E. KOLAM RETENSI						
	(1). Pembangunan Kolam Retensi (baru)						
	(a). Studi Kelayakan (b). Studi Lingkungan	+ +					
	(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan Kolam Retensi	+					
	(d). Pembebasan lahan	+					
	(e). DED Pembangunan Kolam Retensi	+		+			
	(f). Supervisi dan Pembangunan Kolam Retensi	+					
	(g)						
	(2). Rehabilitasi Kolam Retensi						
	(a). Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kolam Retensi	+		+			
	(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Kolam Retensi	+					
	(c)						
	(3). Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi						
	(a). Operasi dan Pemeliharaan Kolam Retensi dan Fasilitasnya	+					
	(b)		<u> </u>	L			
	F. RUMAH POMPA						
	(1). Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya						
	(a). Studi Kelayakan Pembangunan Rumah Pompa	+					
	(b). Studi Lingkungan Pembangunan Rumah Pompa	+					
			1				
	(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Pompa	+					
	(c). Sosialisasi Rencana Pembangunan Rumah Pompa (d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa	+					
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa	+		+			
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya	+ +		+			
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (f). Supervisi dan Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya	+ +		+			
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (f). Supervisi dan Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (g)	+ +		+			
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (f). Supervisi dan Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (g)	+ + +		+			
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (f). Supervisi dan Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (g)	+ + + + +					
	(d). Pembebasan lahan untuk Pembangunan Rumah Pompa (e). DED Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (f). Supervisi dan Pembangunan Rumah Pompa dan fasilitasnya (g)	+ + + + +					

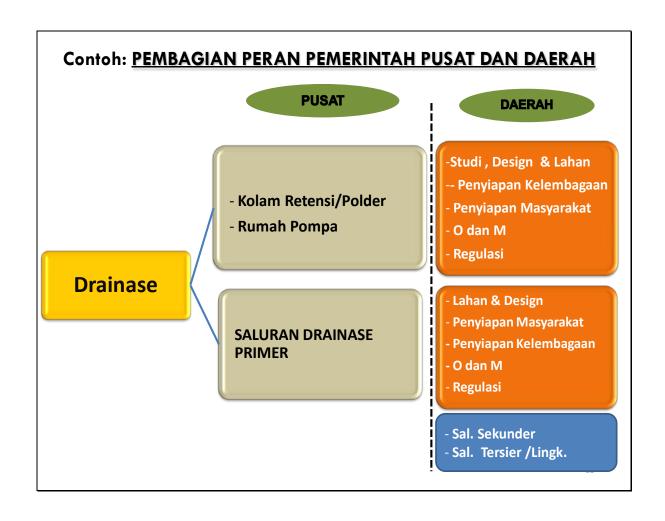
NOMOR	URAIAN KEGIATAN	INDIKASI ALOKASI SUMBER PENG- ANGGARAN/PENDANAAN					
NOMOR 1	GRANT REDIKTAT		APBD- Prov	APBN	SWASTA	MASYA- RAKAT	
1	2	3	4	5	6	7	
	G. PINTU AIR						
	(1). Pembangunan Pintu Air						
	(a). Perencanaan Teknis Pembangunan Pintu Air	+					
	(b). Supervisi dan Pembangunan Pintu Air	+		+			
	(c)						
	(2). Rehabilitasi Unit Pintu Air						
	(a). Perencanaan Teknis Rehabilitasi Pintu Air	+					
	(b). Supervisi dan Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Pintu Air	+		+			
	(c)	+		+			
	(3). Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air						
	(a). Operasi dan Pemeliharaan Pintu Air	+					
	(b)						
	H. PENGATURAN DAN KELEMBAGAAN						
	(1). Penyusunan Perda tentang Pengelolaan Sistem Drainase	+					
	(2). Sosialisasi Perda Pengelolaan Sistem Drainase	+					
	(3). Pembentukan Kelompok Masyarakat Pengelola Sistem Drainase Lingkungan Mandiri	+					
	(4)						
4	PHBS	<u> </u>		<u> </u>			
4	PHBS A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye						
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat	+					
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada	+ +					
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)			+			
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal.			+			
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)			+			
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM)			+			
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4)			+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS	+		+	+ +	+	
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll.	+		+		+ +	
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. (2). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal,	+ + +		+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. (2). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal, pasar, alun-alun dan stasiun)	+		+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembuatan media promosi dan informasi sadar hidup sehat, seperti banner, stiker, spanduk dll. (2). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal,	+ + +		+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4)	+ + +		+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4)	+ + + + +		+	+ + +	+	
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal, pasar, alun-alun dan stasiun) (5). C. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS	+ + +		+	+		
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4)	+ + + + +		+	+ + +	+	
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal, pasar, alun-alun dan stasiun) (5). C. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS (1). Lomba K3 (Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban)	+ + + + +		+	+ + +	+	
4	A. Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam PHBS melalui Kampanye (1). Road Show Penyuluhan tentang PHBS (CTPS, stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya) di sekolah-sekolah, Pondok Pesantren, Perkantoran, Permukiman dan ditempat-tempat (2). Penyuluhan dan kampanye Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) meliputi CTPS, Stop BABS dan Membuang sampah pada tempatnya melalui siaran radio atau TV lokal. (3). Program Sanitasi Terpadu Berbasis Masyarakat (STBM) (4). B. Penyediaan Sarana Fisik untuk mendukung PHBS (1). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di poskesdes (3). Pengadaan timba, kran di tiap posyandu dan taman posyandu (4). Pembangunan sarana cuci tangan pakai sabun (CTPS) di tempat-tempat umum (terminal, pasar, alun-alun dan stasiun) (5). C. Peningkatan peranserta masyarakat dalam PHBS	+ + + + +		+	+ + +	+	

+ : Indikasi Sumber Pendanaan

Lampiran 2.2: PENDANAAN SANITASI DARI SUMBER APBN CIPTA KARYA







Petunjuk Teknis-03

PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM

Dokumen Referensi Terkait:	Pelaksana:	Lama Kegiatan:
Daftar Rencana Investasi Sektor	Anggota Pokja Kab./Kota difasilitasi oleh	Dilakukan terus-menerus
Sanitasi Permukiman.	Fasilitator Kab./Kota dan dibantu sumber data dan	
Mewujudkan Permukiman Layak	informasi dari Pokja Provinsi dan Satker K/L	
Huni Melalui Kerjasama CSR	terkait yang difasilitasi oleh Fasilitator Provinsi.	
Bidang Cipta Karya		
Pedoman Pengelolaan Program		
Hibah Percepatan Pembangunan		
Sanitasi Infrastructure		
Enhancement Grant (IEG).		

Tujuan:

Menyusun Deskripsi Program, Project Diggest, DIPK dan Proposal Pendanaan guna meng-akses sumbersumber pendanaan potensial yang ada.

Deskripsi:

Untuk mencapai sasaran pengembangan dan pembangunan sector sanitasi diperlukan pendanaan yang cukup besar sehingga tidak semua program dan kegiatan yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran tersebut akan mendapatkan komitmen dari sumber-sumber pendanaan yang ada. Apabila salah satu atau lebih program atau kegiatan tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan jadwal dan volume yang telah ditetapkan maka target dan sasaran pengembangan/pelayanan sector sanitasi tidak tercapai.

Kurangnya pemahaman oleh para pengambil keputusan (legislatif dan eksekutif) tentang sanitasi sehingga menyebabkan kurangnya "keber-pihak-an" terhadap peng-alokasian anggaran pemerintah untuk sanitasi.

Untuk meyakinkan dan menambah pemahaman oleh para pengambil keputusan tersebut maka perlu dibuat "Deskripsi Program, Project Digest atau Proposal Pendanaan" untuk setiap kegiatan utama yang menjelaskan antara lain tentang latar belakang, tujuan dan sasaran, lingkup kegiatan, estimasi biaya yang diperlukan, keluaran dan manfaat yang diperoleh dan sebagainya.

Tabel 3.1: Penyiapan deskripsi program dan Proposal pendanaan

Deskripsi	Keterangan					
Deskripsi Program/Kegiatan. 1)	 "Harus/Wajib" dibuat oleh Pokja Kab./Kota untuk semua Program/Kegiatan Utama baik yang sudah mendapat komitmen maupun yang belum mendapat komitmen. (a) Air Limbah Domestik Pembangunan/Revitalisasi IPLT termasuk pengadaan truk tinja. Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat (b) Persampahan Pembangunan TPS 3R Pembangunan Transfer Depo Pembangunan ITF Pembangunan TPA Revitalisasi TPA Penutupan TPA 					

Deskripsi	Keterangan		
	(c) Drainase		
	 Pembangunan saluran drainase yang berdampak besar terhadap 		
	pengurangan genangan.		
	- Pembangunan Polder/Kolam Retensi		
	- Pembangunan Rumah Pompa		
Proposal Pendanaan. 2)	 Dibuat oleh Pokja Kab./Kota khusus untuk Program/Kegiatan yang diharapkan/diakses dari Lembaga/Swasta dan/atau perusahaan penyelenggara CSR yang sudah diketahui dan sesuai dengan keperluan. Proposal pendanaan yang dibuat untuk lembaga/swasta atau perusahaan penyelenggara CSR yang akan di-akses sumber pendanaanya harus disesuaikan dengan standart atau permintaan dari masing-masing sumber pendanaan yang akan di-akses kecuali tidak ada standartnya. 		

Catatan: 1): Harus dibuat; 2): Dibuat disesuaikan dengan kebutuhan

Output:

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

- Deskripsi Program/Kegiatan Utama.
- Proposal kepada sektor swasta yang potensial;

3.1 PENYUSUNAN DESKRIPSI PROGRAM/KEGIATAN

Definisi:

Deskripsi Program/Kegiatan adalah merupakan informasi tentang program sanitasi yang direncanakan untuk mendapatkan sumber pendanaan. Pokja Kab./Kota "harus" menyusun deskripsi program untuk program-program utama baik yang sudah mendapatkan komitmen maupun yang belum mendapatkan komitmen.

Tujuan dari penyusunan deskripsi program/kegiatan adalah untuk memberikan gambaran kepada pengambil keputusan dan atau sumber pendanaan tentang program, kegiatan dan kebutuhan pendanaan yang meliputi:

- Latar Belakang program;
- Tujuan dan Sasaran;
- Lingkup Kegiatan dan kebutuhan biaya yang diperlukan;
- Deskripsi tentang lokasi dan kondisi daerah sekitar rencana proyek.
- Keluaran dan penerima manfaat yang diharapkan
- Rencana Pengelolaan.

Bagi pemerintah Kab./Kota, Deskripsi Program dapat digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan program, kegiatan dan penganggaran kepada Tim Anggaran (TAPD), DPRD (Legislatif), pemerintah provinsi dan pemerintah pusat terhadap program dan kegatan yang diusulkan.

Disamping itu "Deskripsi Program/Kegiatan" dapat digunakan sebagai dasar untuk penyusunan "ToR (Term of Reference", "Project Digest dan Proposal Pendanaan".

3.2 PENYUSUNAN PROPOSAL KEPADA SEKTOR SWASTA/LEMBAGA/CSR

Langkah-langkah penyusunan proposal

- Lakukan pertemuan/workshop dengan lembaga, swasta, CSR dan lembaga lainnya yang berpotensi untuk berpartisipasi dalam pengembangan dan pembangunan sanitasi. Sampaikan dalam workshop berbagai hal tentang sanitasi permukiman di Kab./Kota khususnya rencana pengembangan dan pembangunan sanitasi serta program dan kegiatan yang dapat didukung oleh peserta workshop.
- Buat kesepakatan tindak lanjut dari pertemuan tersebut diatas dan tindak lanjuti.
- Buat Proposal Pendanaan (bila diminta sesuai kesepakatan) sesuai dengan standart atau permintaan dari sumber pendanaan yang akan di-akses.
- Bilamana tidak ada standart atau ketentuan yang berlaku maka substansi dari proposal bantuan pengembangan sanitas, setidaknya berisi:
 - (1). Latar Belakang;
 - (2). Tujuan dan Sasaran
 - (3). Lokasi dan Kondisi eksisting layanan pada wilayah yang diusulkan untuk mendapat bantuan;
 - (4). Upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh Pemerintah dan Masyarakat calon penerima manfaat.
 - (5). Usulan kegiatan mendapatkan bantuan termasuk perkiraan biaya.
 - (6). Keluaran / Output dari kegiatan tersebut.
 - (7). Penerima hasil kegiatan dan Manfaat dari masing-masing Stakesholder (Pemerintah, Masyarakat dan Swasta / CSR).
 - (8). Rencana Pengelolaan, mulai dari tahap persiapan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, operasi dan pemeliharaan yang meliputi: siapa, melakukan apa, bagaimana dan kapan.

Proposal pendanaan yang dibuat untuk lembaga/swasta atau perusahaan penyelenggara CSR yang akan di-akses sumber pendanaanya harus disesuaikan dengan standart atau permintaan dari masing-masing sumber pendanaan yang akan di-akses tersebut kecuali tidak ada standartnya.

Buku panduan mengenai tatacara pendekatan dalam rangka menjalin kerjasama dengan pihak penyelenggara program CSR untuk pembangunan sanitasi adalah "Buku Panduan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility-CSR), Penerbit : Tim Teknis Pembangunan Sanitasi (TTPS). Dapat didownload di: www.sanitasi.or.id

Buku referensi lainyang dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang peluang kerjasama dengan CSR adalah "Mewujudkan Permukiman Layak Huni Melalui Kerjasama CSR, Bidang Cipta Karya", diterbitkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum, Direktorat Cipta Karya.

Sebagai gambaran, beberapa perusahaan penyelenggara CSR/Masyarakat yang telah meng-alokasikan pendanaan untuk pembangunan infrastruktur seperti table dibawah ini. Dengan adanya beberapa contoh tersebut diharapkan Pokja AMPL/Sanitasi dapat terinspirasi untuk mendorong pemerintah daerah dan masyarakat dapat memanfaatkan peluang ini untuk pengembangan sanitasi didaerahnya.

Tabel 3.2: Contoh bentuk kemitraan Pemerintah/Masyarakat dengan Lembaga/Swasta/CSR

	J.Z. COIIION DENIUK	Kennuani remennanini I	asyarakat dengan Lembaga/Swa	ISIA/CSIK
No	Penerima CSR	Mitra	Bentuk Bantuan Kemitraan/CSR	Sumber
1	Bupati Barito Timur	PT. Senamas	Bantuan tunai Rp. 150 jt	Buletin CSR
2	Kab. Kediri, Kec. Ngancar	Bank Jatim	Stimulan Jamban keluarga, 1000 unit	PNPM Mandiri Pedesaan – Jawa Timur.
3	Kota Banjarmasin	PT. BNI	Pengadaan Tong Sampah	Buletin Cipta Karya-03/Tahun
4	Kab. Bereau	PT. Bereu C	Pengolahan Limbah jadi kompos, pembangunan gorong- gorong.	IX/Maret 2011
5	Kab. Samosir	PT. Toba Pulp	Melakukan 3R	
6	Kec. Lambaro, Banda Aceh	Kancab BRI Banda Aceh	Bantuan Semen dan Gerobag	Website Pemerintah Kab. Aceh Besar
7	Kab. Sumenep	BRI Sumenep	Pemasangan Lampu Taman	Memorandum. blogspot.com
8	Pasar-pasar tradisional	Bank Danamon	Program Pasar Sejahtera: Alat Kebersihan, Tempat Sampah, Renovasi MCK, Renovasi Drainase dsb.	www.scribd.com/doc/ 44109342/Contoh-Penerapan- CSR
9	Kab. Cilegon	Bank BTN, Cab. Cilegon	Gerobang Sampah	http://www.gerobaksampah.co m
10		Taxi Blue Bird	Gerobag Sampah	http://www.gerobaksampah.co m/
11	Kel. Krobokan, Kota Semarang	BPR Arta Mukti Santosa (AMS)	Tong Sampah	http://hariansemarangbanget. blogspot.com
12	Kab. Banjar, Kalsel	PT. Telkom	Tong Sampah	
13	Kota Palembang	PT. Pegadaian	Gorong-gorong, Tong sampah untuk taman, dsb.	Berita Pagi, Sumsel, 16 Apr. 2012
	Kota Jayapura	Bank Mandiri	Pembangunan MCK	bintangpapua.com, 04 Mei
14		Jasa Raharja	Tong Sampah	2012
		Bank Papua	Truk Sampah	
15	Kota Samarinda	Bank BPD Kaltim	Dump Truck (1 unit), ArmRoll (1 unit), Container (11 Unit)	www.dkpsamarinda.com/ datainfo-26-daftar-bantuan-csr-
		Bank BTN	TPS Permanen (1 unit)	dan-perbankan.html
		Universitas Mulawarman	Container (1 unit)	
		Bank Bukopin	Tong Sampah (20 unit)	
		Partai Demokrat	Container (1 unit)	
		Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu	Kontainer (2 unit)	
		Grand Victoria Hotel	Tong Sampah (3 unit)	
		Golden Season Hotel	Kontainer (3 unit)	
		Swadaya Masyarakat	TPS (1 unit)	
		Rumah Sakit H. Drajat	TPS (1 unit)	
		PT. Insani Bara Perkasa	Container (6 unit)	
		CV. 77	Container (1 unit)	
		CV. KSU	Container (1 unit)	
		PT. Jamsostek	Container (10 unit)	
		KONI Kota Smd Dispenda TK. I, Prov. Kaltim	Container (6 unit) TPS (1 unit)	
		Dinas PU TK. I, Prov. Kaltim	TPS (2 unit)	
	Kota Kudus	CSR Bank Mandiri dan Jarum Foundation	Sanitasi Sekolah berupa: Toilet kering, Sumur Resapan dan Pengembangan Energi Alternatif Biogas	Djarum Biasiswa Plus

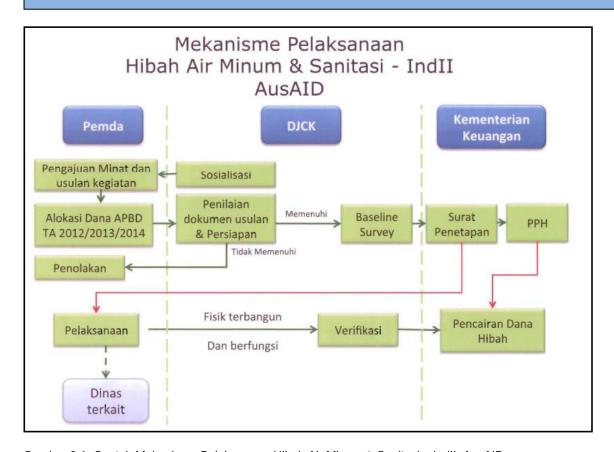
3.3 PENYUSUNAN USULAN MINAT KEPADA LEMBAGA DONOR

- Gunakan daftar lembaga donor potensial yang telah dibuat sebelumnya sebagai dasar untuk menentukan kegiatan yang sesuai dengan yang disyaratkan oleh donor.
- Kumpulkan dan pelajari pedoman-pedoman, ketentuan-ketentuan, persyaratan dan criteria setiap sumber pendanaan dari Negara-negara donor dan lembaga-lembaga keuangan internasional yang potensial untuk pendanaan sektor sanitasi. Ada beberapa donor yang dapat diakses antara lain: IndII (AusAid), Word Bank, USAid dsb.

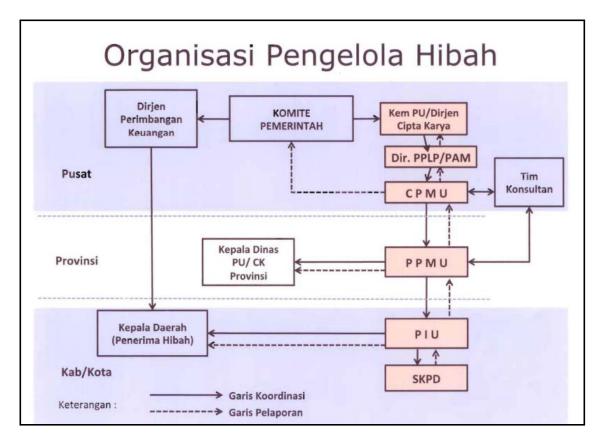
Pada gambar 3.1 dan 3.3 berturut-turut adalah contoh dari Mekanisme Pelaksanaan Hibah Air Minum & Sanitasi – IndII, AusAID dan Mekanisme Pengelolaan;

Salah satu contoh *Pedoman Pengelolaan Program Hibah"PERCEPATAN PEMBANGUNAN SANITASI" Infrasrtucture Enhancement Grant (IEG) dari AusAid dapat dilihat pada Lampiran*

Bentuk dan Substansi dari proposal pendanaan disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dari sumber pendanaan yang akan diakses.



Gambar 3.1: Contoh Mekanisme Pelaksanaan Hibah Air Minum & Sanitasi – IndII, AusAID



Gambar 3.2: Contoh Organisasi Pengelola Hibah

Petunjuk Teknis-04

RENCANA IMPLEMENTASI

Dokumer	n Referensi Terkait:	Pelaksana:	Lama Kegiatan:
- Meka	anisme Penganggaran	Seluruh Kab./Kota Peserta PPSP termasuk	Dilakukan setiap tahun
Regu	ıler.	Kab./Kota Lama.	'
- Kriter	ria kesiapan atau	Memorandum Tahunan:	
	ness criteria kegiatan	Pokja Kab./Kota, Pokja Provinsi dan Satker Terkait.	
	er K/L	Adopsi kedalam MekanismePenganggaran:	
Jaint	51 IVL	SKPD Kab./Kota, SKPD Prov. dan Satker terkait.	

Tujuan:

Tidak lanjut dari kesepakatan pemerintah kabupaten/kota yang terkait dengan persiapan untuk implementasi yaitu menyiapkan persyaratan-persyaratan atau kelengkapan untuk implementasi.

Deskripsi:

Implementasi adalah pelaksanaan semua kegiatan dari rencana yang sudah dibuat yang meliputi kegiatan fisik dan non fisik.

Kenyataan bahwa kemungkinan Program, kegiatan dan penganggaran yang telah disepakati bersama dalam bentuk Memorandum Program Sanitasi (MPS) oleh berbagai stakesholder terkait "tidak dapat" diimplementasikan oleh berbagai sebab diantaranya adalah tidak ada kesiapan untuk memenuhi "readiness criteria", kesiapan manajemen pengelolaan program dan pengawalan penganggaran. Program dan kegiatan yang disusun didalam MPS tidak bermanfaat bila tidak diadopsi oleh pemerintah daerah sebagai dokumen rujukan utama pengembangan sektor sanitasi kab./kota dan diadopsi kedalam dokumen-dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RPIJMD (ke-PU-an), Renstra SKPD, Renja SKPD dan sebagainya.

Bila ditinjau dari proses penganggaran regular pemerintah (tahunan) melalui mekanisme yang sudah ditetapkan oleh pemerintah misalnya melalui mekanisme Musrembang maka adopsi dari program dan kegiatan (MPS) harus dilakukan. Sehinggga program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS harus diusulkan oleh Kepala SKPD terkait melalui Renja SKPD agar masuk kedalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Tanpa usulan dari Kepala SKPD maka program dan kegiatan yang sudah disusun tidak akan terangkut kedalam penganggaran regular. Oleh karena itu fungsi dari dari Kepala SKPD sangat strategis.

Output:

Output yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

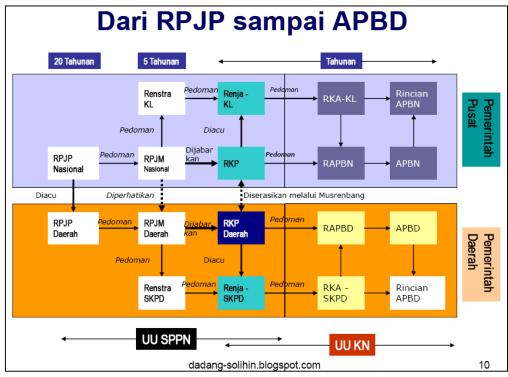
- Tersedianya tabel monitoring kesiapan terhadap manajemen implementasi dan organisasi pengelola dan daftar centang "readiness criteria" yang harus dipenuhi sebagai syarat untuk implementasi dan statusnya.
- Ter-adopsi-nya program dan kegiatan MPS kedalam perencanaan daerah;
- Ter-adopsi-nya program dan kegiatan MPS oleh kepala SKPD terkait kedalam mekanisme penganggaran regular (melalui Renja SKPD, Musrembang, Konreg, DPA, RKA dsb);

Langkah-langkah Pelaksanaan

- 1. Lakukan identifikasi status kegiatan dalam mekanisme penganggaran untuk implementasi tahun (n+2) dan (n+3)
 - Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN MEKANISME PENGANGGARAN.
 - Lakukan Identifikasi pemegang mata anggaran dari setiap kegiatan tersebut.
 - Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait dan Tim Anggaran untuk mengetahui status dari usulan kegiatan yang bersangkutan terhadap mekanisme penganggaran.
 - Isi tabel tersebut sesuai dengan status dari kegiatan yang diusulkan.
 - tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria penganggaran.
 - Tentukan SKPD terkait untuk bertanggungjawab dalam pengawalan penganggaran.
- 2. Lakukan identifikasi status kegiatan infrastruktur dalam pemenuhan kriteria kesiapan Implementasi tahun (n+2) dan (n+3)
 - Kumpulkan seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN IMPLEMENTASI INFRASTRUKTUR.
 - Lakukan Identifikasi lokasi dan pastikan bahwa lokasi kegiatan yang akan dilaksanakan siap untuk diimplementasi pada tahun (n+2) dan (n+3). Lakukan peninjauan lapangan (bila diperlukan) untuk memastikan kesiapan terhadap lokasi.
 - Lakukan pengecekan kepada SKPD terkait untuk mengetahui status dari kriteria kesiapan yang digunakan sebagai persyaratan untuk implementasi.
 - Kumpulkan data-data dan hasil studi yang telah dilaksanakan sebagai syarat untuk implementasi, seperti: Dokumen Masterplan, Studi Kelayakan, Studi Lingkungan, Sertifikat Kepemilikan Lahan dsb.
 - Pastikan bahwa kegiatan yang akan diusulkan kesumber dana APBN khususnya Kementerian
 Pekerjaan Umum sudah masuk kedalam review RPIJM, sudah ada surat minat dan surat kesediaan menerima aset dan kesanggupan untuk melakukan Operasi dan Pemeliharaan.
 - Isi tabel tersebut sesuai dengan status dari masing-masing kiteria yang sudah ditentukan.
 - Tentukan langkah yang diperlukan untuk memenuhi kriteria tersebut dan tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan implementasi infrastruktur.
- 3. Lakukan identifikasi status kesiapan ToR untuk pekerjaan Studi dan Desain
 - Kumpulkan seluruh kegiatan studi dan desain yang akan dilaksanakan/diimplementasikan pada tahun (n+2) dan (n+3) dalam tabel KRITERIA KESIAPAN STUDI DAN DESAIN.
 - Isikan rencana tahun implementasi untuk masing-masing kegiatan studi dan desain (khusus untuk pelaksanaan/implementasi tahun (n+2) dan (n+3)
 - Isikan lokasi kegiatan dan tentukan rencana pelaksana dari studi dan desain tsb (Individual Konsultan, Konsultan, Swakelola dsb.)
 - Isikan status ToR/KAK yang diperlukan untuk proses tender, gunakan deskripsi program untuk menyusun ToR/KAK.
 - Tentukan SKPD yang bertanggungjawab terhadap pemenuhan kriteria kesiapan studi dan desain.
- 4. Lakukan identifikasi kesiapan lahan dan permasalahan
 - Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur yang memerlukan pembebasan lahan, dimana pembebasan lahan akan dilakukan pada tahun (n+2) dan (n+3) kedalam tabel PENYELESAIAN PEMBEBASAN LAHAN
 - Isikan lokasi kegiatan, luas yang diperlukan/dibebaskan dan fungsi lahan yang akan dibebaskan.

- Sebutkan kendala dan permasalahan dari lahan yang akan dibebaskan sebagi dasar untuk mengambil langkah/kebijakan dalam menangani kendala dan permasalahannya.
- Berikan rekomendasi penanganan terhadap kendala atau permasalahan tersebut sebagai tindak lanjut untuk penyelesaian dan tentukan SKPD penanggungjawab untuk menangani permasalah pembebasan lahan.
- 5. Lakukan Identifikasi Kesiapan Organisasi Pengelola
 - Kumpulkan seluruh kegiatan infrastruktur pada tahun (n+2) dan (n+3) yang memerlukan lembaga pengelola dan masukkan kedalam tabel PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGUATAN ORGANISASI PENGELOLA.
 - Isikan lokasi kegiatan dan instansi pengelola saat ini serta sebutkan kondisi atau kendala dari pengelolaannya.
 - Berikan keterangan atau rekomendasi seperlunya tentang kondisi atau kendala dari pengelolaannya.
- 6. Susun Rencana Money dan Updating MPS-Tahunan
 - Susun dan sepakati Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi tahun (n+2)
 - Sepakati penanggungjawab dar masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring. Gunakan SE Mendagri No. 660/4919/SJ Tahun 2012 sebagai rujukan.
 - Rencana Kerja Monitoring dan Evaluasi meliputi:
 - (a). Rapat Rutin Koordinasi membahas tentang:
 - progres masing-masing kegiatan yang dilakukan monitoring
 - permasalahan-permasalahan yang dihadapi
 - rekomendasi dan tindak lanjut
 - (b). Pengawalan Penganggaran yang meliputi:
 - Proses Musrembang dari Musrembang Desa sampai Musrembang Nasional.
 - Review RPIJM
 - Renja SKPD
 - RKA
 - DPA
 - dst.....
 - (c). Penyiapan Readiness Criteria
 - (d). Solusi Funding Gap
 - (e). Updating MPS-Tahunan
 - (f). Monitoring Pelaksanaan Implementasi Kegiatan tahun (n+2).
 - (g). Dst.....
- 7. Adopsi kedalam Perencanaan dan Penganggaran
 - 7.1 Adopsi Program dan Kegiatan kepada dokumen perencanaan daerah
 - (1). Bagi Kabupaten/Kota dengan memiliki Kepala Pemerintahan yang baru Berikan advokasi kepada tim penyusun dokumen Rencana Jangka Menengah Kabupaten/Kota agar Dokumen PPSP (BPS, SSK dan MPS) dapat diadopsi kedalam Dokumen Kabupaten/Kota seperti Penyusunan RPJMD, RPIJMD, Renstra SKPD dsb.
 - (2). Bagi Kabupaten/Kota dengan Kepala Pemerintahan yang lama (sudah memiliki dokumen Rencana Strategi Jangka Menengah), sehingga adopsi yang memungkinkan adalah di dalam rencana tahunan.

Berikan advokasi kepada kepala SKPD terkait secara terus menerus agar program dan kegiatan yang sudah disusun didalam MPS dapat adopsi kedalam Renja SKPD. Revisi RPIJMD Tahunan danRKP Daerah.



Gambar 4.1: Skema perencanaan strategis Jangka Panjang, Menengah dan Tahunan

(3). Perencanaan Umum Daerah

- Jadikan Dokumen PPSP menjadi rujukan utama dalam penyususunan dokumen perencanaan umum daerah sector sanitasi. Perencanaan umum daerah dapat berupa: Masterplan, Outline Plan, RTRW, RDTRK dan Dokumen Manajemen Pengelolaan Sanitasi (Sub-sektor air limbah, sub-sektor persampahan dan sub-sektor drainase).
- Dari hasil perencanaan umum tersebut khususnya Manajemen Pengelolaan Sanitasi melalui studi yang mendalam akan memberikan gambaran secara mendetail hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan sanitasi dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan target yang telah ditetapkan didalam dokumen MPS.
- Apabila terjadi perbedaan –perbedaan antara dokumen MPS dengan dokumen perencanaan tersebut maka perlu dilakukan review terhadap dokumen MPS, menyesuaikan dengan dokumen perencanaandaerah tersebut.

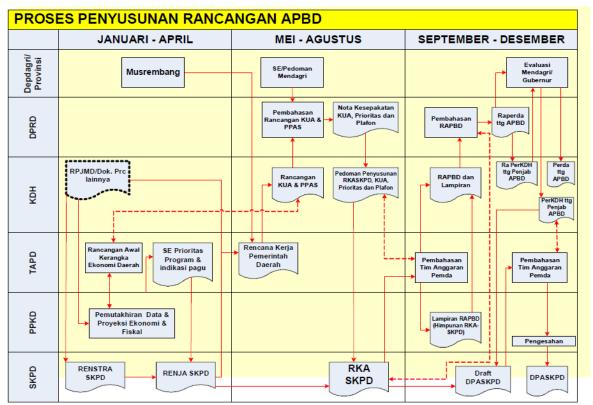
7.2 Adopsi kedalam Mekanisme Penganggaran Reguler

Memorandum Program Sanitasi (MPS) tidak akan bermanfaat jika program dan kegiatan yang sudah disusun tidak teradopsi kedalam mekanisme Penganggaran.

Pokja Sanitasi harus mengetahui dan mengikuti proses penganggaran regular agar mengetahui waktu-waktu kritis yang dapat diintervensi sehingga program dan kegiatan didalam MPS dapat diadopsi kedalam mekanisme penganggaran reguler.

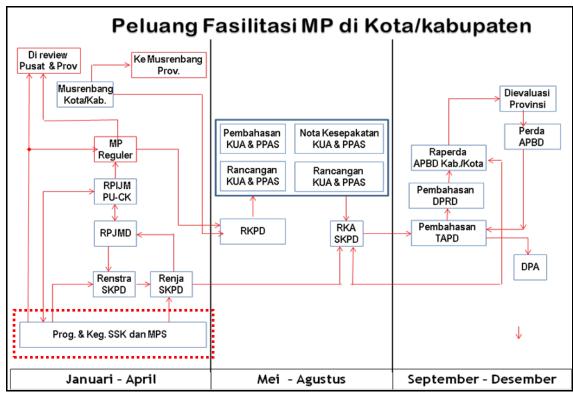
 Pelajari mekanisme penganggaran yang ada didaerah maupun dipusat baik dari segi proses maupun waktunya

- Gunakan dokumen PPSP sebagai bahan Advokasi kepada TAPD agar sanitasi menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah.
- Advokasi atau dorong kepala SKPD untuk memasukkan usulan program dan kegiatan MPS kedalam Renja SKPD.
- Lakukan Advokasi dan komunikasi kepada TAPD agar usulan program dan kegiatan MPS masuk kedalam Renja Pemerintah Daerah dan selanjutnya menjadi Rancangan KUA & PPAS.
- Siapkan Rangkuman eksekutif (BPS, SSK, MPS)dan Profil Program Sanitasi sebagai bahan advokasi kepada DPRD agar Rancangan KUA & PPAS menjadi KUA & PPAS dan akhirnya menjadi RKA SKPD.
- Lakukan Pengawalan terus sehingga menjadi DPA SKPD.

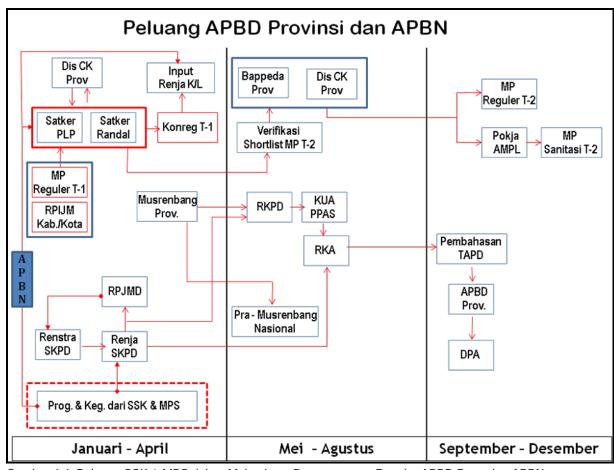


Sumber: Departemen Dalam Negeri

Gambar 4.2: Proses Penyusunan Rancangan APBD



Gambar 4.3: Peluang SSK & MPS dalam Mekanisme Penganggaran Reguler Kabupaten/Kota



Gambar 4.4: Peluang SSK & MPS dalam Mekanisme Penganggaran Reguler APBD Prov. dan APBN

Unit Tekait	T-2									T-1							
	Juli	A٤	gustus Se		pt. Okt.		Nov. Deser		nber Jan.		Feb. Ma		ret		April		Mei
	Konsol Usul RPIJ Kab./I	lan IM	Penyaringan Usulan Kegiatan		Sinkronisas i Tingkat Provinsi		Penyiapan Mmorandum Program Provinsi		Legalisasi Memorandu m Provinsi		Penajaman Usulan dalam Konreg		Trilateral Meeting dengan Bappenas & Kementerian		Musren bangnas		
Bina Program	V	,				V	١	V	V				V		V	V	
Randal Provinsi	V	,	V		V		,	V									
Dit. Teknis						V					V						
Satker Teknis Prov.			V			V	,	V									V
Dinas CK Kab/Kota	V	′				V	,	V	٧	,							
Bappeda Kab./Kota	٧	'				V											
Bupati/ Walikota	V	'							٧	′							
Gubernor/Ka. Dinas PU									٧	′	V				V		
T : tahun impl	emen	tasi															

Gambar 4.5: Proses Penyusunan Program Direktorat Cipta Karya (DCK)